

LAPORAN AKHIR

STATUS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008



Diterbitkan : November 2008

Data : November 2007 – November 2008 -11 -20



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
2008



KATA PENGANTAR

Isu lingkungan merupakan isu yang penting atau yang berpengaruh dalam kebijakan pembangunan suatu daerah. Dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, data mengenai status lingkungan hidup merupakan komponen data yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini perlu dikarenakan adanya keterkaitan antara lingkungan dengan manusia, dimana keduanya memiliki hubungan sebab akibat.

Untuk mendukung adanya kebijakan yang memihak pada lingkungan, perlu didukung data dan informasi tentang lingkungan hidup yang berkesinambungan, terukur, akurat dan transparan. Selain itu dalam mewujudkan akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat. Data yang disajikan menggambarkan informasi tentang lingkungan hidup, dampak permasalahan, respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan tentang lingkungan hidup yang terjadi.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang bermamfaat guna mencapai harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, dan juga merupakan langkah menuju pelaksanaan Good Environmental Governance.

Terima kasih.

Soreang,

Bupati Bandung

H. Obar Sobarna, S.IP

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi	<i>i</i>
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	<i>vi</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I - 1
1.1.1	Status Lingkungan Hidup dan Kebijakan Publik	I - 3
1.1.2	Peranan Dari Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung	I - 3
1.1.3	Struktur Komponen yang Di kembangkan	I - 3
1.2	Visi dan Misi Kabupaten Bandung	I - 5
1.3	Gambaran Umum Kabupaten Bandung	I - 5
1.4	Kondisi Fisik Dasar	I - 9
1.4.1	Letak Geografis dan Administrasi	I - 9
1.4.2	Topografi dan Kemiringan	I -13
1.4.3	Geologi dan Kawasan Rawan Bencana	I -14
1.4.4	Iklim	I -17
1.5	Kondisi Hidrologi	I -18
1.6	Penduduk	I -18
1.7	Sarana dan Prasarana	I -21
1.7.1	Sarana Air Bersih dan Kesehatan	I -21
1.7.2	Kesehatan	I -24
1.7.3	Pendidikan	I -27
1.8	Kebijakan Kabupaten Bandung	I -27
1.8.1	Fungsi dan Peran Kabupaten Bandung Dalam Konteks Makro	I -27
1.8.2	Kebijaksanaan Tata Ruang Kabupaten Bandung	I -28
1.8.3	Kebijaksanaan Sektor al Kabupaten Bandung	I -29

BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

2.1	Isu Air	II -7
2.2	Isu Lahan dan Hutan	II -10

2.3	Isu Limbah Padat dan B3	II -10
BAB III AIR		
3.1	Pendahuluan	III - 1
3.2	Tata Air di Kabupaten Bandung	III - 1
3.2.1	Mata Air	III - 1
3.2.2	Air Permukaan	III - 2
3.2.3	Lokasi Pengambilan Sampel	III - 2
3.2.4	Status Mutu Air	III - 6
3.2.5	Danau	III - 8
3.2.6	Air Tanah	III - 8
3.3	Permasalahan Sumber Daya Air	III - 11
3.3.1	Air Limbah	III - 12
3.3.2	Sampah	III - 16
3.4	Respon Yang Perlu Dilakukan	III - 19
BAB IV UDARA		
4.1	Sumber Pencemar Udara	IV - 3
4.1.1	Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak	IV - 4
4.1.2	Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	IV - 5
4.2	Respon	IV - 9
BAB V LAHAN DAN HUTAN		
5.1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung	V - 1
5.2	Lahan Kritis	V - 5
5.3	Pertambangan	V - 7
5.4	Respon	V - 12
BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI		
6.1	Pendahuluan	VI -1
6.2	Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung	VI -1
6.2.1	Flora dan Fauna (Keanekaragaman Hayati)	VI - 1
6.2.2	Keanekaragaman Hayati di Cagar Alam Gunung Tilu	VI - 5
6.2.3	Keanekaragaman Hayati di Cagar Alam Gunung Simpang	VI - 6
6.2.4	Cagar Alam Situ Patengan	VI - 7
6.2.5	Taman Wisata Alam Kamojang	VI - 7
6.3	Respon	VI - 8
BAB VII LINGKUNGAN PERMUKIMAN		

7.1	Air Bersih	VII - 1
7.2	Limbah Domestik	VII - 2
7.3	Sistem Drainase	VII - 4
7.4	Jaringan Listrik	VII - 5
7.5	Limbah Padat dan B3	VII - 6
7.5.1	Limbah Padat	VII - 7
7.5.2	Limbah B3	VII - 13
	7.5.2.1 Industri Yang Menggunakan Batubara	VII - 14
	7.5.2.2 Limbah Rumah Sakit	VII - 17
7.6	Respon	VII - 22

BAB VIII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1	Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia	VIII - 2
8.2	Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat	VIII - 4
8.3	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung	VIII - 5
8.4	Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Air	VIII - 7
8.5	Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Udara	VIII - 8
8.6	Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Sumber Daya Lahan dan Hutan	VIII - 9
8.7	Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Keanekaragaman Hayati	VIII - 10
8.8	Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Lingkungan Permukiman	VIII - 11

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Berdasarkan Harga Tetap Tahun 2007	I - 7
Tabel 1.2	Luas wilayah kabupaten Bandung Berdasarkan Wilayah Kecamatan	I - 11
Tabel 1.3	Luas dan kelereng Lahan di Kabupaten Bandung	I - 14
Tabel 1.4	Curah Hujan Rata-rata di Kabupaten Bandung Tahun 2007	I - 17
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung	I - 19
Tabel 1.6	Sarana Kesehatan dan Air Bersih	I - 22
Tabel 1.7	Penggunaan Sumber Air di Kabupaten Bandung	I - 23
Tabel 1.8	Sarana Kesehatan Kabupaten Bandung	I - 25
Tabel 1.9	Jumlah Dokter dan Tenaga Medis Kabupaten Bandung	I - 26
Tabel 1.10	Sarana dan Prasarana Pendidikan	I - 27
Tabel 3.1	Status Mutu Air	III - 3
Tabel 3.2	Rata-rata Air Limbah Perusahaan Berdasarkan Lokasi	III - 14
Tabel 3.3	Contoh Kualitas Air Limbah Perusahaan Berdasarkan Jenis Industri	III - 15
Tabel 3.4	Hasil Pemeriksaan Sampel Air di Outlet IPAL TPA	III - 17
Tabel 3.5	Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Air Tanah Tahun 2008	III - 18
Tabel 4.1	Hasil Analisis Pengukuran Kualitas Udara Ambien	IV - 2
Tabel 4.2	Beberapa Industri Yang Menghasilkan Timbulan Limbah Batubara	IV - 6
Tabel 4.3	Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT Naga Mas Kumia Sejahtera	IV - 7
Tabel 4.4	Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT. Himalaya Tunas Texindo	IV - 7
Tabel 4.5	Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT Anggana Kumia Putra	IV - 8
Tabel 5.1	Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung	V - 2

Tabel 5.2	Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	V - 6
Tabel 5.3	Jenis dan Lokasi Pertambangan di Kabupaten Bandung	V - 9
Tabel 6.1	Flora di Kawasan Terbuka/Umum di Kabupaten Bandung	VI - 2
Tabel 6.2	Fauna di Kawasan Terbuka/Umum	VI - 5
Tabel 7.1	Sumber dan Produksi Air Baku di Kabupaten Bandung	VII - 2
Tabel 7.2	Penggunaan Air Baku di Kabupaten Bandung	VII - 2
Tabel 7.3	Sarana Sanitasi Dasar di Kabupaten Bandung	VII - 3
Tabel 7.4	Energi Listrik Tenaga Air di Kabupaten Bandung	VII - 5
Tabel 7.5	Energi Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Bandung	VII - 5
Tabel 7.6	Pengembangan Biogas di Kabupaten Bandung	VII - 6
Tabel 7.7	Kondisi TPA Babakan di Kabupaten Bandung	VII - 8
Tabel 7.8	Jumlah dan Volume Sampah yang Terangkut Tiap Kecamatan di Kabupaten Bandung,	VII - 10
Tabel 7.9	Volume Sampah yang Terangkut	VII - 11
Tabel 7.10	Industri yang berpotensi menimbulkan limbah B3 berdasarkan zona	VII - 15
Tabel 7.11	Pengelolaan Limbah B3 Pada Rumah Sakit	VII - 18

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bandung	I - 12
Gambar 1.2	Kondisi suhu rata-rata di Kabupaten Bandung	I - 17
Gambar 1.3	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung	I - 20
Gambar 2.1	Salah Satu Berita di Media masa Mengenai Isu Lingkungan Yang Terjadi di Kabupaten Bandung	II - 2
Gambar 2.2	Diagram Model State – Pressure – Respon (SPR) (KLH,2008)	II - 4
Gambar 3.1	Peta Zona Air Tanah Kabupaten Bandung	III - 10
Gambar 3.2	IPAL di salah satu industri tekstil	III - 13
Gambar 3.3	Aliran air lindi yang melewati tanah tanpa dilapisi bahan kedap air	III - 10
Gambar 5.1	Peta Penggunaan Lahan	V - 4
Gambar 7.1	Bangunan untuk komposting yang merupakan bantuan Bank Dunia di TPA Babakan	VII - 9
Gambar 7.2	Sistem Open Dumping di TPA Babakan	VII - 9
Gambar 7.3	Aktivitas Pemulung di TPA Babakan, Kecamatan Ciparay	VII - 9
Gambar 7.4	Luka bakar pada kaki korban akibat terkena limbah abu batubara yang masih panas	VII - 21



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang



Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*) Di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21.

Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya Pemerintahan baik Daerah maupun Nasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, informasi lingkungan bagi pengambil keputusan merupakan isu lintas sektor yang utama. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pasal 10 huruf h, Undang-undang 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebairuaskannya kepada masyarakat.

Selain itu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada



Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good environmental governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bertujuan :

1. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan kepentingan penanaman modal (investor);
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Adapun sasarannya adalah :

1. Tersusunnya basis data status lingkungan hidup dan sumberdaya alam, yang akan dijadikan acuan dalam evaluasi dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten Bandung.
2. Terjadinya diseminasi informasi serta kesamaan persepsi mengenai lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya.
3. Tersusunnya laporan dan kumpulan data status lingkungan hidup Kabupaten Bandung yang menggambarkan berbagai fakta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta usulan berbagai skenario kebijakan, program, serta kegiatan untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari *stakeholders* dalam mengatasi masalah lingkungan.



1.1.1 Status Lingkungan Hidup dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses dimana masyarakat yang ada di suatu wilayah administratif mendefinisikan hubungan antara produksi barang dan jasa sepanjang kurva *production possibilities frontiers* (PPF) yang menggambarkan berbagai kemungkinan pengelolaan sumberdaya dalam suatu batasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam suatu kebijakan publik selalu ada *trade off* antar kepentingan publik dan privat yang komposisi distribusi biaya dan manfaatnya sangat ditentukan oleh proses ekonomi-politik

1.1.2 Peranan dari Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung

Pentingnya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:

- Tersedianya berbagai informasi yang akurat dan memadai menjadi suatu syarat di dalam membangun lembaga agar memiliki transparansi dan akuntabilitas terhadap publik sesuai dengan kebijakan diterapkannya pelaksanaan praktek pemerintahan yang baik (*good governance*) di berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 telah mengikat berbagai lembaga pemerintahan agar menyediakan informasi lingkungan yang akurat serta membuka akses publik seluas-luasnya terhadap masyarakat. Sehingga adanya media yang dapat dijangkau secara luas akan memungkinkan semua kewajiban pemerintah ini dapat dilaksanakan.

1.1.3 Struktur Komponen yang Dikembangkan

Secara keseluruhan komponen yang akan dikembangkan didasarkan kepada penggambaran kondisi sumberdaya alam yang didasarkan pada konsep *state-pressure-response* (SPR). Dalam kerangka SPR, ada tiga indikator utama yang akan dianalisis, yaitu :

- **Indikator kondisi lingkungan (*state*)**. Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan yang dibuat untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan pengembangannya di masa depan.



- **Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*).** Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan termasuk kualitas dan kuantitas sumberdaya alam. Jelas dapat digambarkan antara indikator tekanan-secara langsung mempengaruhi lingkungan, seperti emisi atau konsumsi sumber alam, dan tekanan tidak langsung, yaitu tekanan yang merefleksikan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan melalui suatu media tertentu (darat, air, udara).
- **Indikator respons (*response*).** Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholders* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

Secara keseluruhan laporan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung akan mencakup hal-hal berikut :

- **Pembahasan yang jelas,** ringkas dan padat mengenai suatu isu (baik/buruk, lebih baik/lebih buruk, mengapa) disertai dengan prakiraan kualitatif menggunakan warna dan simbol-simbol. Pembahasan ini dirancang sedemikian rupa sehingga publik umum dapat memahami berbagai fakta sumberdaya alam dan lingkungan.
- **Bagian SPR yang disertai uraian dan indikator faktual,** studi kasus, foto, dan penjelasan setiap indikator secara rinci di halaman khusus. Indikator yang digunakan akan disesuaikan dengan kesepakatan antara berbagai *stakeholders*. Selain itu dalam analisis tersebut akan ditampilkan mengenai hubungan kasualitas dan dampak terhadap perubahan yang saling mempengaruhi antar parameter.
- **Link,** dengan bab-bab lain, latar belakang dan informasi mengenai rujukan. Baik yang mencakup dokumen yang terkait langsung dengan bahan rujukan dan dokumen yang dipakai dalam penyusunan laporan Kualitas Lingkungan maupun berbagai lokasi situs yang mempunyai akses terhadap berbagai pendekatan SPR.



1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi

Pengembangan Kabupaten Bandung pada tahun 2005 – 2010 dilakukan melalui visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.

Misi

1. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik
2. Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat
5. Mewujudkan Keshalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Takwa
6. Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda
7. Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
8. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki posisi strategis dalam konstelasi geografis regional maupun Nasional. Wilayah ini menjadi kawasan terdekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu pintu gerbang utama (*main gate*) Cekungan Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki luas 176.238,67 Ha. Dan terhitung mulai 17 Desember 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin, jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung menjadi 31 kecamatan yaitu dengan bertambahnya Kecamatan Kutawaringin. Kecamatan Kutawaringin merupakan pemekaran dari Kecamatan Soreang dengan jumlah desa sebanyak 11 Desa. Desa-desa tersebut adalah :

- Desa Cilame
- Desa Kopo
- Desa Padasuka



- Desa Cibodas
- Desa Jelegong
- Desa Pameuntasan
- Desa Kutawaringin
- Desa Sukamulya
- Desa Jatisari
- Desa Buminagara
- Desa Gajahmekar

Kecamatan-kecamatan yang lain yaitu, Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Balendah, Arjasari, Banjaran, Canguang, Pameungpeuk, Katapang, Soreang, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cileunyi, Cilengkang dan Cimendan.

Dalam era otonomi dewasa ini, daerah memiliki ruang kiprah yang lebih luas dalam membangun wilayahnya dibanding masa lalu. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan serta pertanian dan perdagangan terbukti secara signifikan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan baik yang dilakukan melalui prakarsa pemerintah daerah maupun atas prakarsa swasta dan swadaya masyarakat.

Pada era otonomi daerah ini, kondisi ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya lihat **Tabel 1.1**.



Tabel 1.1 Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Berdasarkan Harga Tetap Tahun 2004 – 2007

NO	RINCIAN PDRB	NILAI (Juta Rp)			
		2004	2005	2006	2007
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.936.204,42	2.040.223,68	2.157.941,94	2.046.450,09
	1.1 Tanaman bahan makan	1.319.688,58	1.391.707,07	1.478.223,23	1.367.731,46
	1.2 Tanaman perkebunan	279.545,63	295.784,55	310.162,91	310.162,91
	1.3 Peternakan dan hasil-hasilnya	268.526,07	281.305,59	294.764,75	394.764,75
	1.4 Kehutanan	11.936,91	12.510,64	13.198,42	13.198,42
	1.5 Perikanan	56.507,23	58.915,83	61.592,63	60.592,53
2	Pertambangan dan Penggalian	246.858,35	256.416,09	268.367,91	268.367,91
	2.1 Minyak dan gas bumi	186.088,28	192.363,38	200.176,06	200.176,06
	2.2 Pertambangan tanpa migas	-	-	-	-
	2.3 Penggalian	60.770,07	64.052,71	68.191,85	68.191,85
3	Industri Pengolahan	10.574.505,35	11.125.338,93	11.738.997,41	13.843.569,24
	3.1 Industri migas	-	-	-	-
	3.2 Industri tanpa migas	10.574.505,35	11.125.338,93	11.738.997,41	13.843.569,24
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	706.149,76	743.427,65	780.906,62	780.907,03
	4.1 Listrik	694.995,44	731.017,11	767.708,20	767.708,20
	4.2 Gas Kota	-	-	-	-
	4.3 Air Bersih	11.154,32	12.410,54	13.198,42	13.198,83
5	Bangunan	424.878,92	440.574,19	466.344,23	466.344,23
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.433.578,85	3.601.962,30	3.819.243,35	3.822.693,35
	6.1 Perdagangan besar dan eceran	2.736.833,36	2.877.802,13	3.037.836,73	3.041.286,73
	6.2 Hotel	15.900,06	16.759,35	18.097,90	18.097,90
	6.3 Restoran	680.845,43	707.400,82	763.308,72	763.308,72

Bersambung...



Tabel 1.1 lanjutan

NO	RINCIAN PDRB	NILAI (Juta Rp)			
		2004	2005	2006	2007
7	Pengangkutan dan Komunikasi	984.078,75	1.018.397,30	1.080.367,16	967.882,53
	7.1 Pengangkutan	849.448,34	872.862,59	924.185,84	924.185,84
	7.2 Komunikasi	134.630,41	145.534,71	156.181,32	43.696,69
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	522.862,88	549.793,71	576.331,08	574.331,09
	8.1 Bank	77.017,70	85.795,70	92.388,95	90.388,96
	8.2 Lembaga Keuangan Lainnya	18.438,66	19.333,89	19.797,63	19.797,63
	8.3 Sewa Bangunan	341.694,78	353.653,49	369.555,81	369.555,81
	8.4 Jasa Perusahaan	85.711,74	91.010,63	94.588,69	94.588,69
9	Jasa-jasa	1.053.177,97	1.102.159,14	1.170.260,06	737.514,28
	9.1 Pemerintahan Umum	461.163,49	486.079,51	512.538,71	79.792,93
	9.2 Swasta	592.014,47	616.079,63	657.721,35	657.721,35
	TOTAL	19.882.295,24	20.878.293,00	22.058.759,76	23.508.099,75

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2004-2007

Keterangan : - Tidak ada data

Pada tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Bandung periode 2004-2007 terdiri dari beberapa sektor, salah satunya dari sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini tercatat mempunyai nilai pendapatan tertinggi sebesar Rp **13.843.569,24** sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung.



Dalam rangka lebih memacu perkembangan di Kabupaten Bandung, seiring dengan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk pemberdayaan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi kerakyatan. Salah satu yang harus dipersiapkan dalam rangka optimalisasi otonomi daerah adalah sumber daya manusia. Tanpa sumberdaya manusia yang handal maka segala peluang dan potensi pembangunan yang dimiliki daerah ini tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.4 Kondisi Fisik Dasar

1.4.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis wilayah Kabupaten Bandung terletak pada $6^{\circ}41'$ sampai $7^{\circ}19'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}22'$ sampai $108^{\circ}5'$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bandung mempunyai luas 176.238,67 ha, meliputi 31 Kecamatan, yang terdiri dari 266 desa dan 9 kelurahan. Secara administratif Kabupaten Bandung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Wilayah administrasi Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Kota Cimahi merupakan wilayah otonom baru yang pada tahun 2001 mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom sekaligus secara administratif terpisah dari Kabupaten Bandung. Sedangkan Kabupaten Bandung Barat secara administratif terpisah dari Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

Luas wilayah Kabupaten Bandung untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

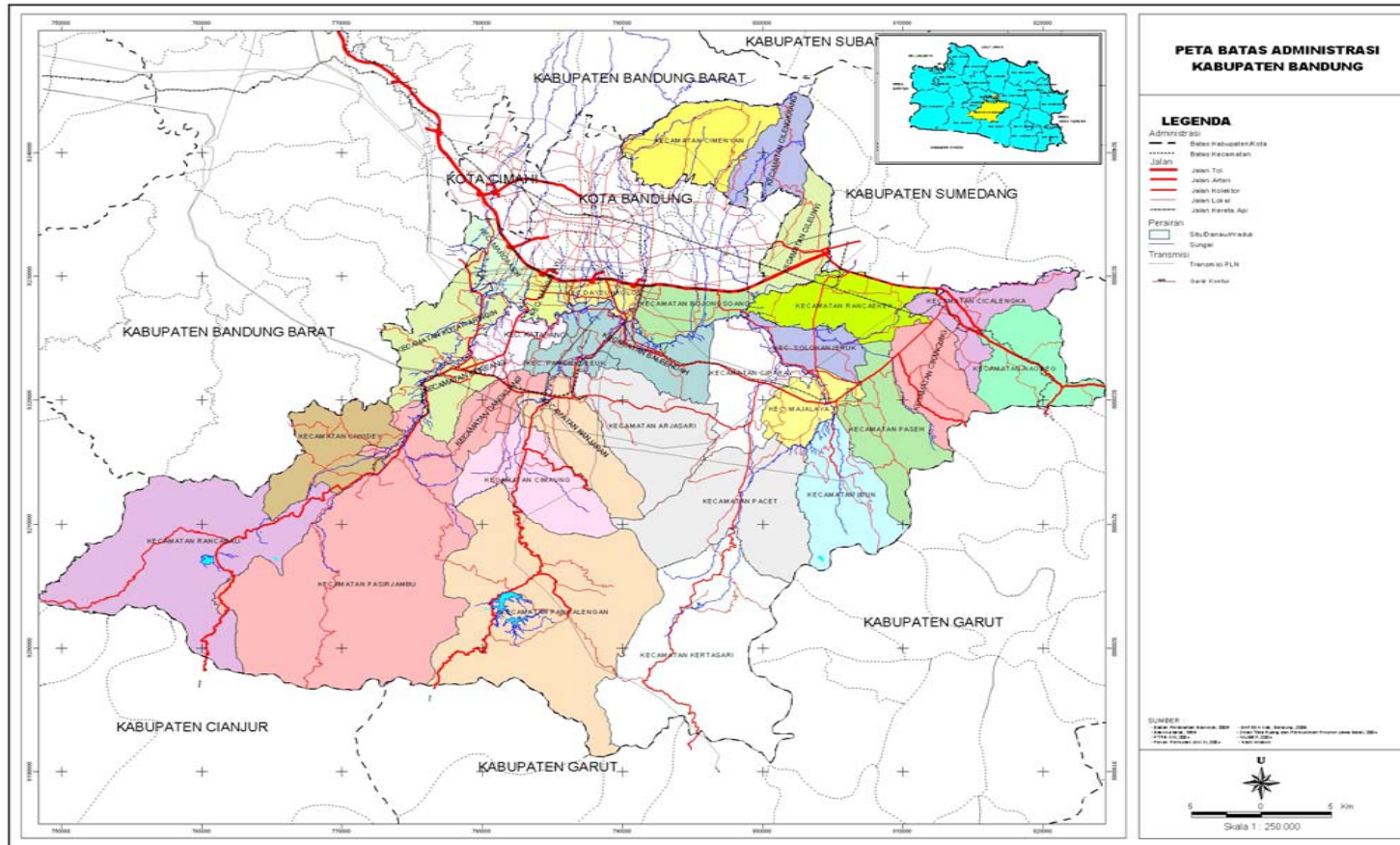


Tabel 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Bandung tiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)
1	Cileunyi	31,58
2	Cimeunyan	52,87
3	Cilengkrang	29,91
4	Bojongsoang	27,34
5	Margahayu	10,54
6	Margaasih	17,97
7	Katapang	15,72
8	Dayeuhklot	11,03
9	Banjaran	37,90
10	Pameungpeuk	14,62
11	Pangalengan	195,42
12	Arjasari	64,98
13	Cimaung	55,00
14	Cicalengka	35,66
15	Nagreg	48,59
16	Cikancung	40,53
17	Rancaek	45,30
18	Ciparay	45,98
19	Pacet	92,00
20	Kertasari	151,95
21	Baleendah	41,82
22	Majalaya	25,16
23	Solokanjeruk	24,01
24	Paseh	58,25
25	Ibun	54,57
26	Soreang	19,7
27	Pasirjambu	239,49
28	Ciwidey	49,84
29	Rancabali	147,00
30	Cangkuang	29,63
31	Kutawaringin*	47,3
TOTAL		1761,66

Sumber: Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan: *Kecamatan baru



Sumber: Bapeda Kabupaten Bandung, 2008

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung



1.4.2 Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Bandung terletak pada $107^{\circ}22' - 108^{\circ}5''$ BT dan $6^{\circ}41' - 7^{\circ}19'$ LS, dengan luas daerah 176.238,67 Ha. Wilayah Kabupaten Bandung terletak pada ketinggian ± 110 meter dpl, lokasi tertinggi yaitu Kecamatan Cipeundeuy sampai ketinggian 2.429 meter dpl di Gunung Patuha.

Wilayah dengan ketinggian tempat kurang dari 2.000 m dpl sebagian besar berada di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Kertasari dan Pasirjam bu. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 2.000 m/dpl merupakan wilayah yang paling sempit, yaitu seluas 14.863.500 ha atau 4,81% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Banjaran, Kertasari, Pacet, Pangalengan dan Pasirjam bu.

Wilayah Kabupaten Bandung merupakan cekungan di dataran tinggi Bandung yang morfologi wilayahnya terdiri dari dataran landai, kaki bukit dan pegunungan. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0 - 8%, 8 - 15% hingga > 40%. Sebagian besar wilayah kaki bukit dan pegunungan terbentang sepanjang bagian Utara dan Selatan serta bagian Barat Kabupaten Bandung dengan kemiringan beragam antara 26-40% dan > 40%. Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang penting, khususnya formasi Cibeureum. Secara hidrogeologis, wilayah ini merupakan kawasan lindung, yang berfungsi menjaga keseimbangan hidrologis Cekungan Bandung.

Dataran Kabupaten Bandung terhampar luas di bagian tengah Cekungan Bandung dengan kemiringan 0 - 2% dan 2 - 8% ke arah barat dan ke arah Sungai Citarum yang membelah wilayah dari timur ke barat. Wilayah ini merupakan kawasan persawahan subur yang sebagian di antaranya rawan banjir. Kota-kota yang merupakan satelit dan sembrani tandingan (*counter magnet*) dari Kota Bandung terdapat di wilayah ini.

Secara rinci proporsi tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bandung disajikan sebagai berikut:



- Daerah datar (0 - 8 %) meliputi areal seluas 119.636,62 Ha atau 37,68 % dari seluruh luas daratan yang ada tersebar di sepanjang alur Sungai Citarum .
- Daerah landai (8 - 15 %) meliputi areal seluas ± 42.897,83 Ha atau 13,51 % dari seluruh areal yang ada.
- Daerah agak curam (15 - 25 %) meliputi areal seluas ± 85.076,60 Ha atau ± 26,79% dari seluruh luas daratan yang ada.
- Daerah curam (25 - 40 %) meliputi areal seluas ± 61.187,77 Ha atau 19,27 % dari luas daratan yang ada.
- Daerah sangat curam (> 40 %) meliputi areal seluas ± 8.758,45 Ha atau 2,76 ha % dari luas daratan yang ada. Daerah ini merupakan punggung - punggung pegunungan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.

Selengkapnya data luas dan kelerengan lahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 1.3** berikut.

Tabel 1.3 Luas dan Kelerengan Lahan di Kabupaten Bandung

<i>Kelerengan Lahan</i>	Luas	
	Ha	%
0-8 %	119.636,62	37,68
8-15 %	42.897,83	13,51
15-25 %	85.076,60	26,79
25-40 %	61.187,77	19,27
>40 %	8.758,45	2,76
Jumlah	317.598,45	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung, 2007

1.4.3 Geologi dan Kawasan Rawan Bencana

Pengertian kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan yang pernah terjadi adalah erosi tanah. Di samping itu terdapat juga beberapa kawasan yang termasuk dalam bahaya lahar gunung berapi.



Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu, dengan muara-muara anak sungainya yang sering menyebabkan banjir, antara lain Sungai Ciganitri, Sungai Citarik, Sungai Cimanggung, Sungai Cimuncang dan Sungai Cipamokolan. Luas kawasan yang terkena genangan banjir rutin seluas 1.700 ha. Kawasan Desa Tegalluar, Desa Babakan Sayang dan Desa Sapan di kecamatan Rancaekek serta kecamatan Bojongsoang menjadi kawasan limitasi bagi pengembangan di Kabupaten Bandung. Secara rinci kawasan rawan bencana banjir tersebut adalah: Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Majalaya. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase disini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.

Sementara itu sungai yang pembuangannya melintasi jalan, antara lain : sungai Cipamokolan dan sungai Cinambo (Desa Tegalluar); sungai Babakan Sayang dan sungai Ciendog (Desa Babakan sayang). Sungai-sungai tersebut bermuara di sungai Citarik yang selanjutnya menuju arah sungai Citarum di Desa Sapan. Itulah sebabnya setiap tahun Desa Sapan mengalami banjir.

Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan dan air menggenang di sisi kanan-kiri badan jalan. Walau terjadi secara temporer, daerah lainnya yang memiliki potensi banjir adalah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Margasari.

Untuk mengatasi masalah banjir ini, maka program yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan normalisasi anak sungai Citarum, melakukan peningkatan sistem drainase tersier, serta menyesuaikan dengan outlet yang ada di Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dengan Citarum.



Menurut data dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), luas wilayah yang tergenang banjir tahun 2007 adalah sebesar 1.618 Ha. Daerah-daerah tersebut meliputi Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Banjaran. Wilayah yang tergenang banjir tahun 2007 mengalami penurunan dibanding pada banjir tahun 2005 yang luas tergenangnya mencapai 4.400 Ha.

Selain normalisasi, dilakukan juga pengerukan dan pendalaman Sungai Citarum yang telah dilakukan sepanjang 12.731 km dari Desa Sukamukti Kecamatan Katapang sampai dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dan Proteksi Muara Sungai di Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot sepanjang 7.528 km melalui proyek yang dibiayai oleh *loan* JBIC, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.

Secara umum drainase tanah permukaan di Kabupaten Bandung terdiri atas 3 (tiga) kelas yaitu tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan tergenang terus menerus (waduk/situ/danau). Kawasan yang tidak pernah tergenang (genangan akhirnya mengalir) mencapai 296.940,49 ha atau hampir 96,03%, sedangkan sisanya 3,97% merupakan daerah yang tergenang terus menerus seperti waduk atau danau.

Bencana yang juga pernah terjadi adalah erosi tanah (longsor). Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi ini sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik tanah, jenis tanah, tekstur, konsistensi tanah disamping intensitas atau jumlah curah hujan, tutupan vegetasi maupun teknik pengelolaan tanah atau usaha konservasi tanahnya. Tanah yang tidak/belum mengalami erosi yaitu seluas 289.352,63 ha atau 97,44% dari luas wilayah. Sedangkan sisanya yaitu 7.587,86 ha atau 2,56% telah mengalami atau merupakan daerah rawan erosi dengan tingkat erosi yang beragam. Daerah-daerah yang rawan erosi tanah antara lain di Kecamatan Ciwidey dan Pangalengan.



Beberapa kawasan, terutama di utara Kabupaten Bandung juga tergolong daerah beresiko aliran lahar. Lahar ini dapat terbawa sungai sehingga membahayakan daerah-daerah yang dilalui sungai tersebut. Beberapa kecamatan memiliki kawasan beresiko aliran lahar ini antara lain Kecamatan Gileunyi (220 ha), Cilengkrang (220 ha) dan Cimenyan (230 ha).

1.4.4 Iklim

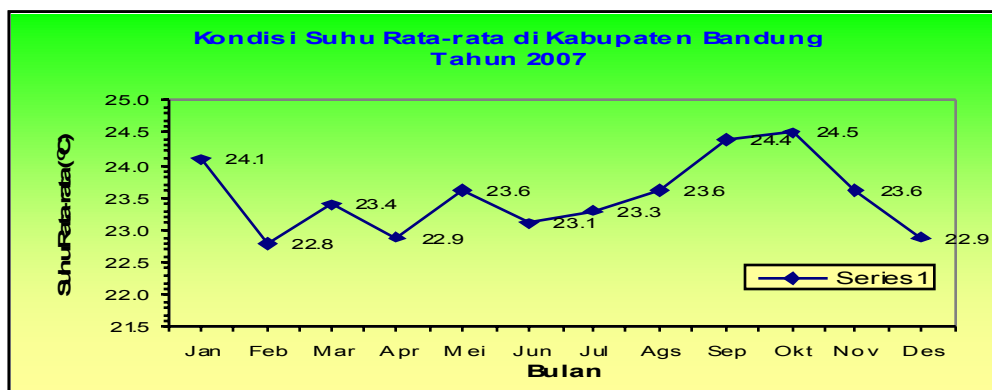
Wilayah Kabupaten Bandung mempunyai iklim tropis dengan suhu udara terendah 22° C dan suhu tertinggi 25° C, sedangkan keadaan curah hujan rata-rata tertinggi di wilayah ini terjadi pada bulan April. Sedangkan wilayah dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Secara rinci keadaan curah hujan dan iklim di wilayah Kabupaten Bandung untuk tahun 2007 dapat dilihat pada **Tabel 1.4** dan **Tabel 1.5**.

Tabel 1.4 Curah Hujan Rata-rata di Wilayah Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Soreang	194,9	244,0	148,9	431,1	135,2	94,3	2,0	12,5	60,6	194,7	354,3	414,0
2	Cileunyi	217,5	287,5	265,0	254,5	85,5	43,2	31,5	-	-	114,5	189,2	207,0
	TOTAL												

Sumber : BMG Kota Bandung, 2007

Kondisi suhu rata-rata di kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Sumber : BMG Kota Bandung, 2007

Gambar 1.2 Kondisi suhu rata-rata di Kabupaten Bandung



Untuk data iklim tahun 2008 di Kabupaten Bandung belum tersedia, hal ini dikarenakan masih dalam proses.

1.5 Kondisi Hidrologi

Sungai yang melewati Kabupaten Bandung adalah Sungai Citarum yang merupakan Sungai terbesar dan terpanjang di Wilayah Jawa Barat. Sungai Citarum banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, rumah tangga, budidaya perikanan, industri, pengembangan pariwisata dan sebagai air baku air bersih.

Aliran sungai ini berpola susunan tulang rusuk dengan Sungai Citarum sebagai tulang belakangnya. Dampak dari pola ini menjadikan Sungai Citarum mempunyai beban pencemaran maupun sedimentasi yang tergolong berat. Beberapa anak sungainya membawa buangan bahan pencemaran akibat aktivitas industri dan juga membawa erosi yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada beberapa muara anak sungai tersebut. Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, meskipun kondisi hidrologi setiap wilayah berbeda. Luas daerah tangkapan dari DAS Citarum ini kurang lebih 268.130 ha.

1.6 Penduduk

Pada tahun 2008 Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sebesar 3.151.432 jiwa. Kecenderungan dari tahun ke tahun, jumlah penduduk meningkat. Hal ini dapat dilihat penambahan penduduk tiap kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Bandung belum dapat dilihat kecenderungannya karena mulai tahun 2007, Kabupaten Bandung mengalami pemekaran. Secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 1.6**. sedangkan untuk profil kepadatan penduduk Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.



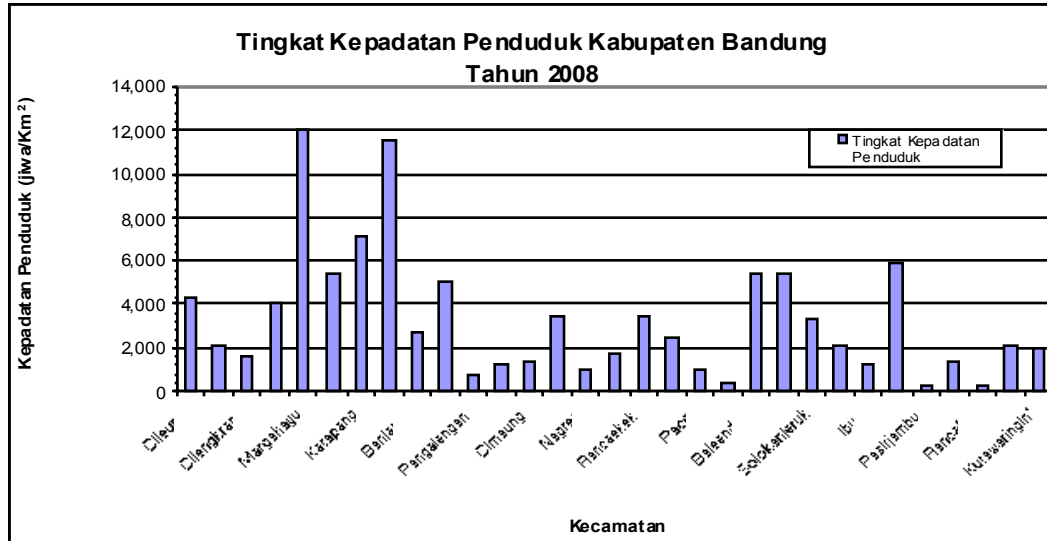
Tabel 1.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2007				TAHUN 2008			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
1	Cileunyi	61.468	60.431	121.899	101,72	72.503	66.774	139.277	108,58
2	Cimunyan	44.181	43.013	87.194	102,72	56.437	52.388	108.825	107,73
3	Cilengkrang	20.051	18.633	38.684	107,61	24.049	22.767	46.816	105,63
4	Bojongsoang	38.016	37.067	75.083	102,56	56.625	53.679	110.304	105,49
5	Margahayu	50.760	49.614	100.374	102,31	65.971	61.264	127.235	107,68
6	Margaasih	59.632	57.047	116.679	104,53	49.941	47.236	97.177	105,73
7	Katapang	59.381	60.593	119.974	98,00	57.759	53.615	111.374	107,73
8	Dayeuhkolot	48.299	47.790	96.089	101,07	65.519	61.747	127.266	106,11
9	Banjaran	49.853	49.148	99.001	101,43	54.067	50.436	104.503	107,20
10	Pamungpeuk	31.355	30.745	62.100	101,98	38.071	36.313	74.384	104,84
11	Pangalengan	65.125	66.262	131.387	98,28	74.696	72.586	147.282	102,91
12	Arjasari	42.645	41.677	84.322	102,32	41.316	39.608	80.924	104,31
13	Cimang	33.662	32.877	66.539	102,39	41.748	39.101	80.849	106,77
14	Cicalengka	48.235	49.709	97.944	97,03	63.956	61.410	125.366	104,15
15	Nagreg	21.812	21.134	42.946	103,21	26.367	24.324	50.691	108,40
16	Cikancung	36.840	36.384	73.224	101,25	37.362	35.505	72.867	105,23
17	Rancaekek	72.794	72.719	145.513	100,10	81.447	78.747	160.194	103,43
18	Ciparay	70.324	68.671	138.995	102,41	58.821	57.088	115.909	103,04
19	Pacet	47.157	44.958	92.115	104,89	53.486	48.776	102.262	109,66
20	Kertasari	31.684	31.387	63.071	100,95	32.869	30.985	63.854	106,08
21	Baleendah	86.173	84.684	170.857	101,76	117.603	110.934	228.537	106,01
22	Majalaya	71.067	68.292	139.359	104,06	70.494	66.714	137.208	105,67
23	Soloanjeruk	36.271	35.036	71.307	103,52	41.777	38.751	80.528	107,81
24	Paseh	55.529	54.298	109.827	102,27	63.574	60.606	124.180	104,90
25	Ibun	35.001	34.558	69.559	101,28	36.949	33.934	70.883	108,88
26	Soreang	72.789	71.102	143.891	102,37	61.060	56.471	117.531	108,13
27	Pasirjambu	38.019	37.911	75.930	100,28	38.827	36.993	75.820	104,96
28	Ciwidey	33.868	33.321	67.189	101,64	35.711	34.226	69.937	104,34
29	Rancajali	23.446	22.494	45.940	104,23	21.846	20.371	42.217	107,24
30	Cangkuang	26.845	25.844	52.689	103,87	32.539	30.318	62.857	107,33
31	Kutawaringin*	-	-	-	-	48.907	45.468	94.375	107,56
TOTAL		1412.282	1387.399	2799.681	101,79	1622.297	1529.135	3151.432	106,09

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan : * Kecamatan baru

- Tidak ada data



Gambar 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung

Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Baleendah, sedangkan dari **Gambar 1.3** terlihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung adalah di Kecamatan Margahayu yaitu sebesar 12.072 Jiwa/Km², sedangkan untuk tingkat kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Rancabali yaitu sebesar 287 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah 1.789 jiwa/km². Perbedaan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kondisi perekonomian di setiap kecamatan.



1.7 Sarana dan Prasarana

1.7.1 Sarana Air Bersih dan Kesehatan



Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga dalam upaya pemenuhannya harus optimum. Ketersediaan air bersih sangat tergantung pada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan yaitu dari air permukaan dan air tanah.

Berdasarkan data untuk penduduk sebanyak 3.151.432 jiwa, tercatat 27.615 KK menggunakan ledeng untuk sarana air bersihnya, 148.165 rumah tangga menggunakan sumur. Hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki akses air bersih, umumnya berupa sumurgali.

Penggunaan sarana kakus di wilayah Kabupaten Bandung terdapat sebanyak 363.945 buah, dengan jumlah septic tank sebanyak 198.051 buah. **Tabel 1.7** memperlihatkan jumlah sarana air bersih dan kesehatan di Kabupaten Bandung untuk tiap-tiap Kecamatan



Tabel 1.6 Sarana Kesehatan dan Air Bersih

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			
		LEDENG	SUMUR	KAKUS	SEPTIC TANK
1	Cileunyi	-	3.890	18.023	11.679
2	Cimeuy an	1.725	1.486	12.929	8.048
3	Cilengkrang	-	-	4.849	7.164
4	Bojongs oang	420	1.097	16.479	9.707
5	Margahayu	-	809	14.668	13.415
6	Margaasih	-	6.093	13.294	7.122
7	Katapang	-	7.065	9.018	5.037
8	Dayeuhk oldt	-	2.923	11.791	2.217
9	Banjaran	482	8.858	9.734	4.559
10	Pameungpeuk	-	4.101	5.847	9.172
11	Pangalengan	6.003	8.994	18.585	19.831
12	Arjasari	205	3.746	7.542	5.949
13	Cimaung	-	6.492	5.488	1.806
14	Cicalengka	368	7.446	19.017	2.761
15	Nagreg	-	2.213	5.867	9.138
16	Cikancung	538	4.311	9.881	2.787
17	Rancaek	6.300	6.200	14.898	8.275
18	Ciparay	2.752	8.195	8.907	4.933
19	Pacet	365	3.074	5.767	1.685
20	Kertasari	-	1.596	5.535	6.146
21	Baleendah	1.802	4.960	40.007	4.878
22	Majalaya	1.897	13.410	18.787	5.253
23	Solok anjeruk	234	3.518	7.767	1.959
24	Paseh	2.033	6.412	11.153	6.598
25	Ibun	401	4.235	6.701	10.148
26	Soreang	453	14.299	25.972	8.679
27	Pasirjambu	-	3.461	11.203	6.971
28	Ciwidey	-	4.499	14.388	7.727
29	Rancabali	-	1.156	5.007	2.460
30	Cangkuang	1.637	3.626	4.841	1.947
31	Kutawaringin*	-	-	-	-
TOTAL		27615	148.165	363.945	198.051

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2007

* Kecamatan baru, belum ada data

Berdasarkan dari hasil laporan Kimtawil tahun 2007, sumber air terbesar yang digunakan di Kabupaten Bandung adalah air sumur, yaitu sebesar 340.211 m³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.7**.

**Tabel 1.7 Penggunaan Sumber Air di Kabupaten Bandung**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2003	2004	2005	2006	2007
1	Mata air	M ³	-	50,443	-	14,227	54,653
2	Sungai	M ³	-	6,735	-	24,000	6,693
3	Sumur	M ³	-	268,742	-	257,710	340,211
4	PDAM	M ³	15,607	15,732	16,717	18,608	19,434

Sumber : SLH Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan :

- Tidak ada data



1.7.2 Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung berupa Puskesmas, Rumah Sakit, dan beberapa jenis pelayanan kesehatan swasta.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung tahun 2007 sebanyak 7 unit yaitu RSUD Majalaya, RSUD Soreang, RS Pasir Junghun, RS Bina Sehat, RS Al Ihsan, RS Sulaeman dan RSU AMC (*Annisa Medical Center*). Sedangkan Kabupaten Bandung tahun 2007 terdapat 101 Puskesmas, untuk lebih jelasnya sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 1.8**.

Jumlah tenaga medis yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007 tercatat 110 orang dokter, 200 orang tenaga perawat dan 240 orang bidan, seperti terlihat pada **Tabel 1.9**.



Tabel 1.8 Sarana Kesehatan Kabupaten Bandung

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SARANA KESEHATAN			
		RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	PUS. PEMBANTU	BKIA
1	Cileunyi	1	4	-	-
2	Cimeluyun	0	3	-	-
3	Cilengkrang	0	1	-	-
4	Bojongsong	0	3	-	-
5	Margahayu	0	4	-	-
6	Margaasih	1	4	-	-
7	Katapang	0	3	-	-
8	Dayeuhkdok	0	4	-	-
9	Banjaran	0	4	-	-
10	Pameungpeuk	0	2	-	-
11	Pangalengan	1	4	-	-
12	Arjasari	0	3	-	-
13	Cimaung	0	2	-	-
14	Cicalengka	0	3	-	-
15	Nagreg	0	2	-	-
16	Cikancung	0	3	-	-
17	Rancaekek	1	6	-	-
18	Ciparay	1	5	-	-
19	Pacet	0	3	-	-
20	Kertasari	0	2	-	-
21	Baleendah	1	6	-	-
22	Majalaya	1	5	-	-
23	Solokajeruk	0	3	-	-
24	Paseh	0	4	-	-
25	Ibun	0	2	-	-
26	Soreang	0	3	-	-
27	Pasirjambu	0	3	-	-
28	Ciwidey	0	3	-	-
29	Rancabali	0	2	-	-
30	Cangkuang	0	2	-	-
31	Kutawaringin	0	3	-	-
	TOTAL	7	101	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2007



Tabel 1.9 Jumlah Dokter dan Tenaga Medis Kabupaten Bandung

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			
		DOKTER	PERAWAT	BIDAN	DUKUN
1	Cileunyi	6	5	10	-
2	Cimeunyan	4	5	4	-
3	Cilengkrang	2	2	5	-
4	Bojongsoang	3	3	6	-
5	Margahayu	4	7	12	-
6	Margaasih	4	7	9	-
7	Katapang	3	9	14	-
8	Dayeuhkolot	5	5	9	-
9	Banjaran	4	5	10	-
10	Pameungpeuk	2	3	3	-
11	Pangalengan	4	11	9	-
12	Arjasari	6	10	10	-
13	Cimaung	3	7	6	-
14	Cicalengka	8	13	13	-
15	Nagreg	1	4	2	-
16	Cikancung	2	6	4	-
17	Rancaekek	6	10	17	-
18	Ciparay	5	11	10	-
19	Pacet	2	6	8	-
20	Kertasari	3	5	4	-
21	Baleendah	5	12	11	-
22	Majalaya	4	11	10	-
23	Solokajeruk	4	7	9	-
24	Paseh	2	4	6	-
25	Ibun	2	4	2	-
26	Soreang	8	13	17	-
27	Pasirjambu	3	7	5	-
28	Ciwidey	2	3	7	-
29	Rancabali	1	3	2	-
30	Cangkuang	2	2	6	-
31	Kutawaringin	-	-	-	-
	TOTAL	110	200	240	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan : - Tidak ada data



1.7.3 Pendidikan

Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Bandung ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan dengan sarana yang dimiliki adalah TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah bangunan TK di Kabupaten Bandung tahun 2007 sebanyak 588 buah, SD sebanyak 1.562 buah, SLTP sebanyak 349 buah dan SMA sebanyak 219 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10 Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO.	SEKOLAH	JUMLAH		
		SEKOLAH	MURID	GURU
1	TK Sederajat	588	20.678	2.141
2	SD Sederajat	1.562	418.617	13.893
3	SMP Sederajat	349	147.277	5.079
4	SMA Sederajat	219	58.668	3.401
5	PERGURUAN TINGGI	-	-	-
	TOTAL	2130	624.562	22.373

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2007

1.8 Kebijakan kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan pusat koleksi dan distribusi orang dan barang untuk Propinsi Jawa Barat. Mengingat fungsi di atas diharapkan Kabupaten Bandung dapat memberikan dorongan perkembangan ke wilayah sekitarnya (*hinterland*).

1.8.1 Fungsi Dan Peran Kabupaten Bandung Dalam Konteks Makro

Menurut RTRW Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pola pengembangan pemanfaatan ruang kawasan budidaya, Kabupaten Bandung diarahkan untuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, pendidikan dan pengetahuan. Selama ini Kabupaten Bandung merupakan salah satu kawasan yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat dan Metropolitan Bandung dalam hal kegiatan perekonomian.



Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Bandung memiliki kedudukan yang cukup strategis ditinjau dari skala regional. Kabupaten Bandung memiliki sejumlah potensi yang dapat menunjang percepatan pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Bandung, diantaranya :

- Kabupaten Bandung berada pada jalur jalan lintas regional Jawa, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan propinsi-propinsi lain di Pulau Sumatera.
- Pengembangan jaringan kereta api untuk memperluas daya hubung antar wilayah di Pulau Jawa maupun Sumatera-Jawa dan meningkatkan transportasi antar moda baik penumpang atau barang.

Berdasarkan kebijakan makro, Kabupaten Bandung berfungsi sebagai daerah belakang Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung. Berdasarkan kebijakan makro di atas, Kabupaten Bandung diarahkan pengembangannya sebagai berikut :

- Pengendalian pemanfaatan ruang terbangun di bagian utara dan selatan dengan adanya keterbatasan pengembangan ruang karena mengembangkan fungsi sebagai kawasan konservasi.
- Pembatasan pengembangan di Margaasih-Margahayu-Dayeuh Kolot-Bojongsong-Baleendah yang memiliki fungsi penyangga untuk membatasi pengembangan *urban sprawl* Kota Bandung.
- Pengembangan Kecamatan Soreang, Banjaran, Majalaya dan Cicalengka sebagai kota-kota satelit di sekitar Kota Bandung.
- Pengembangan fungsi-fungsi khusus sebagai kawasan industri, dan pariwisata.

1.8.2 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Bandung

A. Fungsi Wilayah

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Bandung, maka sektor-sektor perekonomian yang akan dikembangkan terutama pada sektor sekunder yang memiliki keterkaitan dengan sektor primer pada skala regional Metropolitan Bandung dan Provinsi Jawa Barat, yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata serta sektor jasa pada skala lokal Kabupaten Bandung. Fungsi kawasan yang telah berkembang saat ini dan berpotensi untuk dikembangkan adalah :



1. Fungsi pemerintahan dan perkantoran
2. Fungsi jasa perdagangan, keuangan dan jasa publik
3. Fungsi industri
4. Fungsi wisata

B. Struktur Ruang

Konsep struktur ruang Kabupaten Bandung adalah mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah dengan mempertahankan daya dukung serta daya tampung lingkungan, yaitu diarahkan pada :

- Pengaturan sistem pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah pengembangan barat-timur, dan pengembangan secara terbatas pusat-pusat pertumbuhan di wilayah utara dan selatan dengan maksud meningkatkan peran pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan dengan tetap membatasi perkembangan fisik terbangun ke kawasan lindung.
- Mendayagunakan fasilitas pelayanan yang penyebarannya dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan dan tingkat pelayanan, dan difokuskan pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya, yaitu pada wilayah bagian barat dan timur.
- Menciptakan daya tarik bagi seluruh bagian wilayah pembangunan (WP) dengan penyebaran pusat-pusat pelayanan ke seluruh kawasan Kabupaten Bandung.
- Menciptakan dinamika perkembangan kota yang sinergis.

1.8.3 Kebijakan Sektoral Kabupaten Bandung

A. Sektor Industri

- Pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas, serta daya saing melalui keterkaitan sektor industri yang berorientasi ekspor.
- Penyempurnaan infrastruktur dan menciptakan kemudahan-kemudahan dalam upaya memperbesar peluang investor.
- Mendorong industri barang modal utama yang mendukung sektor pertanian agar terus berkembang, demikian pula agro-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian.
- Meningkatkan desentralisasi industri ke daerah-daerah, sesuai dengan potensinya.



B. Sektor Pertanian dan Kehutanan

Pertanian

- Pembangunan pertanian dan kehutanan harus menempatkan secara efisien sumberdaya yang ada serta terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan di sektor lain terutama pembangunan industri, pembangunan daerah pedesaan, transmigrasi serta upaya memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- Dalam kebijaksanaan umum perlu diperhatikan perwilayahan komoditi yang berpegang pada asas keterpaduan yang meliputi keterpaduan wilayah, keterpaduan komoditi dan keterpaduan usaha tani.
- Melanjutkan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, serta melaksanakannya secara terpadu disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat.
- Pembangunan sub sector pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi usaha tani, memperbaiki gizi masyarakat, mendorong terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan ekspor.
- Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi masyarakat, peningkatan produksi peternakan harus tetap dilanjutkan, pembangunan sub sector perikanan terus dilanjutkan dan tidak hanya sekedar peningkatan produksi tetapi mencakup kepentingan anggota masyarakat.
- Upaya produksi perkebunan guna menggerakkan dan memacu peningkatan ekspor dan bidang lain seperti industri melalui perluasan areal, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.



Kehutanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Pemantapan kawasan hutan di Kabupaten Bandung sesuai dengan peruntukannya dan fungsinya sebagai hutan lindung
- Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh bagian wilayah kabupaten.
- Penataan jalur hijau di sepanjang jalan

Sumberdaya Air dan Drainase

- Menjaga stabilitas air sebagai bahan baku air bersih dan irigasi
- Pengelolaan drainase kabupaten untuk mencegah terjadinya banjir dan genangan.

C. Sektor Transportasi

- Membangun jalan baru, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat, untuk memperlancar arus orang, barang dan jasa yang dapat menunjang kegiatan di berbagai bidang.
- Meningkatkan daya dukung jalan untuk menunjang mobilitas barang, serta membangun jalan baru dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung.
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi pergerakan ke arah pusat Kota Bandung.

D. Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

- Mengembangkan objek wisata terutama mengembangkan wisata terkait dengan potensi alam dan budaya Kabupaten Bandung.
- Mengembangkan sektor kepariwisataan yang potensial, misalnya wisata perairan di beberapa waduk.

E. Sektor Perumahan dan Permukiman

- Pembangunan dan perbaikan perumahan diupayakan lebih ditingkatkan dan diperluas sehingga makin merata dengan senantiasa memperhatikan rencana pengembangan dan keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya.
- Mulai diarahkan pengembangan perumahan vertikal pada kawasan-kawasan dengan penduduk padat, untuk tetap menjaga kesesuaiannya



dengan ruang terbuka hijau terutama pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung.

Sebagaimana kebijakan di setiap sektor, baik industri, pertanian, kehutanan, transportasi dan lain-lain harus menunjang visi Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang reph rapih kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius kultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa.



ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Makin meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bandung menyebabkan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Guna memenuhi kebutuhan, maka Kabupaten Bandung dituntut untuk melakukan eksplorasi serta eksploitasi potensi sumberdaya alam yang tersedia. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.

Sebagai bagian dari Cekungan Bandung dengan wilayah paling luas Kabupaten Bandung juga dituntut untuk dapat bekerja sama dengan Kota/Kabupaten tetangga untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan regional di Cekungan Bandung.

Permasalahan yang perlu ditangani segera didasarkan pada semua kegiatan atau sebagian kriteria dari berikut ini (KLH, 2008);

1. Bersifat **LINTAS MEDIA LINGKUNGAN**
2. Mempunyai **DAMPAK** terhadap **LINGKUNGAN** (kerusakan, pencemaran dan perubahan status)
3. Mempunyai **DAMPAK** terhadap **KESEHATAN** dan **KESELAMATAN MANUSIA**
4. Mempunyai **DAMPAK** terhadap **PEREKONOMIAN**
5. Ada **INDIKASI** menimbulkan **MASALAH BESAR** di masa depan (tahun depan)
6. Mempunyai **SKALA** dan **INTENSITAS TINGGI** serta **LUAS**
7. Merupakan **BERITA** yang mempunyai tingkatan **DURASI TINGGI** dalam pemberitaan media
8. Menimbulkan **REAKSI MASYARAKAT** (dalam negeri atau luar negeri)

9. Dampaknya **BERPENGARUH** pada **DAERAH LAIN /NEGARA LAIN/DUNIA INTERNASIONAL**
10. Tersedianya **DATA** secara kuantita tentang kejadian tersebut



Pikiran Rakyat, Desember 2008

Instalasi Pengolahan Air Limbah Hanya Formalitas 90% Limbah Dibuang Langsung ke Sungai



AIR limbah dari pabrik cdup mengalir deras ke Sungai Citarum di Kp./Desa Cilampeni, Kec. Katapang, Kab. Bandung, beberapa waktu lalu. Kondisi ini sudah berlangsung hampir tiga puluh tahun dan kini semakin parah. Menurut warga setempat, kulit akan langsung gatal-gatal jika terkena air limbah itu* HARRY SURJANA"PR"

Gambar 2.1

Salah Satu Berita di Media Masa Mengenai Isu Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bandung

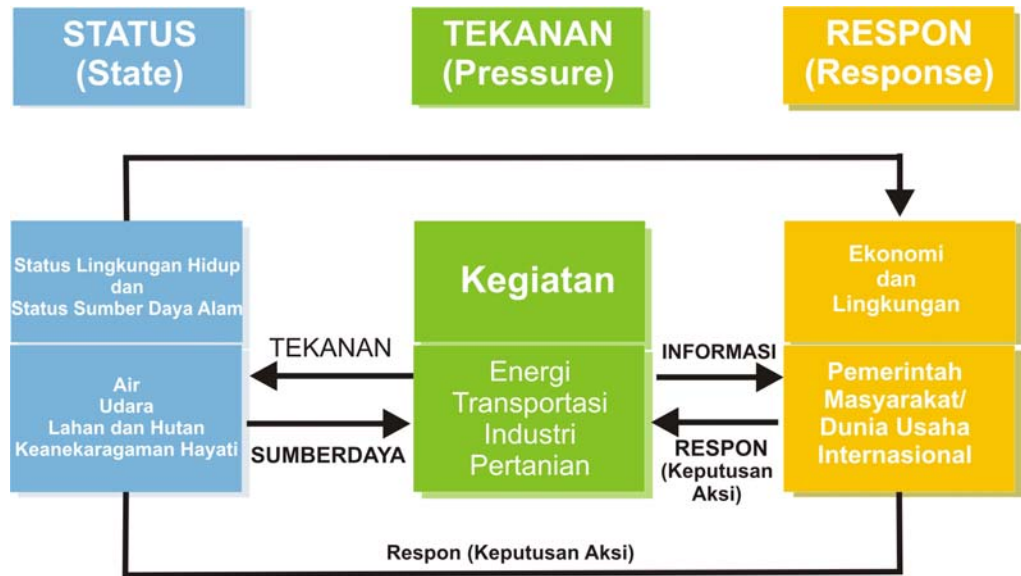
Kerangka pendekatan isu lingkungan hidup dianalisis dengan menggunakan metoda *State-Pressure-Response* (S-P-R). Kerangka S-P-R didasarkan pada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (*pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumberdaya alam dan lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas (*state*).Selanjutnya masyarakat/*stakeholder*



memberikan reaksi terhadap perubahan ini dengan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan (*response*).

Dengan demikian ada tiga indikator utama dalam kerangka SPR, yang akan dianalisis, yaitu ;

- 1 **Indikator kondisi lingkungan (*state*)**. Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan yang dibuat untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan pengembangannya dimasa depan.
- 2 **Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*)**. Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan termasuk kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.
- 3 **Indikator respon (*response*)**. Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.



Gambar 2. 2
Diagram Model *State – Pressure – Respon* (S-P-R) (KLH, 2008)

Untuk memantau perkembangan interaksi kegiatan pembangunan dengan lingkungan maka dilakukan usaha pengumpulan data dan informasi lingkungan hidup. Melalui data dari fakta kondisi lingkungan hidup daerah, akan nampak gejala-gejala yang dapat dijadikan isu lingkungan hidup yang harus diperhatikan dalam memelihara kualitas lingkungan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kriteria “isu lingkungan hidup utama” sebagai hasil interaksi kegiatan penduduk dan kegiatan pembangunan multisektoral dengan lingkungan, maka isu lingkungan hidup utama di Kabupaten Bandung yaitu :

1. Isu Air

Air selain mempunyai dampak terhadap lingkungan juga mempunyai dampak terhadap kondisi tanah, hal ini akan mengakibatkan kondisi kesehatan dan keselamatan manusia terganggu serta adanya indikasi menimbulkan masalah di masa depan yang mempunyai skala dan intensitas yang tinggi serta luas yang akan menimbulkan reaksi masyarakat dan dampaknya berpengaruh pada daerah lain. Berikut ini beberapa isu air di Kabupaten Bandung yaitu:



- Rendahnya kualitas air sungai dan tingginya fluktuasi debit air sungai pada saat musim hujan dan musim kemarau
- Tingginya angka kejadian penyakit bawaan air (Diare)

2. Isu Lahan dan Hutan

Kondisi lahan dan hutan selain mempunyai dampak terhadap lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas udara, hal ini akan mengakibatkan kondisi kesehatan dan keselamatan manusia terganggu serta adanya indikasi menimbulkan masalah di masa depan yang mempunyai skala dan intensitas yang tinggi serta luas, yang akan menimbulkan reaksi masyarakat dan dampaknya berpengaruh pada daerah lain. Berikut ini adalah isu lahan dan hutan di Kabupaten Bandung yaitu:

- Kerusakan lahan (terbentuknya lahan kritis) akibat alih fungsi lahan di DAS Citarum
- Kerusakan lahan (terbentuknya lahan kritis) akibat pertambangan

3. Isu Limbah Padat dan B3

Pencemaran limbah padat dan B3 selain mempunyai dampak terhadap lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas udara serta mempunyai dampak terhadap kualitas air dan kondisi tanah, hal ini akan mengakibatkan kondisi kesehatan dan keselamatan manusia terganggu serta adanya indikasi menimbulkan masalah di masa depan yang mempunyai skala dan intensitas yang tinggi serta luas, yang akan menimbulkan reaksi masyarakat dan dampaknya berpengaruh pada daerah lain.



Berikut ini adalah isu limbah padat dan B3 di Kabupaten Bandung yaitu:

- Jumlah TPA yang beroperasi kurang memadai
- Rendahnya persentase pelayanan pengelolaan persampahan oleh pemerintah
- Tingginya jumlah perusahaan yang belum mengelola Limbah B3nya dengan baik serta tingginya frekwensi kasus kecelakaan akibat pembuangan ilegal limbah B3.

2.1 Isu Air

Isu	Status	Pressure	Response
<p>Rendahnya kualitas dan kuantitas Air Sungai</p>	<p>Terdapat 4 ruas titik pengambilan sampel air sungai di sepanjang Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum.</p> <p>Hasil pengukuran di 100 anak sungai dengan 3 kali pengukuran menunjukkan untuk BOD, COD dan DO hampir semuanya melebihi ambang baku mutu dan berstatus cemar berat yang dianalisis dengan metode <i>Storet</i>.</p> <p>Secara kasat mata kualitas fisik sungai dan anak sungai banyak yang buruk dengan jumlah sampah yang tinggi di sepanjang aliran/bantaran sungai.</p> <p>Di Kabupaten Bandung, pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air, sedangkan di musim penghujan terjadi banjir</p>	<p>Meningkatnya jumlah industri dan jasa menambah jumlah limbah cair yang dibuang ke badan air penerima.</p> <p>Kondisi ekonomi industri, sebagian industri tidak mampu mengelola limbahnya.</p> <p>Sebagian besar industri telah memiliki IPAL tetapi belum mengoptimalkan fungsinya.</p> <p>Perilaku masyarakat yang masih membuang limbah domestik dan sampah ke sungai telah menurunkan kualitas air sungai.</p> <p>Banjir Sungai Citarum disebabkan berbagai faktor yang sangat kompleks, antara lain iklim tidak normal, seperti curah hujan tinggi dan perilaku manusia yang kurang bijaksana dalam memperlakukan lingkungannya. Salah satu faktor akibat tindakan manusia antara lain telah terjadinya perambahan hutan di Gunung Wayang-Windu DAS Citarum Hulu.</p> <p>Dengan banyak dibangunnya rumah masyarakat dan industri serta kurangnya hutan di sekitar sungai, berdampak buruk kepada kondisi pendangkalan dan menurunnya debit air sungai</p>	<p>Kebijakan Pembangunan Daerah (sebagai tindakan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Informasi Lingkungan ▪ Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Air. ▪ Menggalakkan pembangunan sumur resapan. ▪ Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan kepada kalangan dunia usaha/industri, aparat kecamatan, tokoh masyarakat ▪ Pembuatan demplot IPAL ▪ Pelatihan pengoperasian IPAL kepada operator IPAL industri ▪ Upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ▪ Penegakan Hukum ▪ Penyusunan Studi Kelayakan IPAL Industri Terpadu. ▪ Membatasi pengambilan air tanah melalui perizinan SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) ▪ Pengaturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan). ▪ Melakukan pemantauan kualitas air pada beberapa sungai dan kualitas limbah cair dari buangan industri. ▪ Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air dan pembuangan limbah cair di Jawa Barat

Isu	Status	Pressure	Response
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetatan pada kegiatan pemantauan terhadap penerapan AMDAL (termasuk IPAL) ▪ Melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk memperketat pemberian izin membangun di kawasan lindung seperti di areal sempadan, daerah hijau, dll. ▪ Melakukan penyuluhan pada petani dan peternak ikan agar memberi pupuk sesuai dengan ketentuan / dosis. ▪ Meningkatkan reboisasi pada lahan yang tidak terbangun (sesuaikan dengan pengaturan KDB). ▪ Memberi penyuluhan (termasuk pendidikan sejak tingkat SD) pada masyarakat untuk menampung dan membuang sampah dengan semestinya ▪ Meningkatkan upaya penanganan sampah domestik dengan baik, seperti pembangunan TPS dan TPA termasuk peningkatan SDM pengelola sampah ▪ Sanksi administratif terhadap pelanggar ketentuan. <p>Menerapkan peraturan-peraturan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewajibkan pemrakarsa kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan untuk menyusun studi AMDAL atau UKL dan UPL,

Isu	Status	Pressure	Response
			termasuk pembuatan IPAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 tahun 1997 tentang Pembangunan di pinggir sungai dan sumber air. ▪ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3/2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air ▪ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan . ▪ Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
Terjadinya penyakit bawaan air	Angka kejadian Diare tahun 2007 di Kabupaten Bandung mencapai lebih dari 40.000 orang.	Masih banyaknya aktivitas industri, perumahan maupun peternakan yang membuang limbahnya langsung ke sungai Citarum maupun anak-anak sungainya tanpa diolah terlebih dahulu, termasuk di dalamnya limbah padat (sampah), bahkan di kala musim kemarau Sungai Citarum berwarna hitam disertai bau menyengat yang sangat mengganggu estetika Kebiasaan hidup masyarakat yang belum bersih dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga sumberdaya air. ▪ Penambahan fasilitas penanganan kebersihan seperti TPS, <i>septic tank</i> bersama, dll.

2.2. Isu Lahan dan Hutan

Isu	Status	Pressure	Response
Luasnya Lahan Kritis di Kabupaten Bandung akibat alih fungsi lahan	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bandung tahun 2007 mencapai 10.158 Hektar.	Penggunaan lahan dan aktifitas penduduk yang berlebihan telah mengakibatkan munculnya lahan kritis yang mengakibatkan terganggunya ekosistem lingkungan.	Pemberian Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang menetapkan persentase wilayah yang boleh dibangun sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk masing-masing peruntukkan lahan.
Luasnya Lahan Kritis di Kabupaten Bandung akibat kegiatan pertambangan		Alih fungsi lahan pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan fungsi hutan. Terjadinya perambahan hutan.	Mencanangkan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Gerakan Rehabilitasi Hutan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

2.3 Isu Limbah Padat dan B3

Isu	Status	Pressure	Response
Jumlah TPA yang beroperasi kurang memadai	Timbulan sampah di TPS berpotensi mengalami penumpukan	Kegiatan pengumpulan sampah hanya mengandalkan TPA Babakan untuk luas wilayah Kabupaten Bandung sebesar 1.761,66 km ² . Saat ini di Kabupaten Bandung TPA yang dioperasikan hanya TPA Babakan. Sementara itu terdapat eks TPA yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu TPA Jelekong (ditutup tahun 2005).	Program terpadu dalam upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Bandung guna mengelola persampahan dan mengurangi timbulan sampah. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan PP No 41 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan.

<p>Rendahnya persentase pelayanan pengelolaan persampahan oleh pemerintah</p>	<p>Pengangkutan sampah perkotaan dilakukan oleh Dinas Pertasih.</p> <p>Sampah yang tidak terkelola/ terlayani seringkali dibuang ke badan sungai. Kualitas air sungai menjadi buruk, saluran drainase menjadi tersumbat.</p>	<p>Luasnya daerah administrasi Kabupaten Bandung menyebabkan efektifitas pengangkutan sangat rendah.</p> <p>Persentase pelayanan baru 11% dari total sampah di Kabupaten Bandung, hal ini berkaitan juga dengan jumlah TPA yang hanya ada di 1 lokasi.</p> <p>Jumlah penduduk meningkat, volume timbulan sampah semakin tinggi, namun kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan masih rendah</p>	<p>Pembinaan lokasi komposting Pengelolaan Sampah secara Mandiri.</p> <p>Rencana pembangunan PLTSA 1 MW di TPA Babakan, kerjasama dengan PT. PLN (persero).</p>
<p>Tingginya jumlah perusahaan yang belum mengelola limbah B3nya dengan baik serta tingginya kasus kecelakaan akibat pembuangan ilegal limbah B3</p>	<p>Terjadi penurunan kualitas udara, air, dan tanah akibat buangan B3.</p>	<p>Pengelolaan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan tanah.</p> <p>Mahalnya biaya penanganan limbah B3 menjadi kendala utama industri-industri untuk mengelola limbah B3 secara sendiri atau mengelola limbah B3 berizin.</p> <p>Perusahaan mengelola limbah B3 dengan dibakar di incinerator dan dibawa oleh pihak ketiga.</p> <p>Ada 132 industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Tingginya timbulan lumpur IPAL dan abu batubara.</p> <p>Perusahaan belum mengelola dengan baik hanya menyimpan dalam drum, dalam karung dan disimpan dibelakang pabrik.</p> <p>Hanya beberapa persen industri yang sudah mengelola limbah B3 nya.</p>	<p>PP No. 18 Tahun 1999 Jo No. 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>Melakukan pemantauan ke kegiatan industri penghasil B3.</p> <p>Pendirian tempat pengelola limbah B3 terpadu di Kecamatan Majalaya.</p> <p>Sosialisasi pengelolaan limbah B3 kepada industri.</p> <p>Mengelola limbah B3 secara sendiri atau mengirimkan limbah B3 ke pengelola limbah B3 berizin.</p>



Air

3.1 Pendahuluan

Air merupakan salah satu materi yang dibutuhkan dan merupakan unsur dasar bagi kehidupan di bumi sehingga tanpa air berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Namun demikian masih banyak individu ataupun kelompok di masyarakat sebagai pengguna air yang tidak menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya air dengan benar sehingga tidak mengherankan apabila kualitas dan kuantitas air semakin menurun dari tahun ke tahun. Banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau menjadi fenomena bencana yang sering terjadi sebagai akibat dari rusaknya lingkungan. Bencana tersebut merupakan indikasi nyata dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menyimpang dari ketentuan alam yang seharusnya.

3.2 Tata Air di Kabupaten Bandung

3.2.1 Mata Air

Mata air yang potensial muncul terdapat di kawasan konservasi air, mempunyai daerah tangkapan air yang relatif kecil sehingga debit mata air kecil tidak melebihi 500 lt/dt dan sangat fluktuatif tergantung perubahan musim.

Penggunaan mata air saat ini meningkat seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dengan segala aktifitasnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mata air juga dipakai untuk berbagai keperluan yang lain seperti untuk pertanian (irigasi), perkebunan, industri, dan lain-lain.



Mata air meskipun secara kuantitas adalah relatif kecil, akan tetapi secara kualitas pada umumnya amat baik sehingga dapat langsung digunakan sebagai sumber air bersih.

Permasalahan dalam hal pemanfaatan mata air di wilayah Kabupaten Bandung pada saat ini adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kebutuhan air dipicu dengan bertambahnya jumlah penduduk beserta peningkatan fasilitas penunjang sosial dan infrastruktur
- Pemanfaatan mata air yang belum optimal dan efisien
- Meningkatnya degradasi lingkungan sumberdaya air
- Meningkatnya konflik antar pengguna air
- Fungsi dan badan pengelola air belum optimal

3.2.2 Air Permukaan

Air yang terdapat di cekungan Bandung berupa air permukaan antara lain berupa waduk atau aliran air pada badan saluran dan sungai.

Air permukaan yang berupa aliran sungai utama dan berada di Kabupaten Bandung adalah sungai Citarum yang merupakan sungai utama yang sangat penting perannya bagi kehidupan dan perekonomian di Kabupaten Bandung. Air permukaan saat ini dipergunakan untuk berbagai keperluan yaitu pertanian, industri dan rumah tangga bahkan sebagai sumber air baku PDAM.

Pertambahan penduduk yang terus meningkat dengan segala aktifitasnya tanpa didasari kepedulian terhadap lingkungannya akan mengancam kelestarian kualitas dan kuantitas air Sungai Citarum dan anak-anak sungainya misalnya membuang sampah atau limbah langsung ke sungai.

3.2.3 Kualitas Air Sungai

Untuk mengetahui kondisi kualitas Sungai Citarum pengambilan sampel/ contoh air sungai dilakukan. Pengambilan sampel air sungai ini dilakukan pada anak-anak sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung yang terbagi menjadi 4 ruas besar, yaitu ruas Gunung Wayang – Jembatan Majalaya, Jemb. Majalaya – Jemb. Dayeuhkolot, Jemb. Dayeuhkolot – Waduk Saguling, dan Waduk Saguling – Waduk Grata.



Jumlah anak sungai yang dipantau pada tahun 2007 adalah 63 buah. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi sungai adalah sungai-sungai yang digunakan sebagai badan air penerima air limbah (industri, pertanian, perikanan dan domestik dengan kepadatan yang tinggi), sungai pada batas administrasi dan sungai yang diduga tercemar (dari pengaduan masyarakat). Rincian sungai yang dipantau dan lokasi pemantauan disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Status Mutu air

NO	LOKASI SAMPLING	STATUS MUTU AIR	
		Skor Storet	Status
RUAS GUNUNG WAYANG - JEMBATAN MAJALAYA			
1	S. Cibunherang	-54	Cemar Berat
2	S. Cibirung	-55	Cemar Berat
3	S. Cjaha	-42	Cemar Berat
4	S. Cilebak	-66	Cemar Berat
5	S. Cikawao	-48	Cemar Berat
6	S. Cisangkan Hilir	-41	Cemar Berat
7	S. Ciburial	-60	Cemar Berat
8	S. Cikaro Hulu	-48	Cemar Berat
9	S. Cikaro Hilir	-55	Cemar Berat
RUAS JEMBATAN MAJALAYA - JEMBATAN DAYEUH KOLOT			
I. SUNGAI CIRASEA			
10	S. Cirasea Hulu	-50	Cemar Berat
11	S. Cigarukgak	-61	Cemar Berat
12	S. Cikacembang Hulu	-70	Cemar Berat
13	S. Cikacembang Hilir	-101	Cemar Berat
14	S. Cipadaulun Hulu	-59	Cemar Berat
15	S. Cipadaulun Hilir	-89	Cemar Berat
16	S. Cipadaulun setelah Cikacembang	-99	Cemar Berat
17	S. Ciwalengke	-53	Cemar Berat
18	S. Magung	-69	Cemar Berat
19	S. Cirasea Hilir	-67	Cemar Berat
II. SUNGAI CITARIK			
20	S. Citarik hulu	-64	Cemar Berat
21	S. Cibodas	-70	Cemar Berat
22	S. Cikalege	-59	Cemar Berat
23	S. Citarik Setelah Cikalege	-72	Cemar Berat
24	S. Cimande Hulu	-52	Cemar Berat
25	S. Cikijing hulu	-74	Cemar Berat
26	S. Cikijing hilir	-107	Cemar Berat
27	Saluran Kahatex	-129	Cemar Berat
28	S. Cikijing Setelah Kahatex	-112	Cemar Berat
29	Saluran Fivestar	-80	Cemar Berat
30	S. Cikijing Setelah Fivestar	-115	Cemar Berat
31	Saluran Depan Fivestar	-110	Cemar Berat
32	S. Cimande tengah	-109	Cemar Berat
33	S. Cikijing Sblm S.Cimande	-70	Cemar Berat



NO	LOKASI SAMPLING	STATUS MUTU AIR	
		Skor Stor et	Status
34	S. Cimande Stlh S. Cikijing	-97	Cemar Berat
35	S. Citarik Tengah Sebelum S. Cimande	-57	Cemar Berat
36	S. Cjagra	-60	Cemar Berat
37	S. Citarik Stlh S. Cimande	-56	Cemar Berat
38	S. Citarik hilir	-56	Cemar Berat
III. SUNGAI CIKOPO			
39	S. Ckopo Hulu	-63	Cemar Berat
40	S. Ckopo Hilir	-61	Cemar Berat
IV. SUNGAI CIKERUH			
41	S. Ckeruh Hulu	-40	Cemar Berat
42	S. Cbeusi	-56	Cemar Berat
43	S. Cipamulihan	-69	Cemar Berat
44	S. Cbiru	-46	Cemar Berat
45	S. Cisaranten Hulu	-39	Cemar Berat
46	S. Cisaranten-Sukarno Hatta	-83	Cemar Berat
47	S. Cisaranten-Neglasari	-78	Cemar Berat
48	S. Ckeruh Hilir	-86	Cemar Berat
V. SUNGAI CIPAMOKOLAN			
49	S. Cipamokolan Tengah	-62	Cemar Berat
50	S. Cipamokolan Hilir	-68	Cemar Berat
VI. SUNGAI CIJAWURA			
51	S. Cjawura Hilir	-79	Cemar Berat
VII. SUNGAI CIGANITRI			
52	S. Ciganitri-Cipagalo	-87	Cemar Berat
VIII. SUNGAI CIKAPUNDUNG			
53	S. Cibojong-Bengkok	-69	Cemar Berat
54	S. Cikapundung-Sukapura	-81	Cemar Berat
55	S. Citeureup/Cijeunjing	-88	Cemar Berat
56	S. Cikapundung-Dayeuh Kolot	-93	Cemar Berat



NO	LOKASI SAMPLING	STATUS MUTU AIR	
		Skor Storet	Status
RUAS JEMBATAN DAYEUH KOLOT - WADUK SAGULING			
IX. SUNGAI CISANGKUY			
57	S. Cisangkuy Stlh Cileunca	-64	Cemar Berat
58	S. Citiis	-73	Cemar Berat
59	S. Cisarua	-70	Cemar Berat
60	S. Cisangkuy-Sukamenak	-60	Cemar Berat
61	S. Cinyiruan	-61	Cemar Berat
62	S. Ciruntah	-66	Cemar Berat
63	S. Cilaki	-49	Cemar Berat
64	S. Cikalong	-56	Cemar Berat
65	S. Cigeureuh	-55	Cemar Berat
66	S. Cisela	-82	Cemar Berat
67	S. Citaliktik	-58	Cemar Berat
68	S. Cibatur	-62	Cemar Berat
69	S. Citalugug Hulu Sebelum ADETEX	-56	Cemar Berat
70	S. Citalugug Hilir Setelah ADETEX	-80	Cemar Berat
71	S. Cisangkuy Stlh Citalugug	-75	Cemar Berat
72	S. Cipalasari	-65	Cemar Berat
73	S. Cisangkuy Stlh Cipalasari	-78	Cemar Berat
74	S. Cisangkuy Hilir Sebelum S. Citarum	-70	Cemar Berat
75	S. Cipalasari-D. Kolot Hulu	-75	Cemar Berat
76	S. Cipalasari-D. Kolot Hilir	-64	Cemar Berat
X. SUNGAI CISUMINTA			
77	S. Cisuminta Hulu	-84	Cemar Berat
78	S. Cisuminta Hilir	-67	Cemar Berat
XI. SUNGAI CITEPUS			
79	S. Citepus Hilir	-102	Cemar Berat
XII. SUNGAI CIHERANG			
80	S. CHERANG Hulu	-58	Cemar Berat
81	S. CHERANG Hilir	-64	Cemar Berat
XIII. SUNGAI CIRANJENG			
82	S. Ciranjeng Hulu	-50	Cemar Berat
83	S. Ciranjeng Hilir	-66	Cemar Berat
XIV. SUNGAI CICANGKUDU			
84	S. Cicangkudu Hulu	-75	Cemar Berat
85	S. Cicangkudu Hilir	-62	Cemar Berat
XV. SUNGAI CIKAMBUY			
86	S. Cikambuy Hulu	-72	Cemar Berat
87	S. Cikambuy Hilir	-70	Cemar Berat
XVI. SUNGAI CIWIDEY			
88	S. Ciwidey Hulu	-60	Cemar Berat
89	S. Ciranjang Hilir	-55	Cemar Berat
90	S. Cisirna	-65	Cemar Berat
91	S. Cicangkorah	-39	Cemar Berat
92	S. Cimareme	-62	Cemar Berat
93	S. Ciwidey Hilir	-57	Cemar Berat
XVII. SUNGAI CIGONDEWAH - CIBALIGO			
94	S. Cigondewah Hilir	-103	Cemar Berat



95	S. Dunguslembu-Margaasih	-107	Cemar Berat
96	S. Cibaligo Hilir	-99	Cemar Berat
97	S. Cihujung Hilir	-67	Cemar Berat
98	S. Cimahi Hilir-PT. Gladiatex	-108	Cemar Berat
RUAS WADUK SAGULING - WADUK CIRATA			
XVIII. SUNGAI CIMETA			
99	S. Cipicung	-42	Cemar Berat
100	Outlet Waduk Saguling	-52	Cemar Berat

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2007

3.2.4 Status Mutu Air

Tabel 3.1 menunjukkan Status Mutu air anak sungai yang dipantau. Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan seluruh anak-anak sungai yang dipantau pada tahun 2007 dikategorikan sebagai sungai yang tercemar berat yang dianalisis dengan menggunakan *Metode Storet*.

Berdasarkan sampling dan analisis terhadap kualitas air tersebut, pencemaran sungai ini tidak terjadi dibagian hilir saja, akan tetapi di bagian hulu Sungai Citarum kondisinya sudah tercemar yang diakibatkan oleh kegiatan domestik dan peternakan, hal ini terindikasi dengan adanya beberapa parameter kimia (BOD, COD dan DO) yang melebihi ambang baku mutu (PP RI No. 82 Tahun 2001) di dalam badan air. Selain dari kegiatan domestik dan peternakan, penurunan kualitas air sungai ini juga terjadi akibat dari kegiatan industri. Data hasil analisa pengukuran kualitas air sungai selengkapnya dapat dilihat pada Kumpulan Data Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008.

Penurunan kualitas air Sungai Citarum ini tidak hanya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung, melainkan juga dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di sekitar wilayah Kabupaten Bandung (Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung)



rata-rata normal yaitu 8,84 tetapi di beberapa bulan mempunyai pH diatas 9 atau basa. TDS yang terukur dari bulan Januari sampai Juli dengan rata-rata 613,4 mg/L. Paramter COD dan BOD melebihi baku mutu berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nb. 39 tahun 2000, sedangkan BOD di bawah baku mutu, hal ini disebabkan banyaknya perumahan yang ada di sekitar lokasi sungai. Begitu juga dengan rata-rata untuk parameter phosphat, sulfida, besi, cadmium dan nikel melebihi baku mutu. Sedangkan untuk parameter timbal dan krom tidak terdeteksi kehadirannya.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *metode Storet* pada Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat beberapa titik pemantauan di beberapa sungai dan anak sungai yang nilainya jauh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Cikijing sebelum lokasi pabrik PT. Kahatex (skor: -129), Sungai Cikijing setelah Fivestar (skor: -115), Sungai Cikijing setelah Kahatex (skor: -112), Sungai Cimande Tengah (skor: -109) dan Sungai Cimahi Hilir dekat PT. Gladiatex (skor: -108).

1. Sungai Cikijing sebelum Kahatex (skor: -129)

Pengambilan sampel dilakukan di ruas Sungai Citarik ini bila dibandingkan dengan sungai yang lain mempunyai skor yang paling tinggi dan beberapa parameter yang di uji tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan, parameter tersebut antara lain : TDS, BOD, COD dan Total P.

2. Sungai Cikijing setelah Fivestar (skor: -115)

Sungai ini masih terdapat di titik pengambilan sampel ruas Sungai Citarik. Beberapa parameter yang di uji tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan, parameter tersebut antara lain : TDS, BOD, COD dan Total P. Pencemaran di Sungai ini kemungkinan terjadi dikarenakan adanya masukan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yang ada di dekat sungai dan banyaknya sumber pencemar yang ada di sekitar sungai seperti limbah domestik dan lain-lain.

3. Sungai Cikijing setelah Kahatex (skor: -112)

Beberapa parameter yang di uji tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan antara lain : TDS, BOD, COD dan Total P. Kemungkinan pencemaran yang terjadi pada Sungai ini dikarenakan adanya masukan dari berbagai aktivitas industri dan rumah tangga yang ada di sekitar Sungai.



4. Sungai Cimande Tengah (skor: -109)

Pengambilan sampel dilakukan pada ruas Sungai Citarik. Beberapa parameter yang di uji tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan antara lain : BOD, COD dan Total P. Kemungkinan pencemaran ini juga terjadi dikarenakan adanya masukan limbah industri, limbah hasil aktivitas rumah tangga dan dari beberapa sumber lain yang ada di sekitar Sungai.

5. Sungai Cimahi Hilir dekat PT. Gladiatex (skor: -108)

Pengambilan sampel dilakukan pada ruas Sungai Cigondewah - Cibaligo. Beberapa parameter yang di uji tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan antara lain : BOD dan COD. Kemungkinan pencemaran ini terjadi akibat banyaknya masukan limbah industri yang ada, dikarenakan ruas ini dekat dengan kawasan industri. Selain itu juga diperkirakan adanya masukan limbah hasil aktivitas rumah tangga dan dari beberapa sumber lain yang ada di sekitar Sungai.

3.2.5 Danau

Pada saat ini terdapat 2 (dua) danau besar (situ) di Kabupaten Bandung, yaitu: Situ Gleunca (Kecamatan Pangalengan) dan Situ Patengan (Kecamatan Rancabali). Masalah yang dihadapi oleh situ-situ tersebut adalah:

- Berkurangnya debit yang masuk dan meningkatnya sedimentasi akibat perubahan ekosistem hutan/lahan;
- Meningkatnya pencemaran (air limbah dan sampah) akibat meluasnya permukiman di sekitar situ;
- Pesatnya pertumbuhan eceng gondok akibat *eutrofikasi*;
- Konversi lahan akibat perubahan tata guna lahan.

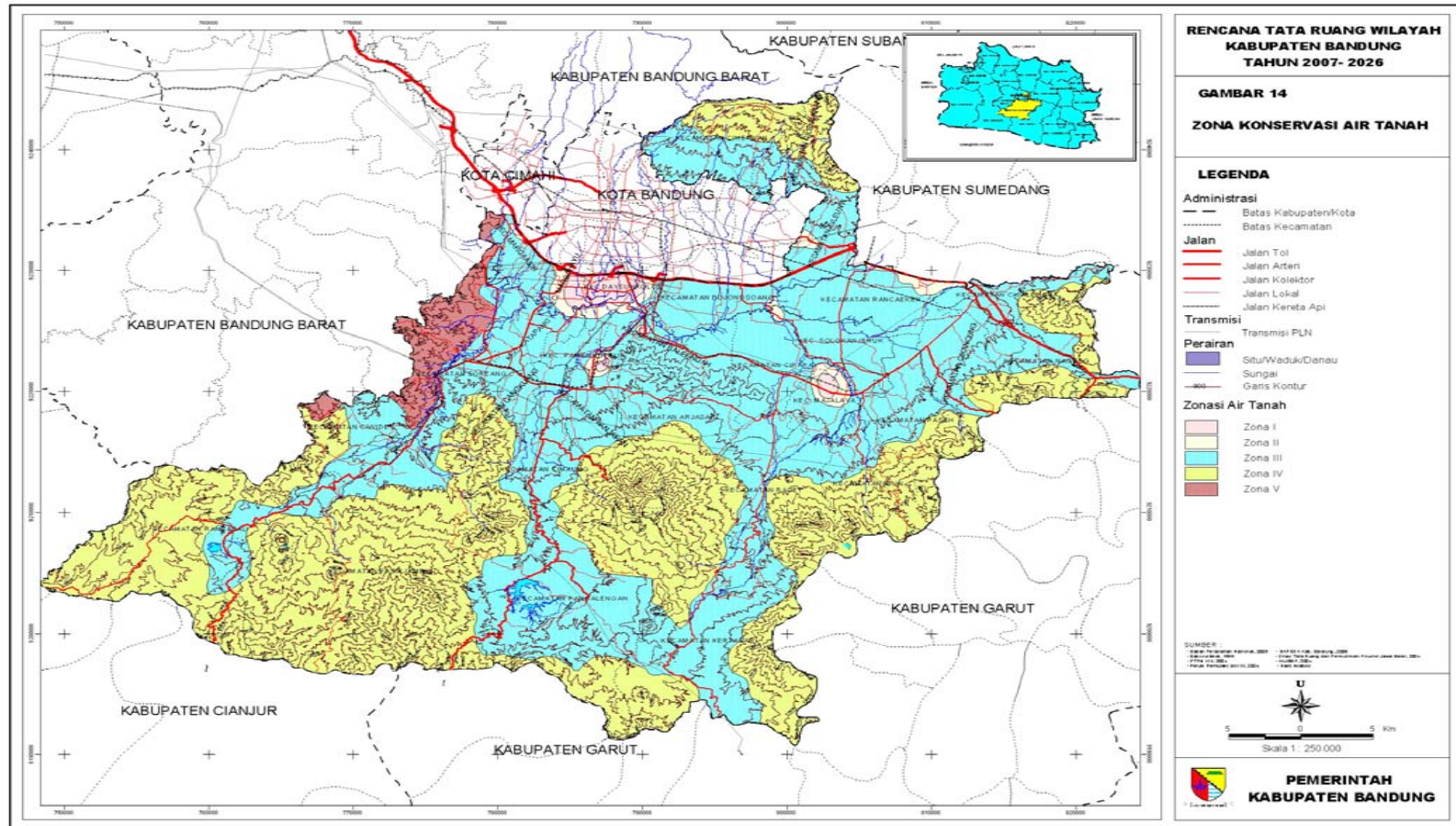
3.2.6 Air Tanah

Air tanah banyak terdapat pada batuan vulkanik muda yang mempunyai kelulusan sedang sampai tinggi yaitu terdapat di bagian Selatan sekitar Ciwidey dan Pangalengan, dan di bagian Timur sekitar Majalaya.



Kondisi air bawah tanah secara kuantitas menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena memburuknya kualitas air permukaan secara signifikan yang kemudian mendorong penggunaan air bawah tanah yang tidak terkendali.

Menurut catatan BPLH hingga akhir tahun 2006, terdapat 859 titik sumur bor dan sekitar 200 titik sumur pantek untuk keperluan industri dengan debit pengambilan sekitar 1.500.000 m³ per bulan. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus diperkirakan akan terjadi penurunan air tanah 0,04-14,96 m per tahun. Keadaan air tanah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Sumber: Bapeda Kabupaten Bandung, 2008

Lamp - 59

Gambar 3.1 Peta Zona Air Tanah Kabupaten Bandung



3.3 Pemmasalahan Sumber Daya Air

Masalah sumber daya air timbul apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya air yang ditandai dengan adanya penurunan kuantitas dan kualitas air, yaitu terlihat ketika terjadi kekurangan persediaan air maupun dalam hal berlimpah dan tidak terkendalinya air di waktu-waktu tertentu, serta meningkatnya beban pencemaran pada air sungai.

Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Bandung adalah :

- Erosi dan Sedimentasi
- Penurunan kuantitas dan kualitas air permukaan
- Konflik sosial dalam penggunaan air
- Banjir yang sering terjadi

Sementara penyebab dari permasalahan sumberdaya air tersebut adalah :

- Penurunan daya dukung lingkungan terhadap kelestarian sumber air terutama disebabkan budidaya lahan dan kegiatan sosial ekonomi lainnya yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air.
- Masalah iklim mikro yang dapat berpengaruh pada pola curah hujan dan intensitas hujan.
- Belum dapat dikendalikannya masalah yang menyebabkan kelebihan dan kekurangan air, antara lain terpeliharanya daerah resapan terutama di daerah hulu.
- Meningkatnya kebutuhan air dipicu dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta fasilitas penunjang.
- Fungsi dan penggunaan air belum optimal yang ditandai dengan adanya pemakaian air oleh *stakeholders* yang cenderung boros
- Adanya pabrik-pabrik yang masih belum mempunyai pengolahan air limbah
- Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memelihara badan-badan sungai
- Perambahan bantaran sungai.



3.3.1 Air limbah



Sumber pencemaran air limbah ke badan air permukaan di Kabupaten Bandung berasal dari kegiatan domestik dan kegiatan non domestik. Kegiatan domestik yaitu air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti mandi, cuci, kakus. Sedangkan kegiatan non domestik terdiri dari air limbah yang

berasal dari kegiatan industri, rumah sakit, dan lain-lain.

Menurut BPLH Kabupaten Bandung tahun 2003, beban pencemaran terhadap sumber pencemar utama di Kabupaten Bandung, 76,4% pencemaran berasal dari kegiatan domestik, 10,8% dari kegiatan peternakan, 10,3% dari kegiatan industri, 2,4% dari kegiatan pertanian, dan 0,1% dari kegiatan rumah sakit.

Di Kabupaten Bandung terdapat 1 (satu) unit IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan 2 (dua) unit IPLT (Instalasi pengolahan Limbah Tinja). IPAL Domestik Soreang yang terletak di Kecamatan Soreang, dan 2 (dua) unit IPLT, yaitu IPLT Babakan di Kecamatan Ciparay dan IPLT Cibeet di Kecamatan Ibum. Ketiga unit pengolahan tersebut saat ini tidak berfungsi dan membutuhkan upaya rehabilitasi dan revitalisasi yang signifikan agar dapat digunakan kembali dan berkontribusi dalam penurunan beban pencemaran dari sumber domestik.

Selain tidakberfungsinya IPAL/IPLT tersebut, pencemaran air dari sumber air limbah domestik dapat berasal dari IPAL Bojongsoang, yaitu IPAL milik Kota Bandung yang berlokasi di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Pada musim hujan dan listrik mati, sistem pemompaan IPAL ini tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan air limbah tidak dapat dipompakan ke sistem IPAL, dan melimpas langsung ke Sungai Cicasas.

Beberapa tangki septik komunal telah dibangun dan berfungsi dengan baik, diantaranya yang berlokasi di Kecamatan Margasih dan Kecamatan Baleendah.



Dalam rangka penurunan tingkat pencemaran air dari sumber air limbah domestik, upaya rehabilitasi dan revitalisasi IPAL/IPLT dan pembangunan tangki septik komunal harus segera dilakukan.



Gambar 3.2 IPAL di Salah Satu Industri Tekstil dengan system

Di Kabupaten Bandung terdapat 132 industri menengah besar yang berpotensi menghasilkan air limbah, 85% adalah industri tekstil. IPAL gabungan Cisirung yang mengolah air limbah 27 industri di Kecamatan Dayeuhkolot tersebut menggunakan sistem fisika-kimia. Sedangkan yang lainnya menggunakan sistem fisika-biologi, fisika-kimia-biologi, serta fisika saja masing-masing 10%, 9%, dan 7%. Gambar 3.2 memperlihatkan IPAL sistem kimia biologi di salah satu industri tekstil. Efisiensi penyisihan polutan rata-rata untuk BOD, COD, dan TSS berturut turut adalah 51, 50, dan 51%. Hal ini menggambarkan potensinya yang masih besar dalam mencemari badan air.

Selain industri menengah besar, seperti industri tekstil, industri skala rumahan juga merupakan kontribusi air limbah. Industri di Kabupaten Bandung hadala industri washing dan industri tahu. Pada tahun 2007-2008, telah dibangun IPAL terpadu untuk pabrik tahu, beserta salurannya di Kecamatan Cangkuang yang akan mengolah air limbah dari beberapa industri tahu.



Tabel 3.2 Rata-rata Air Limbah Perusahaan Berdasarkan Lokasi

No	Industri dan Proses	BOD5 mg/l	COD mg/l	SS mg/l	TDS mg/l	Minyak mg/l	N mg/l	Lainnya mg/l	Fenol mg/l	Cr total mg/l	Ammonia mg/l	Sulfida mg/l	pH
	Baku Mutu	6	10	200	2000	-	-	-	0,5	0,5	1	0,05	6-9
1	Dærah Baleendah, Barjara, Bojongsoang, Cilancung, Cileunyi	45	140	48	-	0,15	-	-	0,075	<0,002	2,15	0,07	7,9
2	Dærah Dayeuhkolot	300	400	40	-	3,8	-	-	0,02	<0,002	5	0,572	8,5
3	Damba Intra (IPAL Gabungan)	54	148	46	-	0,25	-	-	0,096	<0,03	4,24	0,06	7,7
4	Dærah Katapang-Majalaya	58	110	54	-	0,3	-	-	0,25	<0,002	6,2	0,12	7,7
5	Dærah Margaasih, Margahayu, Pameungpeuk, Rancaekek, Solokan Jeruk	35	80	35	-	1,5	-	-	0,044	0,04	5	0,28	7,7

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai BOD dan COD pada air limbah industri tekstil melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh unit pengolahan yang ada belum dapat menyisihkan pencemar dengan baik.



Tabel 3.3 Kualitas Air Limbah Perusahaan dari Beberapa Jenis Industri

No	Nama Industri	Jenis Industri	BOD5	COD	SS	TDS	Minyak	N Total	P Total	Fenol	Cr total	Ammonia	Sulfida	pH
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
	Baku Mutu		6	10	200	2000	-	-	-	0,5	0,5	1	0,05	6-9
1	Indoneptune	Benang Pancing	44,86	119,86	38,29	-	<0,05	-	-	0,046	<0,017	1,25	<0,04	7,41
2	Yorksire	Kimia Tekstil	30,83	78,67	46	-	<0,05	-	-	0,061	<0,061	0,043	<0,036	7,6
3	Ceres	Makanan	2844	12070	4449	-	1479,5	80,95	10,59	-	-	-	-	5,19

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Dari contoh kualitas air limbah di atas dapat dilihat bahwa nilai BOD maupun COD melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan efisiensi penyisihan IPAL industri masih rendah, sehingga tidak dapat mencapai baku mutu. Untuk itu, industri tersebut harus meningkatkan kinerja IPAL, antara lain dengan mengganti bahan kimia/koagulan, atau mengganti bahan penolong proses dengan bahan yang tidak menyebabkan nilai BOD/COD yang tinggi.



3.3.2 Sampah

Sampah yang berasal dari kegiatan domestik sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah membusuk karena terdiri dari bahan organik, seperti daun, tanaman, sisa-sisa makanan, dan lain-lain.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, karena sampah/limbah tersebut mengandung berbagai bahan pencemar dan berbagai macam kuman penyakit yang berpotensi menyebar ke lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terjadi penurunan kualitas media penerima baik tanah, air tanah, udara maupun air permukaan. Air lindi yang keluar dari tumpukan sampah karena masuknya rembesan air hujan ke dalam tumpukan sampah dapat beresnya dengan komponen-komponen hasil penguraian sampah. Air lindi ini mengalir menuju badan air dan dapat mencemari air sungai ataupun meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah.



Gambar 3.3 Aliran Air Lindi yang Melewati Tanah Tanpa Dilapisi Bahan Kedap Air

Hasil analisis air lindi yang dilaksanakan pada TPA yang berlokasi di Kabupaten Bandung, baik yang masih aktif (TPA Babakan) maupun sudah tidak aktif (TPA Jelekong), menunjukkan adanya kadar polutan yang tinggi pada air lindi di semua TPA tersebut dengan parameter utama yaitu COD, BOD, sulfida, nitrat, nitrit, mangan dan amoniak. Hasil

pemeriksaan sampel air dari outlet IPAL TPA dapat dilihat pada **Tabel 3.4**



Tabel 3.4 Hasil Pemeriksaan Sampel Air di Outlet IPAL TPA

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu SK Gubernur Jabar No. 6 Tahun 1999	Hasil Uji	
				TPA Jelekong	TPA Babakan
Fisika					
1	Temperatur	°C	38	27,9	29,9
2	DHL	µS/cm	-	1,077	4,130
3	Kekeruhan	NTU	-	4,28	50,4
4	TSS	mg/L	200	4	120
5	TDS	mg/L	2000	4,79	818
6	Warna	pt-co	-	148	1.520
Kimia					
1	Nikel	mg/L	0,2	<0,048	0,069
2	Amoniak (NH ₃)	mg/L	1	52,9	189,7
3	Besi (Fe)	mg/L	5	1,641	4,905
4	Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	<0,006	<0,006
5	Clorida (Cl ₂) klorin bebas	mg/L	1	0,003	<0,02
6	Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	<0,012	<0,012
7	Mangan (Mn)	mg/L	2	1,456	2713
8	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	20	4,8	25
9	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	1.33	0,1
10	pH		6 - 9	8,03	7,97
11	Seng (Zn)	mg/L	5	0,024	4,483
12	Sianida (CN)	mg/L	0,05	<0,08	0,043
13	Posfat (PO ₄ ³⁻)	mg/L	-	0,07	2,5
14	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	tt	1,18
15	Tembaga (Cu)	mg/L	2	0,031	0,105
16	Tinbal (Pb)	mg/L	0,1	<0,078	<0,078
17	Phenol	mg/L	0,5	0,062	0,179
18	BOD	mg/L	50	16	78
19	COD	mg/L	100	81	644
20	DO	mg/L	-	5	2,1

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan : tt = tidak terdeteksi

- = tidak ada data

angka yang dicetak tebal merupakan nilai yang melebihi baku mutu

Sebagai upaya pemantauan potensi tercemarnya air tanah di sekitar TPA, dilakukan pula pemeriksaan kualitas air tanah di 3 titik sumur penduduk, yaitu di Desa Nanjung Mekar, Marga Mekar dan Babakan. Untuk hasil pemeriksaan kualitas air tanah tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.



Tabel 3.5 Hasil Pemantauan Terhadap Kualitas Air Tanah Tahun 2008

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Pemantauan		
	<u>Fisika</u>			Ds. Nanjung Mekar Kec. Rancae kek	Ds. Margamekar Kec. Baleendah	Desa Babakan Kec. Ciparay
1	Temperatur	°C	-	-	23,5	23,9
2	DHL	µS/cm	-	-	31,3	272
3	Kekeruhan	NTU	50	15,3	7,79	19
4	TSS	mg/L	-	-	4	15
5	TDS	mg/L	1000	384	186	283
6	Warna	pt-co	50	101	10	96
	<u>Kimia</u>					
1	Nikel	mg/L	-	-	<0,048	0,049
2	Amoniak(NH ₃)	mg/L	-	-	<0,08	0,41
3	Besi (Fe)	mg/L	1	1,3	0,359	0,707
4	Cadmium(Cd)	mg/L	0,01	-	<0,006	<0,006
5	Clorida(Cl ₂) klorin bebas	mg/L	0,03	-	<0,02	0,02
6	Krom Total Cr)	mg/L	0,05	0,04	<0,012	<0,012
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,5	4,4	3,415	0,104
8	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	10	3	24	14,1
9	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,06	0,08	<0,005	0,152
10	pH		6-9	7,18	6,66	6,16
11	Seng (Zn)	mg/L	0,05	<0,02	0,017	0,016
12	Cianida CN)	mg/L	0,02	0,04	<0,008	<0,008
13	Sulfat (SO ₄)	mg/L	-	32	10,319	-
14	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	-	-	tt	0,03
15	Tembaga (Cu)	mg/L	-	-	0,044	0,038
16	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	-	<0,078	<0,078
17	Phenol	mg/L	-	-	0,046	0,063
18	BOD	mg/L	-	19	1	2
19	COD	mg/L	-	39	23	10
20	DO	mg/L	-	-	4,69	4,52
21	Kesedahan total		500	246,44	-	-
	<u>Bakteri :</u>					
1	Coliform Tinja	JPT/100 mL	5000	110	1000	20

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan : tt = tidak terdeteksi, - = tidak ada data

angka yang dicetak tebal merupakan nilai yang melebihi baku mutu

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kualitas sumur penduduk sekitar TPA tersebut pada waktu yang sama patut diduga adanya korelasi kualitas air sumur tersebut dengan kualitas air lindi yang diindikasikan dengan tingginya beberapa



Udara

Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya yaitu sebagai pemelihara kesehatan dan kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh makhluk hidup. Agar udara bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kualitas udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin kualitasnya melalui pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada tahun 2008 merupakan rangkaian dari kegiatan rutin pemantauan kualitas udara ambien yang dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2006 (pada tahun 2007 tidak dilakukan pengukuran kualitas udara ambien karena adanya kendala teknis). Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2006 diperoleh kesimpulan bahwa secara garis besar, belum terjadi penurunan kualitas udara di Kabupaten Bandung secara signifikan. Namun demikian, nampak bahwa kualitas udara ambien tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Hasil pengukuran kualitas udara ambien dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Pengukuran Kualitas Udara Ambien

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SO ₂	µg/Nm ³	900	26,3	23,1	31,7	21,4	28,4	21,5	21,4	21,4
2.	CO	µg/Nm ³	30000	17372	5286	28758	687	526	978	872	786
3.	NO ₂	µg/Nm ³	400	98,6	62,4	98,6	38,7	42,1	42,4	43,2	41,5
4.	O ₃	µg/Nm ³	235	26,1	tt	32,8	tt	tt	tt	tt	tt
5.	HC	µg/Nm ³	160	85,4	49,3	84,2	104,6	95,1	83,9	72,8	58,4
6.	PM ₁₀	µg/Nm ³	150	40,2	18,2	14,5	51	49,7	74,4	147,5	82,9
7.	PM _{2,5}	µg/Nm ³	65	4,5	1,3	1	1,8	1,7	4,8	4,4	16,5
8.	TSP	µg/Nm ³	230	87,1	39,6	49,1	72,3	68,5	141,4	183	137,6
9.	Pb	µg/Nm ³	2	0,003	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt

Sumber: DLH Kabupaten Bandung, 2006

Keterangan:

1. Jl. Kopo Sayati, Ds. Sayati, Kec. Margahayu
2. Depan IPAL, Ds. Pasawahan, Kec. Dayeuhkud
3. Dalam Terminal, Ds. Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi
4. TPA Babakan, Ds. Babakan, Kec. Ciparay
5. TPA Jelekong, Ds. Jelekong, Kec. Ciparay
6. Depan Balai Desa, Ds. Padaulun, Kec. Majalaya
7. Depan Balai Desa, Ds. Biru, Kec. Majalaya
8. Depan Balai Desa, Ds. Sukamaju, Kec. Majalaya

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di 8 titik yang termasuk dalam 5 kecamatan, yaitu pada lokasi padat lalu lintas, zona industri, TPA sampah dan zona konservasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara umum semua lokasi masih memenuhi baku mutu, namun terdapat beberapa parameter yang nilai konsentrasinya hampir melampaui baku mutu, yaitu CO di Terminal Cileunyi, dan PM₁₀ di Desa Biru Kecamatan Majalaya

Walaupun baku mutu tidak terlampaui, namun terindikasi kecenderungan peningkatan konsentrasi parameter NO₂, SO₂, CO, O₃, HC, debu dan PM₁₀ dari tahun 2003 sampai tahun 2006 pada beberapa lokasi yaitu jalan Kopo-Sayati, jalan Rancajigang Majalaya, Zona Industri Cisirung dan Alun-alun Majalaya. Adapun kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara adalah sektor transportasi, industri dan pertambangan yang merupakan sumber pencemar utama.

4.1 Sumber Pencemar Udara

Berdasarkan sumbernya, pencemaran udara digolongkan menjadi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Transportasi darat, khususnya kendaraan bermotor roda empat dan roda dua merupakan sumber bergerak, sedangkan industri, domestik, komersial, serta kebakaran hutan dan lahan merupakan sumber tidak bergerak. Pencemaran udara memiliki dampak secara ekonomis berkaitan dengan penurunan kinerja sebagai akibat kenaikan tingkat kematian dan penderita sakit di kalangan masyarakat. Kasus gangguan pada pernafasan merupakan penyebab kematian urutan ke 6 di Indonesia setelah kecelakaan, diare, penyakit jantung, TBC dan cacar, atau 6,2 % dari seluruh penyebab kematian.

Pencemaran udara di Kabupaten Bandung terjadi akibat dari :

- Beban pencemaran udara yang berasal dari perusahaan industri
- Beban pencemaran udara yang berasal dari transportasi
- Beban pencemaran udara yang berasal dari sawah
- Pengiriman gas CH₄ dan gas NH₃ yang berasal dari peternakan
- Beban pencemaran udara yang berasal dari sumber domestik.

Penurunan kualitas udara berakibat pada :

- Meningkatnya suhu udara
- Menurunnya kelembaban

- Bau
- Polutan > NAB.

Pencemar udara dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Selain itu pencemar debu yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor dan industri dapat mengandung logam-logam berbahaya seperti timah hitam (timbal). Timbal adalah pencemar yang diemisikan dari kendaraan bermotor dalam bentuk partikel halus yang dapat terisap ke dalam saluran pernafasan dan akhirnya terakumulasi di dalam jaringan tubuh seperti tulang, lemak dan darah.

Dalam upaya menanggulangi pencemaran udara serta dalam mengantisipasi dampaknya bagi kesehatan manusia, kehidupan lain maupun kerusakan materi, maka perlu dibangun keterbukaan serta adanya tukar menukar informasi yang terus menerus di antara para *stakeholders*. Ini diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara, khususnya yang berkaitan dengan penetapan spesifikasi bahan bakar bensin baru, menyongsong era pasca-bensin bertimbal.

Untuk itu, perlu adanya proses sosialisasi yang berkesinambungan untuk menumbuhkan pengertian dan dukungan masyarakat menuju lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

4.1.1 Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak

Berdasarkan laporan dari BPLH Kabupaten Bandung tahun 2007, hasil uji emisi terhadap 1.200 kendaraan bermotor, masing-masing 200 kendaraan pada 6 lokasi, yaitu jalan Raya Banjaran, jalan Mohammad Toha, jalan Bojongsong, jalan Cileunyi-Rancaekek, dan jalan Raya Ciparay. Bahwa 66% kendaraan memenuhi nilai ambang batas dan sisanya 34% tidak memenuhi ambang batas. Mayoritas kendaraan yang tidak memenuhi nilai ambang batas adalah kendaraan roda empat umum yang berbahan bakar solar, yaitu 58% dari jumlah total kendaraan umum berbahan bakar solar yang diuji

4.1.2 Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak



Sejak tahun 2003 terdapat kecenderungan peningkatan penggunaan bahan bakar batubara sebagai bahan pengganti solar. Lebih dari 110 industri di Kabupaten Bandung yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya.

Dengan beralihnya bahan bakar dari solar ke batubara, maka gas buang yang disebabkan oleh emisi cerobong ketel uap batubara akan meningkat pula. Sebagai fenomena yang baru, sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan mengenai baku mutu emisi khusus ketel uap berbahan bakar batubara, prosedur penanganan *fly ash* dan *bottom ash* (debu yang ditimbulkan oleh kegiatan penggunaan bahan bakar batu bara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 merupakan limbah B3), serta prosedur pengelolaan batubara karena alasan lebih ekonomis. Hal ini menambah kompleksnya penanganan pencemaran lingkungan yang harus ditangani. Jenis limbah yang dihasilkan dari bahan bakar batubara adalah emisi gas buang (SO_x, NO_x, dan partikulat) dan limbah padat (*fly ash* dan *bottom ash*). Menurut catatan hasil pemantauan pada tahun 2007, batubara yang digunakan oleh industri di Kabupaten Bandung adalah 2.900 ton/hari dengan timbulan limbah *fly ash* 73,35 ton/hari dan *bottom ash* 127,135 ton/hari. Beberapa industri yang menghasilkan timbulan limbah batubara dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Beberapa Industri Yang Menghasilkan Timbulan Limbah Batu bara

No	Nama dan Lokasi Industri	Jenis Industri	Timbulan Lumpur PAL	Timbulan Limbah Abu Batubara Bottom Ash dan Fly Ash
1	CANDRATEX Dayeuhkolot	Textil	PAL CISIRUNG	BA = 1.8 ton/hr FA = 0.9 ton/hr
2	ADETEX Banjar an	Textil	0.3 ton/bln	BA = 1.3 ton/hr FA = 170 kg/hr
3	INDOVON Rancaekek	Textil	24 kg/hr	BA = 25 kg/hr FA = 25 kg/hr
4	PENCELUPAN HARAPAN Majalaya	Textil	800 kg/hr	BA + FA = 100 kg/hr
5	TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA Baleendah	Textil	20 kg/bln	BA+FA= 2 ton/tr
6	CEMARA AGUNG Cicalengka	Textil	1600 kg/bln	FA dan BA= 25 ton/tr
7	MARGAASIH WASHING Margaasih	Washing	1 ton/bln	BA = 200 kg/hr FA = 200 kg/hr
8	SINAR RUNNER INDO Katapang	Sepatu	-	BA = 300 kg/hr FA = 50 kg/hr
9	PAPYRUS SAKTI Banjar an	Kertas	550 kg/hr	BA+FA = 800 kg/hr
10	PLTU PANASIA Dayeuhkolot	PLTU	-	FA = 30 ton/hr
11	ADETEX FILAMEN III Banjar an	Textil	-	BA = 1 ton/tr FA = 0.5 ton/hr
12	ALBAN YANGGUN Pameungpeuk	Textil	-	FA = 0.5 ton/hr
13	ALENATEX Dayeuhkolot	Textil		BA+FA= 250 kg/hr
14	ANGKREKMAS Majalaya	Textil	750 kg/bln	FA dan BA= 400 kg/tr
15	ANGGANA KURNIA PUTRA Bojongsoang	Textil	-	BA = 1.4 ton/hr FA = 20 kg/hr
16	ANUGRAH TRIMULIA Dayeuhkolot	Textil	50 kg/bln	BA = 100 kg/hr FA = 10 kg/hr
17	ARTHABAMA Cicalengka	Textil	-	FA dan BA= 2 truk/bln
18	ARTOSTEX Dayeuhkolot	Textil	-	FA = 320 kg/hr
19	BADJATEX Dayeuhkolot	Textil	-	FA = 800 kg/hr
20	BINTARA SINAR PRIMA Dayeuhkolot	Textil	-	BA = 500 kg/hr FA = 430 kg/hr
21	BIMA JAYA Majalaya	Textil	0.6 T on/bln	BA = 1 ton/tr FA = 75 kg/hr
22	BINTANG CIPTA PERKASA Majalaya	Textil	2 T on/bln	BA = 1T on/hr

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Pada tahun 2007 pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di beberapa lokasi industri, yaitu: PT Naga Mas Kurnia Sejahtera, PT Himalaya Tunas Texindo dan PT Anggana Kurnia Putra. Untuk hasil pemantauan kualitas udara ambien di beberapa lokasi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4.3**, **Tabel 4.4** dan **Tabel 4.5**.

Tabel 4.3 Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT Nagamas Kurnia Sejahtera

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengukuran			Baku Mutu*)	Keterangan
			1	2	3		
Fisika							
1	Temperatur Udara	0C	28,5	31	31	-	1. Belakang Pabrik
2	Kelembaban	%	47	41	43	-	2. Ruang Produksi
3	Iklim	Octav	2/8	-	1/8	-	3. Depan Pabrik
4	Kecepatan Angin	Knot	1,8-3,8	-	0,4-0,9	-	tt Tidak Terdeteksi
5	Arah Angin	Derajat(0)	180	-	180	-	(-) Tidak ada Nilai
6	Kebisingan	dB(A)	64	88	57	70	*) Baku Mutu Berdasarkan PP RI No.41 Tahun 1999 Tentang PPU
Kimia							
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	169	69	37	400	
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	28,81	tt	tt	900	
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	457	457	366	30000	
4	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	tt	tt	tt	235	
5	Ammonia (NH ₃)	µg/Nm ³	tt	tt	tt	-	
6	TSP (Debu)	µg/Nm ³	120	68	60	230	

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Tabel 4.4 Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT Himalaya Tunas Texindo

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengukuran			Baku Mutu ³⁾	Baku Mutu ⁴⁾
			U-1	U-2	U-3		
Fisika							
1	Temperatur Udara	0C	34	30	33	-	-
2	Kelembaban	%	38,5	48	35	-	-
3	Kecepatan Angin	m/dtk	0,9- 1,0	0,6-0,9	-	-	-
4	Arah Angin	Knot	Timur	Timur	-	-	-
5	Cuaca	Derajat (0)	Cerah	Cerah	-	-	-
6	Kebisingan	dB(A)	55-59,9	55,4-55,8	61,5-62,7	85 4)	70 2)
Kimia							
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	5,05	9,98	15,14	5200	900
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	2,57	1,9	1,92	5600	400
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	100,49	839,39	95,81	29000	30000
4	TSP (Debu)	µg/Nm ³	1,68	0,45	1,1	500	230

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan : ttd: Tidak Terdeteksi

- 3) Nilai Ambang Batas (NAB) unit gas dan debu di tempat kerja berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE.01/MEN/1997
- 4) Bakumutu Kebisingan di tempat kerja berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-51/Men/1999

Tabel 4.5 Pengukuran Kualitas Udara Ambien di PT Anggana Kurnia Putra

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengukuran	Baku Mutu*)
			U-1	
Fisika				
1	Temperatur Udara	OC	30,4	
2	Arah Angin	0	-	-
3	Kecapatan Angin	m/dtk	-	
4	Kelembaban	%	77,9	-
5	Kebisingan	dB (A)	70,1-71,6	85
Kimia				
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/N m ³	28,61	5600
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/N m ³	2,36	5200
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/N m ³	691,72	29000
4	TSP (Debu)	µg/N m ³	948,17	10000

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Catatan :

*) Nilai ambang batas (NAB) urt. Gas, debu di tempat kerja berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja RI No. SE.01/MEN/1997

Berdasarkan dari hasil pemantauan Kualitas Udara Ambien di beberapa lokasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut memiliki kualitas udara ambien yang relatif masih baik.

4.2 Respon Yang Telah Dilakukan

Beberapa respon yang telah dilakukan dalam upaya pengelolaan kualitas udara adalah:

- Melakukan program langit biru;
- Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada lokasi prioritas
- Melengkapi laboratorium dengan alat penguji kualitas udara;
- Melakukan pemantauan pengendalian pencemaran udara pada sumber baik industri maupun kendaraan;
- Sosialisasi pengendalian pencemaran udara, pemanasan global dan perubahan iklim, serta pembatasan penggunaan bahan perusak ozon;
- Melakukan penghijauan;
- Melakukan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara.



parameter, seperti: mangan, sianida, nitrat, nitrit dan warna. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lokasi sumur penduduk tersebut dekat dengan lokasi TPA.

3.4 Respon Yang Telah Dilakukan

Beberapa respon yang telah dilakukan dalam upaya untuk memulihkan dan menjaga sumber daya air antara lain:

- Menumbuhkan kesadaran serta peran swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber air;
- Pengerukan dan normalisasi sungai oleh BBWSC (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum) Departemen Pekerjaan Umum;
- Penanaman/reboisasi di sepanjang DAS Sungai Citarum;
- Adanya pengawasan dan pengendalian dari masing-masing *stakeholder* yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian air tanah;
- Pengambilan air tanah yang mengacu kepada Peta Konservasi Air Tanah;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih dan pengarahannya agar perilaku masyarakat yang cenderung merusak sumberdaya air bersih dapat sedikit demi sedikit dihilangkan;
- Pengembangan Informasi Lingkungan;
- Pelaksanaan Program Kali Bersih;
- Menggalakkan pembangunan sumur resapan;
- Penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga sumberdaya air;
- Mewajibkan pemrakarsa kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan untuk menyusun studi AMDAL atau UKL dan UPL, termasuk pembuatan IPAL dan perijinannya;
- Penyusunan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
- Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 12 tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air;
- Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.3/2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air;



- Membatasi pengambilan air tanah melalui perizinan SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah);
- Melakukan pemantauan kualitas air pada beberapa sungai dan kualitas air limbah dari buangan industri;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air dan pembuangan air limbah di Kabupaten Bandung;
- Pembangunan IPAL Komunal bagi industri kecil;
- Sosialisasi daur ulang air limbah kepada masyarakat industri;
- Penyusunan Studi Kelayakan tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Kegiatan Arboretum Wayang Windu yang berlokasi di sekitar mata air Citarum.



Lahan dan Hutan

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya berbagai kegiatan di Kabupaten Bandung, mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan terutama dari kawasan tertutup ke kawasan terbangun. Hal itu perlu diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.

5.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung tahun 2007 didominasi oleh areal sawah seluas 35.309 ha, hutan seluas 17.477,54 ha, kebun campuran seluas 28.113 ha dan perkebunan besar seluas 25.142 ha. Namun demikian, data penggunaan lahan per tahun tidak tersedia, sehingga pergeseran fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tidak dapat dilihat dan dianalisis. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bandung tahun 2007 dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.



Tabel 5.1 Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Permukiman		Sawah	Tegalan	Industri	Kebun Campuran	Perkebunan Besar
		Perumahan (Ha)	Kampung (Ha)					
1	Nagreg	52	484	355	579	-	655	-
2	Cicalengka	29	382	1.070	309	67	1047	-
3	Cikancung	54	490	908	509	148	1204	-
4	Rancakek	245	578	3.252	190	87	114	-
5	Paseh	138	548	1.565	1475	-	1.330	-
6	Soloan Jeruk	-	235	1.939	0	30	16	-
7	Majalaya	263	516	1.285	30	160	161	-
8	Ibun	30	470	1.300	729	-	687	-
9	Pangalengan	32	955	573	2184	4	2.625	8.834
10	Cileunyi	301	796	981	146	31	514	-
11	Cilengkrang	50	99	452	278	-	619	694
12	Cimicyan	41	605	224	771	-	2.157	-
13	Ciparay	102	545	2.005	210	6	450	-
14	Pacét	18	490	2.191	215	-	870	-
15	Kertasari	-	381	180	351	-	1.978	6.282
16	Bojongsong	155	401	1.713	65	32	170	-
17	Dayeuhkdut	92	448	102	90	230	10	-
18	Pameungpeuk	25	296	799	88	191	50	-
19	Baleendah	110	586	1.496	655	13	1.190	-
20	Arjasari	109	511	1.506	651	-	1.348	61
21	Banjaran	222	346	1.321	340	40	575	-
22	Cimaung	17	769	1.470	421	-	1.106	-
23	Cangkuang	108	244	1.185	275	4	590	-
24	Soreang	150	679	2.035	336	49	2.145	-
25	Pasijambu	15	577	1.471	1175	-	3.966	2.900
26	Ciwidey	31	202	1.436	262	-	1.204	-
27	Rancabali	-	342	610	396	-	684	6.371
28	Katapang	56	507	1.170	165	41	232	-
29	Margahayu	166	315	100	92	34	115	-
30	Margaasih	125	609	615	89	51	301	-
31	Kuta Waringin*)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :		2.736	14.406	35.309	13.076	1.218	28.113	25.142

Bersambung...



Lanjutan tabel

No	Kecamatan	Perkebunan Rakyat	Semak Belukar	Tanah Kosong	Jasa	Padang Rumput	Galian C	Perairan	Tambak/Kolam	Lain-Lain
1	Nagreg	374	389	-	38	140	-	12	-	228
2	Cicalengka	180	332	-	8	-	-	25	-	117
3	Cikancung	108	298	-	6	-	-	-	12	12
4	Rancakek	-	-	-	7	15	-	-	-	30
5	Paseh	-	-	-	5	8	-	25	-	59
6	Solokan Jeruk	-	-	-	4	-	-	156	-	21
7	Majalaya	-	-	-	5	-	-	25	-	91
8	Ibun	-	-	-	3	122	-	60	-	18
9	Pangalengan	-	1.469	-	18	30	-	209	-	19
10	Cileunyi	-	17	-	9	-	-	11	-	9
11	Cilengkrang	-	-	-	4	152	-	-	-	12
12	Cimencyan	-	-	-	4	61	-	368	-	16
13	Ciparay	-	-	-	4	-	-	13	-	33
14	Pacet	-	-	-	3	-	-	5	-	29
15	Kertasari	6.282	-	-	2	-	-	15	-	68
16	Bojongsong	-	-	-	4	-	-	200	-	20
17	Dayeuhkdot	-	-	-	92	-	-	12	-	27
18	Pameungpeuk	-	-	-	3	-	-	1	-	9
19	Baleendah	-	-	8	13	-	-	31	-	8
20	Arjasari	61	-	-	5	7	-	-	-	12
21	Banjaran	-	-	-	8	-	-	16	-	58
22	Cimaung	-	-	-	3	-	-	11	-	88
23	Cangkuang	-	-	-	6	50	-	15	-	29
24	Soreang	-	329	-	25	-	-	41	-	136
25	Pasirjambu	-	1.589	-	6	-	-	33	-	26
26	Ciwidey	-	-	-	3	1	-	6	-	20
27	Rancajali	-	-	-	2	-	-	146	-	16
28	Katapang	-	-	-	3	-	-	-	-	43
29	Margahayu	-	-	-	220	-	-	-	-	12
30	Margaasih	-	-	-	1	-	-	-	-	6
31	Kuta Waringin*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :		7.005	4.423	8	514	586	0	1.436	12	1272

Sumber : BPN Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan : - = Tidak ada data, *) Kecamatan baru



Permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang dan tata guna lahan di Kabupaten Bandung adalah :

- Sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada suatu lokasi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakserasian di dalam pemanfaatan lahan dan dapat mengganggu keselarasan, keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.
- Banyak terjadinya alih fungsi lahan yang seharusnya tetap dipertahankan fungsinya sesuai dengan rencana, dan telah merupakan ketetapan pemerintah untuk tetap dipertahankan fungsinya (kawasan lindung, kawasan suaka alam, kawasan persawahan irigasi teknis) sehingga tidak ada konsistensi rencana dengan pelaksanaan. Adanya konversi lahan tersebut mengakibatkan meningkatnya iklim mikro, dimana udara menjadi pengap dan temperatur meningkat, contohnya Hulu Citarum yang merupakan kawasan hutan berubah menjadi daerah pertanian, yang menyebabkan sirkulasi udara dan air berubah dan proses *evapotranspirasi* terganggu sehingga mengakibatkan berubahnya rentang kelembaban, temperatur dan curah hujan.

5.2 Lahan Kritis



Definisi Lahan Kritis menurut Departemen Kehutanan adalah lahan yang tidak mampu lagi berperan menjadi unsur produksi pertanian, baik sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai perlindungan alam.

Untuk data rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan tercantum dalam **Tabel 5.2**.



Tabel 5.2 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)/Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1	Ciwidey	136,50	10,00	25,50	
2	Rancabali	0,00	0,00	0,00	
3	Pasirjambu	261,50	24,70	136,22	
4	Cimaung	149,50	218,90	329,20	
5	Pangalengan	660,50	393,20	327,20	
6	Kertasari	125,00	231,75	94,10	
7	Pacet	329,00	287,75	327,05	
8	Ibun	210,00	198,00	220,00	
9	Paseh	39,00	10,50	323,81	
10	Cikancung	57,00	6,25	70,06	
11	Cicalengka	107,84	81,00	47,42	
12	Nagreg	100,00	0,00	75,00	
13	Rancaek	0,00	0,00	0,00	
14	Majalaya	0,00	0,00	0,00	
15	Solokanjeruk	0,00	0,00	0,00	
16	Ciparay	152,00	138,75	153,10	
17	Baleendah	135,00	86,25	129,90	
18	Arjasari	384,00	237,55	473,79	
19	Banjaran	85,00	7,50	43,80	
20	Cangkuang	75,00	2,50	52,50	25,00
21	Pameungpeuk	0,00	0,00	0,00	
22	Katapang	0,00	0,00	0,00	
23	Soreang	250,50	0,00	166,00	25,00
24	Margaasih	50,00	0,00	26,50	
25	Margahayu	0,00	0,00	0,00	
26	Dayeukolot	0,00	0,00	0,00	
27	Bojongsorang	0,00	0,00	0,00	
28	Cileunyi	65,82	51,60	3,00	
29	Cilengkrang	41,50	15,00	22,00	
30	Cimendan	112,00	25,00	26,00	
	Jumlah	3.526,66	2.026,20	3.072,15	50,00

Sumber : Dinas TANHUTBUN Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan: -tidak ada data

Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan yang paling besar terdapat di Kecamatan Arjasari yaitu sebesar 473,79 Ha, disusul dengan Kecamatan Cimaung sebesar 329,20 Ha.



Terjadinya lahan kritis di Kabupaten Bandung diakibatkan karena :

- Alih fungsi lahan pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi dan terjadinya perambahan hutan.
- Kegiatan eksploitasi lahan yang kurang mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, pada tahun 2007 penanganan lahan kritis ditargetkan untuk mampu menanam tanaman tahunan (kayu-kayuan dan buah-buahan) sebanyak 1.727.500 batang pada areal lahan kritis seluas 6.750 hektar yang tersebar di 33 kecamatan (masih termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat) dan 115 desa melalui pola hutan rakyat campuran. Pengembangan hutan rakyat juga akan dilaksanakan pada areal seluas 225 hektar di 5 kecamatan pada 9 desa.

Adapun pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kering (GRLK) di Kabupaten Bandung sejak tahun 2004 telah berhasil menangani lahan kritis seluas 15.608,56 hektar, sehingga dari lahan kritis seluas 30.939,16 hektar pada tahun 2004, masih tersisa 15.330,6 hektar lahan kritis yang belum tertangani.

Di Kabupaten Bandung masih terdapat 5 kecamatan yang masih memiliki lahan kritis cukup luas yakni Cianjurg, Cicalengka, Paseh, Cimenyan dan Gununghalu. Adapun data luas lahan kritis per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 laporan Basis Data.

5.3 Pertambangan



Potensi pertambangan yang menjadi komoditi di Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa jenis dengan kemungkinan peruntukan beragam. Secara umum, sumberdaya tambang yang telah dilaporkan ada di wilayah Kabupaten Bandung dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu ;



- a. Bahan galian logam ; emas
- b. Bahan galian konstruksi ; pasir dan batu, batuan (andesit di)
- c. Bahan galian industri ; obsidian, oker, kaolin dan lempung

Pada saat ini di Kabupaten Bandung tercatat ada 9 jenis pertambangan bahan galian Golongan C yang tersebar di 17 kecamatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Tabel 5.3**.

Selain potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Bandung, sejumlah lokasi di Kabupaten Bandung memiliki potensi total dugaan panas bumi sebesar 1.682 MWe (Mega Watt Energi). Lapangan panas bumi tersebut antara lain Kompleks Kamojang (diduga 300 MWe, terpasang 140 MWe), Wayang-Windu (diduga 460 MWe, terpasang 110 MWe), Patuha (diduga 482 MWe), Darajat (diduga 250 MWe) yang sebagian berada di Kawasan Garut.



Tabel 5.3 Jenis dan lokasi pertambangan di Kabupaten Bandung

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS PERTAMBANGAN	FORMASI GEOLOGI
1	Baleendah	Baleendah	Batu Andesit	Lava dan lahan gunung api muda
2	Banjarian	Ciluncat	Batu Andesit	Breksi dan Aglomerat gunung api muda
3	Cicalengka	Tanjung Wangi Nagreg Citaman Bojong Ciherang Ciaro	Kaolin, Batu Andesit, Teras Teras Obsidian Pasir, Obsidian Tufa Silikat Kaolin	Hasil gunung tua tak teruraikan Hasil gunung tua tak teruraikan Hasil gunung tua tak teruraikan Hasil gunung tua tak teruraikan Hasil gunung tua tak teruraikan Hasil gunung tua tak teruraikan
4	Cikalong Wetan	Mandalamukti	Teras	Breksi Tupan Batu Lava Pasir - Aglomerat
5	Cileunyi	Cibiru Wetan Cinunuk	Batu Andesit Batu Andesit	Hasil gunung api muara tak teruraikan Endapan Danau Tulis
6	Cilengkrang	Melatiwangi	Batu Andesit	Hasil gunung api muara tak teruraikan
7	Cimeryan	Ciburiat	Batu Andesit	Hasil gunung api muara tak teruraikan
8	Cikancung	Ciluluk Mandalasari Tanjunglaya	Obsidian Batu Andesit Pasir	Hasil gunung api muara tak teruraikan Hasil gunung api muara tak teruraikan Hasil gunung api muara tak teruraikan
9	Ciparay	Ciheulang	Lempung	Lava dan lahan gunung api muda
10	Gunung Halu	Sindang Jaya	Oker	Breksi Tupan Batu Lava Pasir - Aglomerat
11	Majalaya	Majasetar	Batu Andesit	Endapan Danau Tulis
12	Margaasih	Margaasih Mekar Rahayu	Batu Andesit Batu Andesit	Endapan Danau Tulis Endapan Danau Tulis
13	Margahayu	Margahayu	Batu Andesit	Endapan Danau Tulis
14	Pacet	Mekarsari	Batu Andesit, Teras	Lava dan lahan gunung api muda Breksi Tupan Batu Lava Pasir - Aglomerat
15	Pangalengan	Wanasuka Banjarsari	Obsidian Batu Andesit	Lava dan lahan gunung api tua Hasil gunung api muda tak teruraikan
16	Paséh	Derwati	Pasir	Hasil gunung api muda tak teruraikan
17	Pasir Jambu	Margamulya	Teras	Lava dan lahan hasil gunung api tua
18	Rancaek Soreang	Jelesong Gajah Mekar Jatisari Kutawaringin Karamat Mulya Sukajadi	Batu Andesit Lempung Pasir Gamping Teras Batu Andesit	Endapan Danau Tulis Endapan Danau Tulis Endapan Danau Tulis Endapan Danau Tulis Breksi Tupan Batu Lava Pasir - Aglomerat Breksi Tupan Batu Lava Pasir - Aglomerat

Sumber : SDAPE Kabupaten Bandung, 2007



Beberapa indikasi permasalahan yang sangat menonjol dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya genangan-genangan air yang cukup luas dan dalam yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan serta kurang berfungsinya bekas penambangan tersebut.
2. Terdapatnya penyebaran endapan bahan galian tidak hanya terdapat di daerah dataran ataupun pegunungan, melainkan terdapat pula di daerah aliran sungai / alur sungai.
3. Adanya resiko longsor pada timbunan atau tanah penutup yang sudah dibongkar sebagian. Resiko yang lain adalah longsor pada *front* yang sudah melewati batas kestabilan lereng.
4. Terdapatnya penambangan yang dilakukan secara liar oleh penduduk tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidupnya.

Kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi di daratan, pegunungan ataupun di badan sungai, akan selalu menimbulkan perubahan bentang alam yang merupakan konsekuensi logis dari upaya memperoleh nilai tambah atas bahan galian yang tersebar dibawah lapisan permukaan tanah. Pertimbangan aspek lingkungan dalam setiap pengusaha bahan galian golongan C masih sangat memprihatinkan karena belum dapat melaksanakan reklamasi yang benar dimana pengusaha hanya asal menimbun atau meratakan tanah saja.

Selain kegiatan pertambangan, pengelolaan panas bumi juga mempunyai dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Serangkaian kegiatan panas bumi dilakukan sejak eksplorasi hingga eksploitasi sumur uapnya. Pekerjaan konstruksi di kawasan ini memerlukan lahan sehingga mengorbankan lahan hutan lindung maupun hutan produksi hingga mencapai > 90 Ha. Pembukaan lahan ini boleh jadi menimbulkan akibat pada beberapa hal, antara lain :

- Hilangnya sebagian keragaman hayati pada lahan terbuka tersebut;
- Hilangnya fungsi bekas hutan tersebut sebagai kawasan resapan air;
- Dampak sosiologis bagi masyarakat untuk merasa tidak peduli dengan kualitas lingkungan dengan keterlibatannya pada perambahan hutan.



Sejumlah akibat dari kondisi tersebut terlihat sebagai hilangnya sejumlah mata air yang mengisi situ Pangkalan di Kamojang. Terbukanya lahan dapat memicu terjadinya erosi yang diendapkan pada situ Pangkalan. Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat kepada kelestarian dan kebersihan lingkungan boleh jadi terlihat sebagai tidak terjaganya lingkungan situ atau perambahan hutan yang pernah dilakukan di sekitar kawasan Kamojang.

Berdasar pada kegiatan pengelolaan energi, pelepasan sejumlah uap ke udara bebas perlu dicermati sebagai salah satu potensi gangguan keseimbangan atmosfer dan sumber pencemaran udara. Gangguan pada masalah ini dapat berdampak lebih luas menjangkau ekosistem di sekitarnya. Dampak lain yang masih dirunut lagi mekanismenya adalah kemungkinan bergesernya neraca hidrologi kawasan pengelolaan. Potensi masalah ada pada berubahnya pola resapan yang kemudian menjadi air tanah yang memberi masukan pada sistem reservoir. Pergeseran neraca dapat berdampak pada terganggunya air permukaan seperti mata air.

Masalah yang ada pada pengelolaan sumberdaya panas bumi adalah yang menyangkut hal-hal bertalian dengan kewenangan pengelolaan, insentif dan disinsentif (sebagaimana pada industri minyak dan gas bumi), akses untuk keikutsertaan daerah dan masyarakat, biaya pengelolaan lingkungan, penanganan masalah kemasyarakatan dan pemantauan bersama dampak lingkungan.



5.4 Respon Yang Telah Dilakukan

Respon yang telah dilakukan untuk menjaga kondisi sumberdaya lahan dan hutan di Kabupaten Bandung adalah:

- Pengembangan Informasi Lingkungan
- Larangan penebangan hutan alam dan jenis rimba hutan di hutan produksi (*Moratorium Logging*) yang dituangkan dalam Sk Gub Nb. 522.81/3339/Huk yang ditujukan kepada PT. Perhutani dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat
- Pelestarian fungsi sumberdaya alam dan rehabilitasi lahan kritis
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Penghijauan/rehabilitasi
- Melakukan rehabilitasi tegakan, khususnya di hutan bekas tebang pilih dalam areal HPH (Hak Pengusahaan Hutan).
- Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada penambang bahan galian golongan C (pemegang SIPD dan tenaga kerja).
- Mewajibkan pelaksanaan reklamasi.
- Meningkatkan kesadaran pengusaha pertambangan untuk memiliki SIPD.
- Membangun sistem informasi pertambangan secara bertahap dalam rangka menunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- Pengelolaan kawasan lindung.



Keanekaragaman Hayati

6.1 PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati *biological diversity (biodiversity)* tertinggi di dunia. Secara umum kajian *biodiversity* menyangkut tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.

Di alam keanekaragaman hayati hidup dalam kondisi lingkungan tertentu, hasil interaksi antara jenis-jenis hayati (biotik) dengan faktor abiotik (antara lain tanah, air dan udara) di sekitarnya. Selanjutnya sistem hubungan timbal balik antara jenis-jenis hayati dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Berbagai keanekaragaman varietas, jenis ataupun ekosistem itu banyak memberikan manfaat pada manusia. Oleh karena itu perlu dikelola oleh manusia dengan sebaik-baiknya agar tidak punah, salah satunya dengan konservasi

6.2 Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung

6.2.1 Flora dan Fauna (Keanekaragaman Hayati)

Keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Bandung merupakan kekayaan alam yang memperlihatkan jenis flora dan fauna. Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bandung dideskripsikan sebagai potensi flora dan fauna yang terdapat di wilayah perkotaan dan wilayah terbangun lainnya, serta gambaran keanekaragaman hayati di setiap cagar alam yang terdapat di Kabupaten Bandung.

a. Keanekaragaman Hayati di Kawasan Umum/Terbuka**▪ Flora**

Flora yang terdapat di kawasan umum/terbuka terdiri dari jenis padi dan palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan jenis pohon masing-masing identifikasi jenis flora di setiap kawasan cagar alam dan kawasan terbuka (umum) dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Flora di Kawasan Terbuka/Umum di Kabupaten Bandung

No.	Nama Jenis Tumbuhan	Nama Ilmiah / Latin
1	Kihujan	<i>Engelharda spicate</i>
2	Puspa	<i>Schima Wallichii</i>
3	Tebe	<i>Sloanea sigun</i>
4	Hiur	<i>Castanopsis acuminata</i>
5	Huru	<i>Litsea sp</i>
6	Cerem	<i>Macropanax dispernum</i>
7	Kiara	<i>Ficus SP</i>
8	Beunyi	<i>Ficus fistulosa</i>
9	Nangsi	<i>Villebrune rubescens</i>
10	Cangcaratan	<i>Nauclea Pallida</i>
11	Hamirung	<i>Vernonea arborea</i>
12	Kibeureum	<i>toon a sureni</i>
13	Kisireum	<i>syzigium davimirtus</i>
14	Kipanggung	<i>schefflera scandens</i>
15	Kikopi	<i>Plectronia glabra</i>
16	Kirinyuh	<i>Eupatorium pallescens</i>
17	Paku pohon	<i>Disksonia Sp</i>
18	Kilemo	<i>Litsea cubeba</i>
19	Kitambaga	<i>Syzigium microcymum</i>
20	Kapulandak	<i>Flacourtia rukam</i>
21	Lame	<i>Alstonia scholaris</i>
22	Mara	<i>Macaranga Tanarius</i>
23	Pasang	<i>Quercus linerta</i>
24	Salam	<i>Syzigium polianthum</i>
25	Saninten	<i>Castanopsis argent ea</i>
26	Cangkuang	<i>Nauclea obtura</i>
27	Harendong	<i>Melastoma malabarichum</i>



No.	Nama Jenis Tumbuhan	Nama Ilmiah / Latin
28	Kiseueur	<i>Cinnamomum Parthenoxylum</i>
29	Pisitan	<i>Lansium domesticum</i>
30	Pulus	<i>Laportea stimulan</i>
31	Talingkup	<i>Claoxylon polat</i>
32	Walen	<i>Ficus ribes</i>
33	Binbin	<i>Podocarpus blumei</i>
34	Bubukuan	<i>Pterocarpus indicus</i>
35	Canar	<i>Smilaxmacrocarpa</i>
36	Congkok	<i>curculigo capitulata</i>
37	Hareueus	<i>Rubus fraxinifolius</i>
38	Kibawang	<i>Diysoxylum allaceum</i>
39	Hurugambir	<i>Litsea Javanica</i>
40	Jungkar	<i>Lithocarpus pseudo mduces</i>
41	Pasang	<i>Quercus blumea</i>
42	Peer	<i>Ficus rostrata</i>
43	Manglid	<i>Mogndia blumei</i>
44	Calincing	<i>Oxalis corniculata</i>
45	Eurih	<i>Imperata cylindrica</i>
46	Gewor	<i>Commelina benghalensis</i>
47	Harashas	<i>Pandanus furcatus</i>
48	Hoe	<i>Calamus sp</i>
49	Jalitri	<i>Wrightia javanica</i>
50	Jukut Jampang	<i>Eleusine indica</i>
51	Jukut Pait	<i>Panicum colonum</i>
52	Kaliage	<i>Gomphostemma pholomoides</i>
53	Teklan	<i>eupatorium riparium</i>
54	Konyal	<i>Passiflora ligularis</i>
55	Cantigi	<i>Vaccinium laurifolium</i>
56	Seruni	<i>toonafebrifuga</i>
57	Hareueus	<i>Rubus moluccanus</i>
58	Leunca	<i>Solanum nigrum</i>
59	Cangkuang	<i>Pandanus Furcatus</i>
60	Kingkilaban	<i>Mussaendra frondosa</i>
61	Jajagan	<i>panicum repens</i>
62	Anggrek	<i>Phailus flavus</i>
63	Jamuju	<i>Podocarpus imbricatus</i>

No.	Nama Jenis Tumbuhan	Nama Ilmiah / Latin
64	Kiputri	<i>Podocarpus nerifolius</i>
65	Akar Wangi	<i>Polygala Verenosa</i>
66	Saliara	<i>Lantana camara</i>
67	Huru koneng	<i>Lisea Argulata</i>
68	Huru Bodas	<i>Litsea amara</i>
69	Pisang	<i>Musa paradisiaca</i>
70	Sonkeling	<i>Dalbergia latifolia</i>
71	Gandaria	<i>Gautheria leucocarpa</i>
72	Tabat Barito	<i>Ficus deltoidea</i>
73	Teki	<i>Elocharris dulcis</i>
74	Sintong	<i>Crassocpalum crepidus</i>
75	Kecubung Gunung	<i>Bregmansia suaveoleus</i>
76	Babadotan	<i>Ageratum Naustatianum</i>
77	Jarong	<i>Achyrauthes bidentata</i>
78	Kina	<i>Chinchora pubescens</i>
79	Kiamis	<i>Cinnamomum burmanii</i>
80	Tepus	<i>Achasma coccineum</i>

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

▪ Fauna

Fauna yang diidentifikasi dan merupakan jenis kekayaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Fauna di Kawasan Terbuka/Umum

No	Kecamatan/ Kabupaten (Kota)	Jumlah Spesies	Nama Ilmiah Spesies	Jumlah Spesies yang Dilindungi	Nama Spesies yang Dilindungi
1	Kabupaten bandung	-	<i>Presbytis aygula</i>	-	Surili
2	Kabupaten bandung	-	<i>trachypus hecus critatus</i>	-	Lutung Jawa
3	Kabupaten bandung	-	<i>Hystrix brachyura</i>	-	Landak
4	Kabupaten bandung	-	<i>Spizaetus sp</i>	-	Elang Ruyuk
5	Kabupaten bandung	-	<i>Panthera pardus</i>	-	Macan Tutul
6	Kabupaten bandung	-	<i>Nycticebus coucang</i>	-	Kukang
7	Kabupaten bandung	-	<i>Spizaetus bartelsi</i>	-	Elang Jawa
8	Kabupaten bandung	-	<i>Spizaetus cirrhatius</i>	-	Elang Brontok
9	Kabupaten bandung	-	<i>Felis bengalesis</i>	-	Kucing Hutan
10	Kabupaten bandung	-	<i>Hylobates moloch</i>	-	Owa Jawa
11	Kabupaten bandung	-	<i>Muntiacus muntjak</i>	-	Mencek
12	Kabupaten bandung	-	<i>Tarsius sp</i>	-	Tarsius
13	Kabupaten bandung	-	<i>Spilornis cheela</i>	-	Elang Ular
14	Kabupaten bandung	-	<i>Ictinaetus malayensis</i>	-	Elang Hitam
15	Kabupaten bandung	-	<i>Python molurus bivittatus</i>	-	Ular Sanca Bodo
16	Kabupaten bandung	-	<i>Psaltia exilis</i>	-	Glatik Gunung

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan :- = Tidak ada data

6.2.2 Keanekaragaman Hayati di Cagar Alam Gunung Tilu

Kawasan Gunung Tilu merupakan Cagar Alam yang terletak 25 km sebelah selatan Bandung. Beberapa gunung termasuk di dalam kawasan ini yaitu Gn. Tilu, Gn, Waringin, Gn. Cureuh, Gn. Simpang, Gn. Puncak Walang dan daerah Bojonglarang Jayanti. Daerah tersebut ditutupi oleh hutan hujan pegunungan bawah dan hutan hujan pegunungan atas. Daerah hutan hujan pegunungan bawah di dominasi oleh pohon-pohon dengan tinggi lebih dari 60 m, seperti *Altingia excelsa*, *Podocarpus*

imbricatus, *P. amarus*. Hutan hujan pegunungan atas didominasi oleh lumut dan tanaman epifit. Kawasan ini dikelilingi oleh perkebunan teh, hutan perkebunan, persawahan dan pemukiman. Ada tiga daerah pemukiman dekat kawasan ini disebelah utara dan timur, yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan. Penduduk pada pemukiman tersebut bermata pencaharian sebagai petani, sesekali mengambil/mengumpulkan hasil-hasil hutan dan berburu.

- **Flora**

- *Rafflesia* spp. *Rhizanthese zippelii*
- *Nastus elegantissimus*

- **Fauna**

- *Cuon alpinus*
- *Panthera pardus*
- *Hylobates moloch*
- *Presbytis aygula*
- *Trachypithecus auratus*
- *Pupisoma tiluanum*

6.2.3 Keanekaragaman Hayati di Cagar Alam Gunung Simpang

Cagar Alam Gunung Simpang mempunyai luas sebesar 15.000 ha, yang terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung terletak di Desa Sugih Mukti Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung.

- Flora : Pasang (*Quercus blumea*), Rasamla (*Altingia exœlsa*), Puspa (*Schima walichii*),
Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Saninten (*Castanopsis argantea*), Tebe (*Slonea sigun*), Anggrek Bulan (*Phalaenopsis amabilis*), Kadaka (*Drynaria sp.*), Benalu (*Diplazium esculentum*)

- Fauna : Lutung (*Trachypithecus auratus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Surili (*Prebytis comata*), Owa (*Hylobates moloch*), Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*), Macan tutul (*Panthera pardus*), Ular Cobra (*Naja sputatrix*), Ular Sanca (*Phyton reticulatus*)

6.2.4 Cagar Alam Situ Patengan

Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Telaga Patengan mempunyai luas sebesar 86,18 Ha (TWA = 65 Ha, CA = 21,15 Ha) dan terletak di Desa Rancabali Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

- Flora : Kihuir (*Castanea javanica*), Puspa (*Schima noronhae*), Pasang (*Quercus sp.*), Baros (*Michelia velutina*), Kitambaga (*Eugenia cuprea*), Huru (*Litsea sp.*), Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Saninten (*Castanopsis argentea*) dan Beunying (*Ficus fistulosa*), Rasamala (*Altingia excalsa*), Sulibra (*Chincona sp.*)
Tumbuhan bawah : Rotan (*Calamus sp.*), Anggrek Benalu, Hata, Jotang, Kadaka
- Fauna : Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Trachypitecus auratus*), Macan Kumbang (*Panthera pardus*), Mencek (*Muntiacus muntjak*), Babi Hutan (*Sus vittatus*), Bajing (*Sciurus vulgaris*), Ayam Hutan (*Gallus gallus varius*), Burung Tulung Tumpuk (*Megalae ma corvina*), Burung Kipas (*Rhipidura javanica*)

6.2.5 Taman Wisata Alam Kamojang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 170/Kpts/Um/3/1979, tanggal 13-3-1979 hutan pegunungan seluas 8.000 Ha ditunjuk sebagai Cagar Alam seluas 7.500 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 500 Ha. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 110/Kpts-11/90 tanggal 14 Maret 1990, CA dan TWA Kamojang ditetapkan seluas 8.286 Ha (CA 7.805 Ha). Menurut administrasi pemerintahan kawasan konservasi Kamojang terletak dalam dua wilayah, yaitu : termasuk wilayah Desa Cibeet, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan termasuk wilayah Desa Randukurung, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Kondisi topografi secara umum topografinya bergelombang dengan ketinggian tempat antara 500 - 1.000 meter di atas permukaan laut. Menurut klasifikasi

Schmidt dan Ferguson, iklimnya termasuk tipe iklim B dengan rata-rata curah hujan per tahun 2.500 - 3.000 mm.

Flora : Vegetasi Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kamojang termasuk tipe hutan hujan tropik pegunungan dengan floranya terdiri dari jenis-jenis pohon dan liana serta epiphyte. Jenis-jenis pohon yang banyak terdapat adalah : Jamuju (*Podocarpus imbricatus*), Puspa (*Schima walichii*), Saninten (*Castanopsis tungurut*), Pasang (*Quercus sp*) dan lain lain. Sedangkan jenis tumbuhan bawah didominasi oleh jenis Cantigi (*Vaccinium sp*) dan jenis liana dan epiphyt adalah Rotan (*Calamus sp*), Seuseureuhan (*Piper aduncum*), Pungpurutan (*Urena lobata*), Hangosa (*Amoemun dealatum*), Kandaka (*Dryanaria sp*), Benalu (*Diplazium esculenteum*) dan Meranti Merah (*Shorea sp*) dan lain lain.

Fauna : Satwa liar yang ada di kawasan ini antara lain : Babi hutan (*Sus vitatus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Macan Tutul (*Panthera pardus*), Musang (*Paradoxurus hertraproditus*), Trenggiling (*Manis javanicus*), Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Trachypithecus auratus*), Ayam hutan (*Gallus guilus*), Burung Belibis (*Anas sp*), Burung Kuntul (*Egretta sp*) dan lain-lain. Juga terdapat beberapa jenis ikan hidup di sungai-sungai.

6.3 Respon Yang Telah Dilakukan

Beberapa respon yang telah dilakukan dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati adalah:

- Penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga flora dan fauna di sekitar hutan.
- Melaksanakan gerakan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan bekas perambahan.
- Memberikan pembinaan kepada masyarakat yang terbukti melakukan perambahan.
- Memperketat patroli yang dilakukan oleh polisi hutan
- Meningkatkan jumlah armada polisi hutan baik sarana maupun prasarannya.

Lingkungan Permukiman



7.1 Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga dalam upaya pemenuhannya harus optimum. Ketersediaan air bersih sangat tergantung pada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan yaitu dari air permukaan dan air tanah. Pengembangan sistem jaringan air bersih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan air bersih guna menunjang peningkatan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Bandung masih sangat minim. Hal ini terlihat belum meratanya pelayanan air bersih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk itu perlu dilakukan upaya penyediaan air bersih yang memenuhi standar yang akan ditentukan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Sedangkan kendala utama upaya penyediaan air bersih ini adalah keterbatasan sumber air yang tersedia, baik itu sumber air tanah maupun sumber air permukaan.

Adapun konsep pengembangan sistem jaringan air bersih Kabupaten Bandung dilakukan dengan cara mengembangkan sistem jaringan perpipaan PDAM ke seluruh wilayah dengan mengikuti pola jaringan jalan dan jalan baru juga pengembangan sistem perpipaan pada wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem perpipaan. Penggunaan sumber air baku di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 7.1** dan **Tabel 7.2**.

Tabel 7.1 Sumber dan Produksi Air Baku di Kabupaten Bandung

No	Sumber dan Produksi	Volume (m ³ /Tahun)
1	Sungai	12.521.657
2	Air Tanah	1.497.873
3	Mata Air	2.682.013
4	Lain-lain	-
Total Produksi Air Bersih		16.701.543

Sumber : Dinas Kimtawil Kabupaten Bandung, 2007

Tabel 7.2 Penggunaan Air Baku di Kabupaten Bandung

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2003	2004	2005	2006	2007
1	Mata air	M ³	-	50.443	-	14.227	54.653
2	Sungai	M ³	-	6.735	-	24.000	6.693
3	Sumur	M ³	-	268.742	-	257.710	340.211
4	PDAM	M ³	15.607	15.732	16.717	18.608	19.434

Sumber : Dinas Kimtawil Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan : - tidak ada data

Permasalahan Air Bersih

- Masih minimnya pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung
- Rendahnya kualitas dan kuantitas air baku

7.2 Limbah Domestik

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan menyusun master plan pengelolaan air limbah domestik, meningkatkan jumlah tangki septic individual maupun komunal (*on site sanitation*), revitalisasi dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik yang ada, pembangunan saluran penampung buangan air limbah rumah tangga dan pembangunan IPAL domestik. Untuk sarana sanitasi dasar yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 7.3**.

Tabel 7.3 Sarana Sanitasi Dasar di Kabupaten Bandung

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			
		LEDENG	SUMUR	KAKUS	SEPTIC TANK
1	Cileunyi	-	3.890	18.023	11.679
2	Cimeunyan	1.725	1.486	12.929	8.048
3	Cilengkrang	-	-	4.849	7.164
4	Bojongsorang	420	1.097	16.479	9.707
5	Margahayu	-	809	14.668	13.415
6	Margaasih	-	6.093	13.294	7.122
7	Katapang	-	7.065	9.018	5.037
8	Dayeuhkolot	-	2.923	11.791	2.217
9	Banjaran	482	8.858	9.734	4.559
10	Pameungpeuk	-	4.101	5.847	9.172
11	Pangalengan	6.003	8.994	18.585	19.831
12	Arjasari	205	3.746	7.542	5.949
13	Cimaung	-	6.492	5.488	1.806
14	Cicalengka	368	7.446	19.017	2.761
15	Nagreg	-	2.213	5.867	9.138
16	Cikancung	538	4.311	9.881	2.787
17	Rancaekek	6.300	6.200	14.898	8.275
18	Ciparay	2.752	8.195	8.907	4.933
19	Pacet	365	3.074	5.767	1.685
20	Kertasari	-	1.596	5.535	6.146
21	Baleendah	1.802	4.960	40.007	4.878
22	Majalaya	1.897	13.410	18.787	5.253
23	Solokanjeruk	234	3.518	7.767	1.959
24	Pasah	2.033	6.412	11.153	6.598
25	Ibun	401	4.235	6.701	10.148
26	Soreang	453	14.299	25.972	8.679
27	Pasiijambu	-	3.461	11.203	6.971
28	Ciwidey	-	4.499	14.388	7.727
29	Rancabali	-	1.156	5.007	2.460
30	Cangkuang	1.637	3.626	4.841	1.947
31	Kutawaringin*	-	-	-	-
TOTAL		27615	148.165	363.945	198.051

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan : - tidak ada data

*) Kecamatan baru

Permasalahan Limbah Domestik

- Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan limbah domestik
- Dengan bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk, volume limbah domestik semakin meningkat.

7.3 Sistem Drainase

Pada prinsipnya, konsep pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Bandung tetap memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada, membangun sistem jaringan drainase baru, serta memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya sebagai jaringan pembuangan akhir.

Adapun langkah-langkah konsep pengembangan sistem jaringan drainase yang berhirarki di Kabupaten Bandung, berupa:

- Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir, yaitu pengerukan/ memperdalam sungai-sungai, agar tidak terjadi luapan sungai akibat air sungai tidak dapat dialirkan dengan cepat.
- Pengembangan kolam retensi atau kanal sebagai sistem jaringan drainase primer yang dibangun sesuai kondisi topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder dan tertier, yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau *catchment area* untuk mengisi air tanah.
- Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder pada setiap sisi jalan yang alirannya disesuaikan dengan kondisi topografinya, sehingga tidak terjadi genangan di badan jalan pada saat musim hujan, yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer atau ke saluran pembuangan akhir.
- Pembuatan sistem saluran drainase tersier secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem jaringan drainase kotanya, terutama di wilayah permukiman yang belum ada jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru.

Permasalahan Sistem Drainase

- Jaringan drainase di Kabupaten Bandung belum terencana secara optimal
- Sistem Drainase yang masih tercampur dengan buangan domestik

7.4 Jaringan Listrik

Sebagai bagian dari Kota Metropolitan, Kabupaten Bandung harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan energi listrik

Untuk mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperlukan penambahan daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin meningkat sejalan dengan perkembangan Kabupaten Bandung sebagai pengaruh kemajuan teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Bandung ini dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan dan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Propinsi Jawa Barat. Untuk mendukung kebutuhan listrik di Kabupaten Bandung, ada beberapa energi alternatif yang digunakan salah satunya adalah energi panas bumi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 7.4** dan **Tabel 7.5**.

Tabel 7.4 Energi Listrik Tenaga Air di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Mkwh)	Jumlah Pemakaian (Mkwh)	Jumlah Impor** (Mkwh)	Jumlah Ekspor** (Mkwh)
1	Cimaung	19,20 MW	-	-	-
2	Pangalengan	19,56 MW	-	-	-
3	Pangalengan	6,46 MW	-	-	-
	TOTAL	45,22 MW			

Sumber: SDAPE Kabupaten Bandung, 2008

Tabel 7.5 Energi Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Mkwh)	Jumlah Pemakaian (Mkwh)	Jumlah Impor** (Mkwh)	Jumlah Ekspor** (Mkwh)
1	Pangalengan	110,00MW	-	-	-
2	Ibun	140,00MW	-	-	-
	TOTAL	250,00MW			

Sumber: SDAPE Kabupaten Bandung, 2008

Selain energi di atas, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bandung yang menggunakan energi alternatif yang memanfaatkan kotoran ternak sebagai *Biogas*. Pengembangan *biogas* ini berjalan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2006 dan 2007 dapat terbangun 236 unit biogasyang meliputi 281, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 7.6**.

Tabel 7.6 Pengembangan Biogas di Kabupaten Bandung

No	Pelaksana/Sumber Anggaran	Tahun	Lokasi	Type Digester	Jumlah unit	Jumlah KK	Keterangan
1	APBD Prop	2006	Kertasari	Komund	1	10	
2	APBN	2006	Kertasari	perarangan	9	9	
3	DLH Kab. Bandung	2007	Kertasari	Komund	4	40	
4	DLH Kab. Bandung	2007	Kertasari	perarangan	30	30	
5	Disnakan Bdg Kab.	2007	Cibodas, Soreang	perarangan	2	2	Ban-Gub
6	Disnakan Bdg Kab.	2007	Pinggiri-Arjasari	perarangan	15	15	PPK-IPM
7	Disnakan Bdg Kab.	2006	Pasirjambu	perarangan	4	4	
8	Swadaya Masy.	2006	Pasirjambu	perarangan	1	1	
9	Disnakan Bdg Kab.	2007	Pasirjambu	perarangan	2	2	
10	Disnakan Bdg Kab.	2007	Rancabali	perarangan	2	2	Ban-Gub
11	Disnakan Bdg Kab.	2007	Rancabali	perarangan	1	1	
12	Swadaya Masy.	2007	Cilengkrang	perarangan	12	12	
13	Disnakan Bdg Kab.	2007	Cilengkrang	perarangan	4	4	
14	Disnakan Bdg Kab.	2007	Pacet	perarangan	1	1	Ban-Gub
15	Disnakan Bdg Kab.	2007	Cikancung	perarangan	1	1	Pendamping BC
16	Disnakan Bdg Kab.	2006	Pangdenda	Perarangan	10	10	
17	Disnakan Bdg Kab.	2007	Pangdenda	Perarangan	5	5	
18	Disnakan Bdg Kab.	2007	Pangdenda	Perarangan	15	15	PPK-IPM

No	Pelaksana/Sumber Anggaran	Tahun	Lokasi	Type Digester	Jumlah unit	Jumlah KK	Keterangan
	Bdg		n	n			
19	Disnakan Kab. Bdg	2006	Pangdengaran	Perarangan	3	3	PPK-IPM
20	Distamben Prop.	2007	Pangdengaran	Perarangan	100	100	
JUMLAH			9 Kecamatan		236	281	

Sumber: Disnakan Kabupaten Bandung, 2008

7.5 Limbah Padat dan Limbah B3

Permasalahan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung menunjukkan tingkat penanganan yang semakin meluas dan kompleks. Penanganan persampahan membutuhkan keterpaduan pengelolaan yang didukung pembiayaan yang memadai khususnya untuk penyediaan berbagai sarana/prasarana dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaannya, efektifitas dan keberhasilan pengelolaan persampahan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dunia usaha sebagai penghasil timbulan sampah untuk senantiasa menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan wilayah, volume sampah menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan berbagai ragam dan jenis sampah. Kuantitas timbulan sampah akan mengikuti kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk, aktivitas dan wilayah. Selain kuantitasnya, permasalahan lain yang dihadapi adalah mengenai pengelolaan sampah mulai dari tingkat keluarga (rumah tangga), lingkungan hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

7.5.1 Limbah Padat



Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Bandung berjumlah 2 buah yaitu TPA Babakan dan TPA Jelekong. Pada tahun 2008 telah dibangun PLTSa yang menghasilkan energi listrik 1 MW yang bekerja sama dengan PLN di TPA Babakan.

TPA Jelekong saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Daerah yang terlayani oleh Dinas Pertasih meliputi 22 kecamatan. Sumber sampah yang dilayani oleh Dinas

Kebersihan Kabupaten Bandung meliputi rumah tinggal, toko, perusahaan industri, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, rumah sakit dan puskesmas, bioskop/tempat hiburan, perusahaan jasa perkantoran, dan tempat pariwisata.

Tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung tahun 2007 mencapai 20,8%, angka ini diperoleh dari operasi pengangkutan terhadap 22 kecamatan yaitu mencapai 567 m³/hari dengan penduduk terlayani mencapai 201.411 jiwa. Observasi di lapangan sampai saat ini masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai atau selokan dan membuang sampah di lahan kosong terlantar, hal ini mencerminkan bahwa tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum optimal.

Umumnya TPA yang terdapat di Kabupaten Bandung belum ditata dengan baik dan belum dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan dan juga tercatat beberapa kejadian pengaduan masyarakat dan pencemaran lingkungan di sekitar TPA yang mengakibatkan pencemaran air sumur, kematian ikan, dan menurunnya tingkat sanitasi masyarakat.

Tabel 7.7 Kondisi TPA Babakan di Kabupaten Bandung

No.	Parameter	Keterangan
A	TPA	
1	Nama	Babakan
2	Sistem Pengelolaan	Open dumping
3	Luas (ha)	10,1
4	Mulai operasional (tahun)	1992
5	Masa pakai (tahun)	Diperkirakan sampai tahun 2011 (\pm 4 tahun lagi)
6	Lokasi	Desa Babakan, Kecamatan Ciparay
B.	Sampah	
1	Timbulan (m ³ /hari)	8.799 (tahun 2006) (berdasarkan data jumlah penduduk dari SUSEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006 - BPS Kabupaten Bandung)
2	Terangkut (m ³ /hari)	(untuk tahun 2007 masih dalam proses pendataan) Tahun 2006: 980 m ³ /hari.

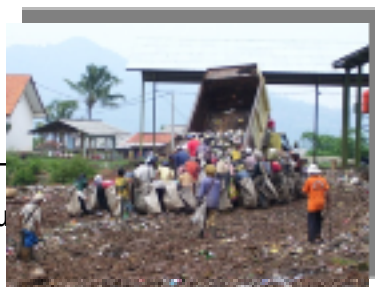
Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung, 2007



Gambar 7.1
Bangunan untuk komposting yang merupakan bantuan
Bank Dunia di TPABabakan



Gambar 7.2
Sistem Open Dumping di TPA Babakan



Gambar 7.3
Aktivitas Pemulung di TPA Babakan

Tabel 7.8 Jumlah dan Volume Sampah yang Terangkut Tiap Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Perkiraan Volume Sampah Sampah Setahun (m ³)	Sampah Terangkut (m ³ /hari)	Volume Sampah yang Dikelola	
						m ³	%
1	Cileunyi	125.580	251	91.673	52	16.276	17,8
2	Cimunyan	90.708	181	66.217	17		
3	Cilengkrang	40.499	81	29.564	-	-	-
4	Bjongsoang	78.951	158	57.634	29	9.202	16
5	Margahayu	114.51	229	83.592	118	36.953	44,2
6	Margaasih	119.442	239	87.193	63	19.575	22,5
7	Katapang	122.088	244	89.088	39	12.207	13,7
8	Dayeuhkolot	113.082	226	82.550	33	10.329	12,5
9	Banjaran	105.268	211	76.846	59	18.611	24,2
10	Pameungpeuk	62.634	125	45.723	12	3.756	8,2
11	Pangalengan	135.768	272	99.111	3	876	0,9
12	Arjasari	87.194	174	63.652	5	1.628	2,6
13	Cimaung	70.295	141	51.315	-	-	-
14	Cicalengka	101.948	204	74.422	35	11.061	14,9
15	Nagreg	45.963	92	33.553	-	-	-
16	Cilacung	74.211	148	54.174	-	-	-
17	Rancaekek	155.004	310	113.153	51	15.819	14
18	Ciparay	142.008	284	103.666	31	9.659	9,3
19	Pacet	98.909	198	72.204	-	-	-
20	Kertasari	66.032	132	48.203	-	-	-
21	Baleendah	178.06	356	129.984	63	19.594	15,1
22	Majalaya	149.91	300	109.434	55	17.196	15,7
23	Sdokaeruk	75.884	152	55.395	5	1.502	2,7
24	Paseh	111.114	222	81.113	7	2.128	2,6
25	Ibun	72.013	44	52.569	3	1.002	1,9
26	Sreang	147.584	295	107.736	37	11.475	10,7

27	Pasirjambu	77.591	155	56.641	-	-	-
28	Ciwidey	75.907	152	55.412	20	6.385	11,5
29	Rancabali	49.113	98	5.852	-	-	-
30	Cangkuang	56.638	113	41.346	-	-	-
31	Kutawaringin*	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung, 2007

Keterangan : - tidak ada data

*) Kecamatan baru



Tabel 7.9 Volume Sampah yang Terangkut

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2003	2004	2005	2006	2007
1	Volume sampah rumah tangga (pertahun) <u>Catatan:</u> volume timbulan sampah rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk*. Asumsi tingkat timbulan sampah : 2 l/orhari (SNI.03-3242-1994) * jumlah penduduk (Sumber : SUSEDA Kabupaten Bandung Tahun 2003,2004,2005,2006-BPS Kabupaten Bandung)	m ³	2.932.835	3.026.556	3.120.335	3.211.622	-
		Jiwa	4.017.582	4.145.967	4.274.431	4.399.482	-
2	volume sampah terangkut (pertahun)	m ³	442.800	403.200	284.830	0	(dalam proses pen dat aan)

Pada tahun 2005, TPA Leuwigajah (TPA utama untuk membuang sampah Kabupaten Bandung) longsor, sehingga pembuangan dialihkan ke TPA Babakan yang mengakibatkan peningkatan jarak tempuh kendaraan truk sampah dari daerah pelayanan ke TPA. Akibatnya kemampuan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan menurun.



Tabel 7.9 Lanjutan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2003	2004	2005	2006	2007
3	Jumlah TPA	Buah	3	2	2	3	3
			1. TPA Babakan (Kec. Ciparay) 2. TPA Pasirbuluh (Kec. Lembang) 3. TPA Leuwigajah (Kotif Cimahi)	1. TPA Babakan (Kec. Ciparay) 2. TPA Pasirbuluh (Kec. Lembang)	1. TPA Babakan (Kec. Ciparay) 2. TPA Pasirbuluh (Kec. Lembang)	1. TPA Babakan (Kec. Ciparay) 2. TPA Pasirbuluh (Kec. Lembang) 3. TPA Sarimukti (Kec. Cipatat)	Pada 24/4/07 TPA Pasirbuluh-Lembang longsor dan belum digunakan kembali samapi sekarang 1. TPA Babakan (Kec. Ciparay) 2. TPA Pasirbuluh (Kec. Lembang) 3. TPA Sari mukti (Kec. Cipatat)
4	Luas Total TPA	Ha	18,83	12,3	12,3	33,8	33,8
			1. TPA Babakan (10,1) sudah mengalami perluasan sejak tahun 2002, dari 4,1 Ha menjadi 10,1 Ha 2. TPA Pasirbuluh Lembang (2,2) 3. TPA Leuwigajah (6,53 Ha milik Kabupaten Bandung sedangkan Kota Bandung 17,5 Ha	1. TPA Babakan (10,1) 2. TPA Pasirbuluh Lembang (2,2)	1. TPA Babakan (10,1) 2. TPA Pasirbuluh Lembang (2,2)	1. TPA Babakan (10,1) 2. TPA Pasirbuluh Lembang (2,2) 3. TPA Sarimukti (21,5).	1. TPA Babakan (10,1) 2. TPA Pasirbuluh Lembang (2,2) 3. TPA Sari mukti (21,5).
5	Jumlah IPLT	Unit	2	2	2	2	2
			1. IPLT Cibeet 2. IPLT Soreang	1. IPLT Cibeet 2. IPLT Soreang	1. IPLT Cibeet 2. IPLT Soreang	1. IPLT Cibeet 2. IPLT Soreang	1. IPLT Cibeet 2. IPLT Soreang

Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung 2007

Permasalahan Limbah Padat di Kabupaten Bandung :

- Proses pembuangan dan penataan sampah, serta pengendalian dampak lingkungan belum dilakukan secara optimal, karena sarana yang belum mendukung
- Telah dibangun 1 (satu) unit alat komposting komunal di TPA Babakan pada tahun 2005 yang merupakan hibah dari Bank Dunia melalui WJEMP. Alat ini belum dioperasikan dan baru dilakukan uji coba.
- Jumlah penduduk meningkat yang menyebabkan volume sampah di Kabupaten Bandung semakin tinggi.
- Kesadaran masyarakat rendah dan kurangnya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

7.5.2 Limbah B3

Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dewasa ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani. Berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari berpotensi untuk menimbulkan limbah B3, seperti kegiatan industri, rumah sakit, Tempat Pembuangan Akhir Sampah, pertanian, dan sebagainya.

Kegiatan industri merupakan salah satu kegiatan utama yang dapat menimbulkan limbah B3. Hampir semua industri menggunakan proses penggunaan bahan kimia tertentu sebagai bahan baku dan bahan penolongnya. Sebagian bahan kimia tersebut bersifat mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, dan/atau bersifat korosif yang dikategorikan ke dalam bahan berbahaya dan beracun.

Fenomena peningkatan penggunaan bahan bakar batubara sebagai pengganti solar dan residu dengan alasan ekonomis pada industri-industri di Kabupaten Bandung akhir-akhir ini (sekitar 123 industri) menambah semakin kompleksnya penanganan pencemaran lingkungan yang harus dilakukan. Jenis limbah yang dihasilkan dari bahan bakar batubara adalah emisi gas buang (SO_2 , NO_2 , dan partikulat) dan limbah padat (*fly ash* dan *bottom ash*) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 termasuk ke dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Tabel 2 tentang Daftar Limbah B3 dari Sumber yang Spesifik, dengan Kode Limbah D240).

Selain limbah/abu batubara, lumpur yang dihasilkan dari IPAL industri juga dapat bersifat berbahaya dan beracun, sehingga lumpur IPAL ini dimasukkan dalam golongan limbah B3. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang menyebutkan lumpur IPAL termasuk ke dalam golongan limbah B3 (Tabel 2 tentang Daftar Limbah B3 dari Sumber yang Spesifik, dengan Kode Limbah D240). Menurut catatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung lumpur IPAL merupakan sumber limbah B3 yang paling banyak dihasilkan oleh industri di Kabupaten Bandung setelah limbah/abu batubara. Diperkirakan, industri tekstil dengan kapasitas 300 ton/bulan dapat menimbulkan lumpur IPAL sekitar 3000 kg/bulan.

7.5.2.1 Industri yang menggunakan Batu Bara

Seiring dengan dikurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang berimplikasi terhadap tingginya harga BBM, serta ditetapkannya Kebijakan Diversifikasi Energi Nasional sebagai bagian dari Kebijakan Umum Bidang Energi yang mengarahkan pada pengurangan pemakaian minyak bumi dan meringkatkan pemakaian batubara dan gas, maka dalam tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan penggunaan bahan bakar batubara sebagai pengganti BBM (solar atau residu/IDO) pada industri-industri di Kabupaten Bandung.

Sebagai gambaran, pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah industri pengguna boiler berbahan bakar batubara, yaitu ada 123 industri atau terjadi peningkatan sekira 100% lebih dari jumlah industri pada tahun 2005, yaitu sebanyak 61 industri. Dan peningkatan sebanyak 7 industri menjadi 130 industri pada tahun 2007.

Di wilayah Kabupaten Bandung terdapat beberapa jenis kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan limbah B3, antara lain industri tekstil, industri elektroplating dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 7.10**.

Tabel 7.10 Industri yang berpotensi menimbulkan limbah B3 berdasarkan zona

No	Nama dan Lokasi Industri	Jenis Industri	Timbulan Limbah Abu Batubara	
			Timbulan Lumpur IPAL	Bottom Ash dan Fly Ash
1	CANDRATEX Dayeuhkolot	Textil	IPAL CISIRUNG	BA = 1,8 ton/hr FA = 0,9 ton/hr
2	ADETEX Banjaran	Textil	0,3 ton/dn	BA = 1,3 ton/hr FA = 170 kg/hr
3	INDOVON Rancaekek	Textil	2,4 kg/hr	BA = 25 kg/hr FA = 25 kg/hr
4	PENCELUPAN HARAPAN Majalaya	Textil	800 kg/tr	BA + FA = 100 kg/hr
5	TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA Baleendah	Textil	20 kg/bln	BA+FA = 2 ton/hr
6	CATUR KARTIKA JAYA Cileunyi	Textil	12,5 kg/dn	-
7	CEMARA AGUNG Cicalengka	Textil	1600 kg/dn	FA dan BA = 25 ton/hr
8	IKAFOD PUTRATAMA Cileunyi	Makanan	600 kg/dn	-
9	YORKSHIRE Cikancung	Bahan Kimia Textil	Sedikit	-
10	BOZZETTO Banjaran	Bahan Kimia Textil	50 kg/bln	-
11	KURNIA USAHA WASHING Sreang	Washing	1250 kg/1,5bln	-
12	MARGAASIH WASHING Margaasih	Washing	1 ton/bln	BA = 200 kg/hr FA = 200 kg/hr
13	SINAR RUNNER INDO Katapang	Sepatu	-	BA = 300 kg/hr FA = 50 kg/hr
14	SUDONG METAL Pameungpeuk	Elektroplating	200-350 kg/bln	-
15	COMAX Dayeuhkolot	Elektroplating	250 kg/tm	-
16	HESTRINDO SENTOSA Rancaekek	Plating	2-3ton/dn	-
17	PAPYRUS SAKTI Banjaran	Kertas	550 kg/tr	BA+FA = 800 kg/tr
18	PLTU PANASIA Dayeuhkolot	PLTU	-	FA = 30 ton/hr

Bersambung

Lanjutan Tabel 7.10

No	Nama dan Lokasi Industri	Limbah B3 Lainnya	Keterangan
1	CANDRATEX Dayeuhkdod	-	Abu batubara dikarungi, disimpan di TPS
2	ADETEX Banjaran	-	Lumpur IPAL dan abu batubara disimpan di TPS
3	INDOVON Rancaekek	-	Abu batubara diambil oleh pihak ketiga tak berijin
4	PENCELUPAN HARAPAN Majalaya	-	Lumpur IPAL disimpan di TPS lain
5	TRIDAYAMAS SINAR PUSAKA Balendah	-	Lumpur IPAL disimpan, abu batubara diambil oleh suplier
6	CATUR KARTIKA JAYA Cileunyi	-	Lumpur IPAL dikarungi dan disimpan disekitar lokasi IPAL
7	CEMARAAGUNG Cicalengka	-	Lumpur IPAL dikarungi dan disimpan di TPS, abu batubara diangkut oleh suplier
8	IKAFOOD PUTRA TAMA Cileunyi	-	Lumpur IPAL dikarungi dan disimpan di TPS
9	YORKSHIRE Cikancung	Oli bekas 200lt/bln	Oli bekas dibakar bersama solar untuk bahan bakar Lumpur IPAL dikembalikan ke bak equalisasi
10	BOZZETTO Banjaran	-	Lumpur dikarungi dan disimpan di TPS B3
11	KURNIA USAHA WASHING Soreang	-	Lumpur IPAL disimpan di lokasi pabrik
12	MARGAASIH WASHING Margaasih	-	Lumpur IPAL disimpan di lokasi pabrik
13	SINAR RUNNER INDO Katapang	-	Abu batubara disimpan disekitar lokasi pabrik
14	SUDONG METAL Pameungpeuk	-	Lumpur IPAL disimpan di lokasi pabrik
15	COMAX Dayeuhkdod	-	-
16	HESTRINDO SENTOSA Rancaekek	Limbah PCB bekas dan riject	Limbah PCB bekas dan riject disimpan di lokasi pabrik
17	PAPYRUS SAKTI Banjaran	-	Lumpur IPAL dan limbah batubara dikarungi dan disimpan di TPS
18	PLTU PANASIA Dayeuhkdod	-	-

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan : - = Tidak ada data

7.5.2.2 Limbah Rumah Sakit

Kondisi pengelolaan lingkungan di RS/Puskesmas menghasilkan data-data sebagai berikut :

a. Sumber limbah medis pada umumnya adalah Ruang Operasi, Ruang Perawatan, Ruang Kebidanan, Laboratorium, dan Kegiatan Radiologi;

b. Ada 4 RS yang telah dilengkapi dengan IPAL, yaitu: RSUD Soreang, RS AMC, RS Al-Ihsan, RSD Majalaya, RS Pasir Junghun, RS Lanud Sulaeman dan RS Bina Sehat. Namun seluruhnya belum dilengkapi dengan dokumen perijinan dan belum dilengkapi dengan alat ukur debit air limbah (*flow meter*).



IPAL di RSUD Soreang dengan sistem biologi, yang baru beroperasi tahun 2006

c. Untuk Puskesmas Cicalengka, Puskesmas Banjaran dan Puskesmas Pangalengan hanya menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah medis dari ruang perawatannya. Untuk limbah padat medis Puskesmas Cicalengka di kelola melalui pihak ketiga PT. Medinvest, Puskesmas Banjaran, limbah padat medisnya dilakukan dengan dibakar dan hanya Puskesmas Pangalengan yang mempunyai insenerator sendiri.

d. 4 RS memiliki insinerator (RSUD Soreang, RS Bina Sehat, RS AMC, RS Al Ihsan dan RS Majalaya) tetapi hanya 3 (RS Cahaya Kawalayaan, RS AMC, dan RS Al Ihsan) yang mengoperasikannya. Pada umumnya insinerator yang ada tidak dioperasikan dengan alasan resistensi masyarakat sekitar dan tidak efisiennya sistem pembakaran insinerator tersebut.



Insinerator di RS Al Ihsan dengan kapasitas 1 m^3 , dioperasikan 2 kali seminggu

- e. RSUD Soreang, RS Bina Sehat, dan RS Yung hun mengelola limbah padat medisnya melalui pihak ke-3 PT Rekeyasa Hijau Indonesia (PT. RHI) yang menempatkan insineratornya di RS Yung hun, sedangkan RS Sulaeman mengelola melalui RSAU Salamun yang berkedudukan di Kota Bandung. Baik PT. RHI maupun RSAU Salamun belum dilengkapi dengan perijinan.
- f. Semua RS/puskesmas yang dipantau belum melakukan analisis limbah B3 (lumpur IPAL dan abu insinerator).
- g. Semua RS/puskesmas yang dipantau belum memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 yang berijin.

Tabel 7.11 Pengelolaan Limbah B3 Pada Rumah Sakit

No	Nama Rumah Sakit/ Puskesmas dan Wilayah	Data Umum	Volumelimbah cair B3
1	RSUD Soreang Soreang	Jumlah Pegawai 320 Orang Jumlah Tempat Tidur 136 Bauh	60 m ³ /hari
2	RS. Majalaya Majalaya	Jumlah Pegawai 310 Orang Jumlah Tempat Tidur 155 Bauh	-
3	RS. Islam Al-Ihsan Baleendah	Jumlah Pegawai 466 Orang Jumlah Tempat Tidur 169 Bauh	87 m ³ /hari
4	RS. Bina Sehat Dayeuh Kolot	Jumlah Pegawai 142 Orang Jumlah Tempat Tidur 59 Bauh	20 liter/2 bulan
5	RS. AMC Cileunyi	Jumlah Pegawai 163 Orang Jumlah Tempat Tidur 126 Bauh	500 liter/hari
6	RS. TNIAU Sulaeman Margahayu	Jumlah Pegawai 75 Orang Jumlah Tempat Tidur 20 Bauh	1 liter/ hari
7	Puskesmas Banjaran DTP Banjaran	Jumlah Pegawai 51 Orang Jumlah Tempat Tidur 15 Bauh	-
8	Puskesmas Banjaran Kota Banjaran	Jumlah Pegawai 23 Orang -	2 m ³
9	Puskesmas DTP Pangalengan Pangalengan	Jumlah Pegawai 25 Orang Jumlah Tempat Tidur 23 Bauh	-
10	Puskesmas Bihbul Margahayu	Jumlah Pegawai 21 Orang -	-

Bersambung

Tabel 7.11 Lanjutan

No	Nama Rumah Sakit/ Puskesmas dan Wilayah	Volume limbah padat B3		Keterangan
		Medis	Non Medis	
1	RSUD Soreang Soreang	8 kg/hari	3 m ³ /minggu	Sistem IPAL ada Insektor tidak berfungsi
2	RS. Majalaya Majalaya	1,5-2 kg/hari	25 kg/hari	IPAL berupa bak penampung Insektor dalam keadaan rusak
3	RS. Islam Al-Ihsan Balendah	1 kg/hari	350 kg/hari	Insektor ada dengan kapasitas 200kg Unit IPAL: equalisasi, aerasi, clarifier, kaprit, filtrasi dan outlet TPS limbah B3 ada tapi belum difungsikan seluruhnya
4	RS. Bina Sehat Dayuh Kolot	200 kg/bulan	-	IPAL hanya berupa bak penampung Belum melakukan pengujian limbah cair
5	RS. AMC Cileunyi	25 kg/bulan	0,5 m ³ /hari	IPAL dan Insektor ada
6	RS. TNI AU Sulaeman Margahayu	5 liter/hari	20 liter/hari	IPAL dan Insektor tidak ada
7	Puskesmas Banjaran DTP Banjaran	-	-	IPAL ada Unit septik tank dengan kapasitas 3 m ³ Limbah padat dibuang dan dibakar di tungku
8	Puskesmas Banjaran kota Banjaran	-	0,5 m ³ /hari	Sampah medis dimasukkan dalam septi box dikirim dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Insektor tidak ada Limbah cair dari MCK disalurkan ke selokan/parit
9	Puskesmas DTP Pangalengan Pangalengan	-	-	Limbah cair ditampung di septik tank limbah medis dibuang di septi box Insektor tidak berfungsi
10	Puskesmas Bihbul Margahayu	5 biji spot suntikan/hari	20 liter/hari	IPAL tidak ada Septik tank dari kegiatan domestik, kapasitas 16 m ³ Insektor sudah tidak berfungsi

Sumber : BPLH Kabupaten Bandung, 2008

Keterangan: -tidak ada data

Permasalahan Limbah B3

Selain persampahan, permasalahan limbah padat di Kabupaten Bandung yang cukup dominan adalah lumpur yang timbul sebagai hasil sampingan proses pengolahan air limbah pada IPAL dan abu akibat pembakaran batubara (*fly ash* dan *bottom ash*). Berdasarkan PP No. 18 *juncto* No. 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, lumpur dan abu batubara di kategorikan sebagai limbah B3.



Abu Sisa Pembakaran Batubara yang Disimpan di Lokasi Industri

Volume lumpur ini sangat besar terutama jika pengolahan yang dilakukan menggunakan sistem fisika-kimia. Sebagai gambaran, satu industri tekstil dengan kapasitas produksi sekitar 30 ton per bulan dapat menimbulkan lumpur IPAL sebanyak 2000 Kg per bulan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama tahun 2007, belum banyak industri yang melakukan pengolahan lumpur IPALnya; 3 (tiga) industri mengolah melalui pihak ketiga (PT. PPLi), 6 (enam) industri membakar dalam boiler bersama dengan batubara, yang lainnya hanya melakukan pengolahan secara fisik (pengurangan kadar air dan penyimpanan di lokasi industri masing-masing. Sementara kegiatan yang telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 (umumnya Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3) terdata hanya 57 industri. Demikian pula halnya dengan abu batubara.

Tiga industri telah memanfaatkan limbah batubara tersebut menjadi bahan bangunan (satu industri diantaranya telah memiliki perijinan), hanya sebagian kecil yang mengelola melalui pihak ketiga berijin, sebagian besar lainnya hanya menyimpannya di lokasi industri yaitu pada TPS berijin atau tidak berijin, menjadikan bahan urugan. Berdasarkan catatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, pernah terjadi 3 (tiga) kasus pencemaran lingkungan berat yang diperkirakan akibat limbah B3. Pada tahun 1999, terjadi kebocoran tangki soda kostik (bersifat berbahaya dan beracun) pada satu industri tekstil di Kecamatan Cicalengka. Soda kostik, merupakan salah satu bahan penolong utama dalam industri tekstil, lolos ke badan air di sekitarnya sehingga mengakibatkan kematian ikan. Masyarakat sekitar yang berusaha menangkap ikan-ikan tersebut

mengalami luka pada kulitnya. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh pihak berwajib.

Kasus kedua terjadi sekitar Juni 2002 ketika masyarakat mengadukan salah satu industri pelapisan logam di Kecamatan Margahayu karena diduga membuang limbah cair dan limbah padat tanpa diolah ke saluran drainase sehingga diduga mencemari sumur-sumur penduduk di sekitarnya. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, air saluran drainase lingkungan memang mengandung kadar logam berat Krom dan Nikel yang tinggi. Kedua logam tersebut memang digunakan oleh



Gambar 7.4 Luka bakar pada kaki korban akibat terkena limbah abu batubara yang masih panas

perusahaan tersebut sebagai bahan penolong yang termasuk ke dalam limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Tetapi, air sumur penduduk tidak tercemar akibat rembesan limbah tersebut. Akibat kasus pencemaran dari limbah B3 yang merugikan masyarakat di sekitar industri tersebut, terhitung sejak akhir September 2002, perusahaan tersebut telah ditutup dan tidak beroperasi lagi.

Kasus ketiga terjadi sekitar Juni 2005 ketika seorang anak (usia 6 tahun) di Kecamatan Banjaran mengalami luka bakar pada sebagian tubuhnya akibat terkena limbah batubara yang dibuang secara ilegal oleh salah satu industri tekstil yang menggunakan batubara di tanah (lihat **Gambar 7.4**). Kasus kecelakaan akibat limbah batubara ini terjadi lagi pada bulan September 2006 yang menimpa salah seorang anak warga Kp. Rancaengang Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk. Sebagaimana kasus terdahulu, pada kedua kasus kecelakaan tersebut terjadi luka bakar yang cukup parah pada kaki korban. Kasus kecelakaan akibat pembakaran sampah di sekitar urugan batubara terjadi lagi pada bulan Agustus 2008 seorang warga Kp. Cileutik Desa Banjaran Kecamatan Banjaran yang mengalami luka bakar di sebagian anggota tubuh.

Dari uraian tersebut di atas, maka terlihat sangat diperlukannya pengelolaan limbah B3 yang memenuhi syarat. Jika pengelolaan limbah B3 masih diabaikan, maka

kemungkinan terjadinya dampak berupa pencemaran lingkungan dan kecelakaan yang selanjutnya menimbulkan keresahan masyarakat akan terus terjadi.

7.6 Respon Yang Telah Dilakukan

Beberapa respon yang telah dilakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan permukiman adalah:

- Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani
- Peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air
- Perbaikan, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap kapasitas sistem transmisi dan distribusi
- Mensosialisasikan septic tank komunal dengan tujuan untuk menurunkan beban pencemaran air.
- Normalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase yang ada
- Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan
- Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan.
- Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilaksanakan secara terpilah
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan
- Menyediakan tempat-tempat penampung sampah yang sudah dipilah
- Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah medis terpadu skala Jawa Barat.
- Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan-kegiatan industri, RS/Puskesmas, TPA dan lain-lain
- Pembuatan sumur pantau di Kecamatan Rancaekek
- Pengelolaan kawasan lindung dan sumberdaya air
- Menggalakkan pembangunan sumur resapan.
- Penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga sumberdaya air.
- Sosialisasi pengelolaan limbah B3 kepada penanggung jawab kegiatan yang menimbulkan limbah B3
- Rencana pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Batubara Terpadu dengan memanfaatkan limbah/abu batubara menjadi bahan bangunan.
- Sosialisasi 4R

- Pembangunan *pilot project* PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di TPA Babakan.
- Penataan kelembagaan Dinas pengelola persampahan.
- Penyusunan kebijakan Manajemen Persampahan di Kabupaten Bandung
- Merekrut jumlah tenaga lapangan yang cukup memadai
- Menambah armada- armada/pengangkut sampah dan mengatur rute-rute jangkauan pelayanan.
- Memantapkan peran serta masyarakat, mulai dari kelompok PKK tingkat RT, RW dan kelurahan/desa serta kecamatan dan kantor-kantor/dinas guna mewujudkan kesehatan lingkungan.
- Menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycled) yang dimulai dari rumah tangga
- Pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan TPA Babakan.
- Mewajibkan pemrakarsa kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan untuk menyusun studi AMDAL atau UKL dan UPL, termasuk pembuatan IPAL.



Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, seperti dinyatakan dalam pasal 28H dan 33 UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Senada dengan hal itu, pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, keberlanjutan, dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup

secara baik dan harmonis. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah-langkah di dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

8.1 Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

- **Undang – Undang**

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2005. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

- **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Tentang Erosi
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999, Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Nasional

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
11. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- **Surat Keputusan**
 1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2006, Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 2. Surat Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000, Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 3. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/Bapedal/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
 4. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
 5. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 6. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 7. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 8. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 9. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 103 Tahun 1994, tentang Pengawasan RKL-RPL.

11. Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-68/Bapedal/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
12. Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor Kep-08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas

8.2 Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2006 (registrasi 2006) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah Propinsi Jawa Barat tentang Kawasan Lindung
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 3 tahun 2002 tentang Agribisnis dan Pertambangan.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan.
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 19 tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 3/2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 12 tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air.
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan .
10. Keputusan Gubernur Jabar No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.
11. Larangan penebangan hutan alam dan jenis rimba hutan di hutan produksi (Moratorium Logging) yang dituangkan dalam Sk Gub No. 522.81/3339/Huk yang ditujukan kepada PT. Perhutani dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.

8.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kab. Bandung
2. Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
3. Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan
4. Peraturan Daerah No. 27 tahun 2000 tentang Pelaksanaan, Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaian
5. Peraturan Daerah No. 31 tahun 2000 tentang K3
6. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Bandung
7. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung
8. Peraturan Daerah No. 3 tentang Ijin UU Gangguan
9. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
10. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2001 tentang RT RW
11. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001 tentang Perijinan Dilingkup Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
12. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat
13. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak
14. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan
15. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Industri di Kab. Bandung
16. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan
17. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum



18. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
19. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame
20. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
21. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dok UKL-UPL dan SPPL
22. Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Kab. Bandung
23. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame
24. Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 2000 tentang K3
25. Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
26. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
27. Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Kab. Bandung
28. Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kab. Bandung
29. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis
30. Peraturan Bupati No. 35 tahun 2005 tentang Juklak Perda No. 2 Tahun 2005

Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang berdasarkan hasil identifikasi kondisi lingkungan di lapangan dan melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan perencanaan kegiatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan terutama yang bersifat lokal, beberapa hal telah dilakukan selama tahun 2008, antara lain:

- a. Menyusun *draft* rancangan Perda tentang Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium BPLH dan *draft* rancangan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.



- b. Melakukan pemantauan terhadap sumber pencemar dan lingkungan penerima dampak
- c. Melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui tatap muka, brosur, pamflet, serta media cetak dan elektronik
- d. Melakukan tindakan penegakan hukum berupa: pembinaan intensif, pemberian surat peringatan dan teguran, serta pemanggilan terhadap penanggung jawab kegiatan usaha, dan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) terhadap kegiatan industri yang tidak menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan.
- e. Menyusun studi dan penelitian yang relevan dengan permasalahan lingkungan actual, seperti penyusunan Studi Pengelolaan Limbah Batubara.
- f. Membangun fasilitas pengolahan limbah cair dan padat untuk industri kecil sebagai *pilot project* (biogas untuk limbah kotoran sapi peternakan dan IPAL untuk industri pabrik tahu).
- g. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti pada kegiatan Penelitian Dampak Limbah B3 terhadap Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Majalaya. Pada kegiatan ini dilibatkan LSM setempat serta masyarakat dan karyawan industri sekitar dalam pemeriksaan kesehatan akibat penggunaan bahan bakar batubara.

8.4 Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Air



1. Penegakan hukum dan pengaturan yang lebih ketat dalam ijin pengambilan air tanah dalam, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama untuk kegiatan industri
2. Kewajiban bagi setiap industri dan permukiman untuk membuat sumur resapan, yang standarnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam SNI tentang sumur resapan pada Perda tentang sumur resapan)
3. Kewajiban kepada setiap lahan industri manufaktur untuk menyediakan lahan resapan air hujan/ ruang terbuka hijau minimal 10% dari keseluruhan lahan yang dimilikinya.

4. Larangan membuang air limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu yang ditetapkan baik melalui peraturan Propinsi Jawa Barat maupun Nasional.
5. Larangan pembuangan limbah padat dan limbah B3 ke badan air permukaan.
6. Penegakan peraturan untuk tidak membuang sampah domestik, limbah padat dari kegiatan industri dan aktivitas lainnya ke semua jenis badan air permukaan (sungai, danau, balong, laut, dan sebagainya).
7. Pembatasan pemanfaatan sumber daya air berupa mata air dan atau sumber air lainnya untuk dikuasai oleh industri/swasta.
8. Larangan membuang limbah domestik ke badan sungai karena akan berakibat banjir pada musim hujan dan tingginya beberapa parameter fisik kimia yang dapat melebihi baku mutu yang berlaku.
9. Kewajiban untuk membuat MCK bagi semua penduduk yang berada di sekitar badan sungai.
10. Kewajiban pembuatan IPAL, pemasangan flowmeter dan pemantauan kualitas air limbah serta memiliki perijinan bagi kegiatan industri yang menghasilkan air limbah.
11. Pembatasan dan penegakan hukum dalam penggunaan air tanah dalam untuk kegiatan pariwisata dan industri.

8.5 Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Udara

1. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada lokasi prioritas
2. Melakukan pemantauan pengendalian pencemaran udara pada sumber baik industri maupun kendaraan.
3. Sosialisasi pengendalian pencemaran udara, pemanasan global dan perubahan iklim, serta pembatasan penggunaan bahan perusak ozon.
4. Melakukan penghijauan.
5. Melakukan pengawasan.
6. Pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan utilitas perkotaan harus mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus selalu mempertimbangkan kondisi alam, geografis, iklim dan daya dukung lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung.
7. Larangan membuang emisi gas ke lingkungan melebihi batas emisi gas buang yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundangan baik di tingkat Propinsi maupun Nasional.

8. Penegakan hukum dalam kebijakan transportasi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan emisi gas buang dari kendaraan bermotor.

8.6 Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Sumber Daya Lahan dan Hutan



1. Pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan harus sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung (RT RW).
2. Memperketat pemberian ijin kegiatan di Kawasan Lindung, seperti :
 - Areal Sempadan Sungai
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Nasional.
- Kawasan konservasi
- dan lain-lain.
3. Sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur kawasan lindung dan konservasi.
4. Mewajibkan reboisasi pada lahan-lahan yang telah dibuka karena dimanfaatkan untuk kepentingan industri, pertanian, perkebunan, tambak/ perikanan, pemukiman, sarana dan prasarana, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan lahan/ hutan/ kawasan lindung untuk kepentingan pariwisata harus diarahkan pada jenis wisata alam (Ekowisata).
6. Pemanfaatan lahan hutan dan kawasan lindung yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat harus menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan masyarakat sekitar untuk turut serta aktif dalam menjaga lingkungan.
7. Menggali nilai-nilai kearifan tradisional dalam menjaga keutuhan lingkungan terutama hutan.
8. Untuk menjaga keanekaragaman hayati yang semakin menurun, prinsip moratorium bagi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik harus ditegakkan di kawasan-kawasan Taman Nasional, Hutan Cagar Alam, Taman Wisata dan Hutan Pembinaan Margasatwa.
9. Kewajiban reklamasi dan reboisasi pada lahan-lahan kritis dilakukan oleh dinas/ instansi yang berwenang. Pelaksanaannya harus melibatkan

masyarakat atau organisasi masyarakat, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas kegiatan.

10. Aktivitas Reklamasi dan Reboisasi juga menjadi kewajiban pada lahan-lahan industri dan pertambangan.
11. Pembatasan, pengaturan dan penertiban usaha-usaha penambangan Galian C. Termasuk diantaranya kewajiban untuk mempublikasikan daerah-daerah yang layak untuk ditambang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTRW), yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
12. Arah pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk industri pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus mengedepankan prinsip agroindustri yang menerapkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan, termasuk diantaranya pembatasan penggunaan pestisida, insektisida dsb.
13. Pengembangan agroindustri yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida, insektisida dsb melainkan menggunakan bahan-bahan alami seperti biosida dsb, berhak mendapat prioritas dukungan dalam hal perijinan, peminjaman modal dan pemasaran dari pemerintah daerah.
14. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan industri pertanian diarahkan dan diprioritaskan pada lahan-lahan yang telah dibuka, dan dengan melakukan seminimal mungkin pembukaan lahan-lahan baru.
15. Pengembangan industri pertanian dilakukan dengan pendekatan teknologi untuk penyediaan bibit, perbanyakan, penanaman dan panen sehingga tidak dibutuhkan konversi lahan secara luas.

8.7 Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Keanekaragaman Hayati

1. Untuk menjaga keanekaragaman hayati yang semakin menurun, prinsip moratorium bagi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik harus ditegakkan di kawasan-kawasan Taman Nasional, Hutan Cagar Alam, Taman Wisata dan Hutan Pembinaan Margasatwa.
2. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga flora dan fauna di sekitar hutan.
3. Melaksanakan gerakan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan bekas perambahan.
4. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terbukti melakukan perambahan.

8.8 Agenda Pengelolaan Tentang Masalah Lingkungan Permukiman



1. Penegakan hukum dalam hal penetapan Koefisien dasar Bangunan (KDB), yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.
2. Penegakan hukum dalam penertiban pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan.

Pemanfaatan ruang yang dimaksud harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.

3. Kewajiban bagi setiap industri dan developer untuk membuat sumur-sumur resapan, melakukan penghijauan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 10 % dari luas lahan yang dimiliki.
4. Larangan pembuangan sampah domestik dan limbah padat dari kegiatan industri dan aktivitas lainnya ke sungai dan badan air permukaan lainnya.
5. Upaya pemilahan sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan kering dihimbau untuk dilakukan di tingkat rumah tangga dan wajib dilakukan di tingkat TPS.
6. Pengelolaan sampah di TPA-TPA harus mengutamakan prinsip dan kaidah 4R.
7. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.



8. Segera mengimplementasikan rencana Tempat Pengelolaan Limbah Batu Bara Terpadu di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya.
9. Sistem penanganan limbah batubara terutama penyimpanannya perlu ditingkatkan agar limbah tersebut tidak

disimpan tanpa wadah di tempat terbuka sebelum ditangani lebih lanjut (dimanfaatkan, di kirim ke tempat lain). Pengiriman limbah batubara ke luar



pabrik sebaiknya dalam keadaan tertutup (dengan wadah) dan hanya untuk dimanfaatkan menjadi produk lain;

10. Untuk limbah batubara yang tidak bisa ditingkatkan kualitasnya dan masih mempunyai kadar karbon dan nilai kalortinggi sebaiknya digunakan sebagai bahan bakar untuk pabrik semen atau dibuat briket batubara;
11. Untuk mengatasi masalah limbah limbah batubara, sebaiknya pabrik-pabrik tekstil yang sudah menggunakan batubara diminta untuk meningkatkan pengetahuan operator boiler mengenai penggunaan batubara. Di samping itu, pabrik juga harus mempunyai pegangan tentang spesifikasi batubara yang sesuai dengan boiler. Untuk industri atau pabrik yang akan menggunakan batubara sebaiknya ijinnya diperketat, yakni boiler yang akan dipakai harus mempunyai kinerja yang baik (baik dari spesifikasi boiler maupun saat *commissioning*) dan mempunyai spesifikasi batubara yang jelas serta prosedur pengoperasian yang baik.
12. Pembatasan dan peningkatan pengawasan yang lebih ketat dalam pembangunan hotel, restoran, pemukiman dan lain-lain di lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Daftar Pustaka

- Anonimous, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang”.
- Anonimous, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- Anonimous, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
- Anonimous, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang “Ketenagalistrikan”.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air”.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.
- Anonimous, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Pengendalian Pencemaran Udara”.
- Anonimous, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang “Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air”.
- Anonimous, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Nomor Kep-02/MENLH/8/1998 tentang “Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan”.
- Anonimous, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Nomor Kep-14/MENLH/8/1994 tentang “Pedoman Umum Penyusunan AMDAL”.

- Anonymous, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang “Baku Mutu Emisi dari Sumber Tidak Bergerak”.
- Anonymous, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Nomor Kep-48 tahun 1996 tentang “Baku Mutu Tingkat Kebisingan”.
- Anonymous, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 40 tahun 2000 tentang “Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”.
- Anonymous, Keputusan Menteri Lingkungan RI Nomor 17 tahun 2001 tentang “Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL”.
- Anonymous, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1457 K/28/MEM/2000 tentang “Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi”.
- Anonymous, Peraturan Daerah No. 4 tahun 2006 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- Anonymous, Peraturan Daerah No. 12 tahun 2001 tentang “Kawasan Lindung”
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, “Bandung Dalam Angka 2006-2007”
- Badan Perencanaan Daerah Kab. Bandung, “Laporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2007”
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, “Laporan Kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan B3 Tahun 2007”
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung, “Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bandung Tahun 2007”

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung, "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007"

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, "Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2007"

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, "ASER 2007 Kabupaten Bandung"

BPLHD Propinsi Jawa Barat, "Status Lingkungan Hidup Jawa Barat 2004"

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, "Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2005"

Rencana Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010